



**PERATURAN BUPATI LIMA PULUH KOTA
NOMOR 40 TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN 2023**

**DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TAHUN 2022**

Sarilamak, 04 Agustus 2022



SALINAN

BUPATI LIMA PULUH KOTA
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI LIMA PULUH KOTA
NOMOR 40 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI LIMA PULUH KOTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan amanat pasal 142 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dimana Rencana Kerja Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah paling lambat 1 (satu) bulan setelah Rencana Kerja Pemerintah Daerah ditetapkan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2023 dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022);
11. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 27);
12. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 195);
13. Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Barat Nomor 18 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 (Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022 Nomor 19);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2011 Nomor 10);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 15);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 1);
17. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 36 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2022 Nomor 36).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN 2023**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lima Puluh Kota.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota.
3. Bupati adalah Bupati Lima Puluh Kota.
4. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
5. Pembangunan adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa dalam rangka mencapai tujuan bernegara.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
7. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 yang selanjutnya disebut RKPD Tahun 2023 merupakan dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023, program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi.
8. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah satuan kerja di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.
9. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja PD adalah rencana kerja Perangkat Daerah di lingkup Pemerintahan Kabupaten Lima Puluh Kota.
10. Kebijakan Umum Anggaran, yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada PD untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran PD.
12. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan.
13. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah.
14. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.

Pasal 2

Maksud penyusunan Renja PD adalah untuk :

- a. Menjabarkan program, kegiatan, dan sub kegiatan sebagaimana tercantum dalam RKPD tahun 2023 sesuai dengan urusan dan kewenangan masing-masing PD; dan
- b. Menyediakan suatu acuan dan pedoman pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan masing-masing PD untuk tahun 2023.

Pasal 3

Tujuan disusunnya Renja PD adalah untuk :

- a. Memudahkan seluruh jajaran pimpinan dan staf PD dalam melaksanakan program dan kegiatan tahun 2023;
- b. Menjadi pedoman dalam pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi program dan kegiatan sesuai dengan kewenangan dan tupoksi pada masing-masing PD; dan
- c. Menjadi salah satu acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) PD tahun 2023.

BAB II

SISTEMATIKA PENULISAN

Pasal 4

(1) Renja Perangkat Daerah disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra PD
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan PD
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD
- 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III : TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

- 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja PD

3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT
DAERAH

BAB V : PENUTUP

- (2) Renja PD Tahun 2023 sebagaimana dimaksud ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

PELAKSANAAN

Pasal 5

- (1) Kepala PD menyusun Renja PD Tahun 2023 dengan berpedoman kepada RKPD Tahun 2023 dan Renstra PD.
- (2) Renja PD sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan penjabaran dari RKPD.
- (3) PD menyusun RKA Tahun 2023 dengan berpedoman kepada Renja PD.

Pasal 6

Agar program dan kegiatan yang tertuang dalam Renja PD dapat dilaksanakan serta untuk mewujudkan konsistensi antara perencanaan dan penganggaran pembangunan, maka PD harus memastikan substansi Renja PD dapat dituangkan ke dalam DPA PD Tahun 2023.

BAB IV

PEMBIAYAAN

Pasal 7

Pembiayaan pelaksanaan Renja PD ini bersumber dari APBD Kabupaten.

BAB V

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 8

- (1) Bupati melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renja PD.
- (2) Dalam melakukan pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (1), Bupati dapat menunjuk pejabat tertentu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.

Ditetapkan di Sarilamak
pada tanggal 4 Agustus 2022

BUPATI LIMA PULUH KOTA

ttd

SAFARUDDIN DT. BANDARO RAJO

Diundangkan di Sarilamak
pada tanggal 4 Agustus 2022

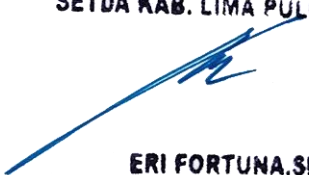
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

ttd

WIDYA PUTRA

BERITA DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN 2022 NOMOR 40

salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KAB. LIMA PULUH KOTA


ERI FORTUNA, SH
NIP.19660104199303 1 006

Kata Pengantar

Puji dan syukur kehadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan hidayahNya kami dapat menyusun dan menyelesaikan Rancangan Awal Rencana Kerja (Renja) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2023.

Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintahan daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Dengan selesainya Rencana Kerja Perangkat Daerah ini, diharapkan semua pihak yang terkait dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dapat mempedomani Renja ini sehingga tujuan dan sasaran yang kita harapkan dalam pencapaian program prioritas pembangunan Kabupaten Lima Puluh Kota untuk satu tahun kedepan dapat dicapai.

Terakhir kami menyadari bahwa Rencana Kerja Perangkat Daerah ini masih jauh dari kesempurnaan dan masih membutuhkan perbaikan-perbaikan dan penyesuaian lebih lanjut. Untuk itu saran dan kritik yang membangun sangat diharapkan demi penyempurnaan Renja ini dimasa yang akan datang, terimakasih.

Tanjung Pati, 04 Agustus 2022

Pih. KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

YULIA MASNA, SKM
NIP . 19780704 200212 2 005

DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	i
Daftar Isi	ii
Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor Tahun 40 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2023	
BAB I : PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum.....	5
1.3. Maksud dan Tujuan	8
1.4. Sistematika Penulisan	9
BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PPKBPPPA	10
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas PPKBPPPA Tahun Lalu dan Capaian Renstra DPPKBPPPA	10
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan DPPKBPPPA	32
2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi DPPKBPPPA	39
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	41
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	92
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	95
3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional, Provinsi Sumatera Barat dan Kabupaten Lima Puluh Kota	95
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja DPPKBPPPA	96
3.3. Program dan Kegiatan	10
	0
BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	11
	3
BAB V : PENUTUP	13
	0

Keputusan Bupati Lima Puluh Kota Nomor Tahun 391 Tahun 2021 Tentang Pembentukan Struktur Organisasi Tim Penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota dalam Formasi Jabatan Ex-Officio

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	: Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja DPPKBPPPA dan Pencapaian Renstra DPPKBPPPA s/d Tahun 2022	12
Tabel 2.2	: Pencapaian Kinerja Pelayanan DPPKBPPPA Kabupaten Lima Puluh Kota	33
Tabel 2.3	: Pencapaian Indikator Kinerja Utama Kepala DPPKBPPPA	39
Tabel 2.4	: Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023 Kabupaten Lima Puluh Kota	42
Tabel 2.5	: Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan Tahun	93
Tabel 3.1	: Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Lingkup Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	10 1
Tabel 3.2	: Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	10 5
Tabel 3.3	: Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Lingkup Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	10 7
Tabel 4.1	: Rencana Target Kinerja IKU DPPKBPPPA	11 4
Tabel 4.2	: Rencana Target Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Tahun 2023	11 5
Tabel 4.3	: Rencana Kebutuhan Pendanaan Berdasarkan Urusan, Jumlah Program dan Kegiatan Tahun 2023	11 9
Tabel 4.4	: Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2023	12 1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat program, kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD. Hal ini sebagaimana yang diamanatkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Penyusunan Renja tahun 2023 harus menjadi bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 – 2026, sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 – 2026, yang kemudian dijabarkan dalam Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Dalam melakukan penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBPPPA) Kabupaten Lima Puluh Kota melakukan koodinasi dengan Badan

Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan (Bapelitbang) Kabupaten Lima Puluh Kota dan pemangku kepentingan. Selanjutnya sesuai dengan pasal 16 ayat 2, proses penyusunan Renja melalui tahapan sebagai berikut: (i) persiapan penyusunan; (ii) penyusunan rancangan awal; (iii) penyusunan rancangan; (iv) pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah; (v) perumusan rancangan akhir dan (vi) penetapan. Seluruh tahapan ini dimulai pada bulan Desember 2021, dan akan selesai pada bulan Juli 2022.

Tahap persiapan penyusunan Renja meliputi: penyusunan rancangan keputusan Kepala Daerah tentang pembentukan tim penyusun Renja Perangkat Daerah, orientasi mengenai Renja Perangkat Daerah, penyusunan agenda kerja tim penyusun Renja Perangkat Daerah, penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah berdasarkan SIPD. Pembentukan Struktur Organisasi Tim Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2023, orientasi dan penyusunan agenda kerja tim difasilitasi oleh Bapelitbang Kabupaten Lima Puluh Kota.

Selanjutnya tahap penyusunan rancangan awal Renja Perangkat Daerah. Rancangan awal Renja DPPKBPPPA Tahun 2023 berpedoman pada Renstra DPPKBPPPA Tahun 2021-2026, hasil evaluasi Renja DPPKBPPPA Tahun 2021 (n-2) dan perkiraan capaian Tahun 2022 (n-1). Sesuai dengan pasal 126 penyusunan rancangan awal Renja Perangkat Daerah dilaksanakan paling lambat minggu pertama Bulan Desember. Sehingga untuk rancangan awal Renja DPPKBPPPA Tahun 2023, direncanakan selesai minggu pertama bulan Desember 2021. Penyusunan Renja ini berpedoman pada Renstra dengan tujuan untuk menjamin kesesuaian antara program, kegiatan, lokasi kegiatan, kelompok sasaran dan prakiraan maju yang disusun dalam rancangan awal Renja dengan Renstra Perangkat Daerah. Sedangkan evaluasi Renja tahun lalu dan tahun berjalan bertujuan untuk memastikan bahwa

rumusan kegiatan alternative dan atau kegiatan baru yang disusun dalam rancangan awal Renja dapat mengoptimalkan pencapaian sasaran Renja Perangkat Daerah. Sehingga rancangan awal Renja ini mencakup analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah dan hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu.

Tahap ketiga dalam penyusunan Renja DPPKBPPPA Tahun 2023 adalah tahap penyusunan rancangan. Penyusunan rancangan merupakan proses penyempurnaan rancangan awal Renja Perangkat Daerah. Rancangan Renja ini kemudian dibahas dan disempurnakan dalam forum perangkat Daerah/lintas perangkat Daerah. Rancangan Renja ini kemudian disampaikan ke Bapelitbang untuk diverifikasi oleh tim dan dijadikan sebagai bahan penyempurnaan rancangan awal RKPD menjadi rancangan RKPD. Rancangan Renja ini disampaikan ke Bapelitbang paling lambat minggu ketiga bulan Maret 2022.

Tahap berikutnya adalah pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah. Sesuai dengan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 pasal 136 ayat 1, dijelaskan bahwa Forum Perangkat Daerah dilaksanakan oleh masing-masing Perangkat Daerah berkoordinasi dengan Bapelitbang. Namun berdasarkan kesepakatan Bapelitbang dengan OPD untuk mencapai efisiensi dan efektifitas, maka Forum Perangkat Daerah belum dilaksanakan oleh seluruh Perangkat Daerah tetapi hanya 11 Perangkat Daerah sebagai pelaksana. Forum Perangkat Daerah/ Lintas Perangkat Daerah dihadiri oleh pemangku kepentingan yang terkait dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah. Tujuan dari pembahasan ini adalah untuk memperoleh masukan dalam rangka penajaman target kinerja sasaran, program dan kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran dalam Rancangan Renja Perangkat Daerah. Hasil pembahasan rancangan Renja Perangkat Daerah dalam Forum Perangkat Daerah/ Lintas Perangkat Daerah dirumuskan dalam berita acara kesepakatan dan ditandatangani oleh unsur yang mewakili

pemangku kepentingan yang menghadiri forum Gabungan Perangkat Daerah/ Lintas Perangkat Daerah.

Perumusan rancangan akhir merupakan tahap selanjutnya dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah. Rancangan akhir Renja merupakan proses penyempurnaan rancangan Renja Perangkat Daerah menjadi Rancangan akhir Renja Perangkat Daerah berdasarkan Perkada tentang RKPD. Perumusan Rancangan akhir Renja Perangkat Daerah dilakukan untuk mempertajam program, kegiatan dan pagu indikatif Perangkat Daerah berdasarkan program, kegiatan dan pagu indikatif yang ditetapkan dalam Perkada tentang RKPD. Sistematika penyajian rancangan akhir Renja sama dengan rancangan awal Renja.

Tahap akhir dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah adalah tahap penetapan. Rancangan akhir Renja DPPKBPPPA Tahun 2023 disampaikan ke Bapelitbang untuk diverifikasi oleh tim, paling lambat satu minggu setelah Perkada tentang RKPD ditetapkan. Setelah diverifikasi dan disempurnakan kembali oleh DPPKBPPPA, rancangan akhir Renja diserahkan kembali ke Bapelitbang untuk diajukan penetapannya paling lambat satu bulan setelah Perkada RKPD ditetapkan.

Setiap tahapan penyusunan Renja Perangkat Daerah ini, merupakan bagian yang tidak terlepas dari tahapan proses penyusunan RKPD Pemerintah Daerah. Rancangan awal Renja Perangkat Daerah merupakan bahan dalam penyusunan rancangan awal RKPD. Rancangan awal RKPD setelah penyempurnaan berdasarkan konsultasi publik merupakan penyempurnaan rancangan awal Renja Perangkat Daerah. Selanjutnya rancangan Renja Perangkat Daerah yang telah diverifikasi kesesuaian dan keselarasannya dengan rancangan awal RKPD, merupakan bahan penyempurnaan rancangan awal RKPD menjadi rancangan RKPD. Rancangan akhir RKPD dibahas bersama Kepala Perangkat Daerah untuk memastikan program dan kegiatan Perangkat Daerah telah diakomodir dalam rancangan akhir RKPD. Perumusan

rancangan akhir Renja diverifikasi keselarasannya dengan Perkada tentang RKPD oleh Bapelitbang, untuk selanjutnya ditetapkan melalui Peraturan Kepala Daerah.

RKPD Tahun 2023 merupakan kesinambungan upaya pembangunan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan daerah yang secara langsung atau tidak langsung akan berkontribusi untuk mencapai tujuan pembangunan nasional, dimana program-program yang telah ditetapkan akan disinkronkan dengan hasil Musrenbang Nagari, Kecamatan dan Kabupaten. Dengan demikian program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2023 diharapkan dapat memenuhi target RPJMD dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat.

Selanjutnya sebagai salah satu Perangkat Daerah dalam lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota, Renja DPPKBPPA merupakan penjabaran dari Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 36 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023.

1.2. Landasan Hukum

1. Undang Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286).
2. Undang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400).
3. Undang Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421).
4. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah);

5. Undang Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Undang Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 2025;
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2005-2025;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 15);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 – 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 Nomor 3);
19. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 140 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Lima Puluh Kota (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2011 Nomor 140);
20. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 55 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata

Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 57);

21. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 36 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2023 ini adalah :

1. Merupakan salah satu bahan yang digunakan untuk penyusunan Rancangan RKPD Kabupaten Lima Puluh Kota
2. Menjabarkan program dan kegiatan sebagaimana tercantum dalam RKPD 2023 sesuai dengan urusan dan kewenangan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
3. Menyediakan suatu acuan dan pedoman pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk tahun 2023.

Berkaitan dengan maksud di atas Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ini ditujukan untuk :

1. Memudahkan seluruh jajaran pimpinan dan staf Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam melaksanakan program dan kegiatan pada tahun 2023.
2. Menjadikan pedoman dalam pelaksanaan dan pengawasan program dan kegiatan sesuai dengan kewenangan dan tupoksi sekretariat dan bidang-bidang di Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

3. Menjadi salah satu acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada tahun 2023.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2023 ini terdiri dari beberapa BAB sebagai berikut :

- I. Pendahuluan, yang berisi penjelasan tentang latar belakang penyusunan Renja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, maksud, tujuan, sasaran, ruang lingkup, landasan penyusunan dan sistematika penulisan
- II. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun Lalu, yang berisi evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu dan capaian Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, analisis kinerja pelayan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan sebagainya.
- III. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah, yang memuat telaahan terhadap kebijakan nasional dan provinsi, tujuan dan sasaran Renja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan tahun 2023.
- IV. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah
- V. Penutup yang berisi ketentuan penutup

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBPPPA) Tahun Lalu dan Capaian Renstra DPPKBPPPA

Dalam Bab ini dimuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBPPPA) tahun 2020 (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun 2021 (tahun n-1), mengacu pada APBD Tahun 2021. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra DPPKBPPPA berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja DPPKBPPPA tahun-tahun sebelumnya.

Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tahun lalu, dan realisasi Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan/atau realisasi APBD untuk Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Pokok-pokok materi yang disajikan dalam bab ini, antara lain :

1. Realisasi program / kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil / keluaran yang direncanakan ;
2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;

3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.
4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; dan
6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tahun lalu, dan realisasi Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan/atau realisasi APBD untuk Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sampai tahun 2021 dapat dilihat pada Tabel. 2.1 berikut ini :

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Hasil Pelaksanaan Renja DPPKBPPPA dan Pencapaian Renstra DPPKBPPPA s/d 2022
Kabupaten Lima Puluh Kota

PD : Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Renstra Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s / d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan PD Tahun 2021			Target Program dan Kegiatan Renja SKPD Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun 2022	
					Target Renja PD Tahun 2021	Realisasi Renja PD Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+ 9)	11 = (10/4)
	WAJIB NON PELAYANAN DASAR									
	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana									
	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Tingkat pelayanan administrasi perkantoran								
	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat		48 bulan						
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah bulan kegiatan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik		48 bulan						

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Renstra Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s / d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan PD Tahun 2021			Target Program dan Kegiatan Renja SKPD Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun 2022	
					Target Renja PD Tahun 2021	Realisasi Renja PD Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan		48 bulan						
	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan		48 bulan						
	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan		48 bulan						
	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan		48 bulan						
	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan								
	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan		48 bulan						
	Penyediaan barang cetakan dan pengadaan	Jumlah bulan Penyediaan barang cetakan dan pengadaan		48 bulan						
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bulan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan		48 bulan						
	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman		48 bulan						
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke Luar daerah	Jumlah bulan pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke Luar daerah		48 bulan						
	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Tingkat ketersediaan sarana dan prasarana aparatur								

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Renstra Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s / d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan PD Tahun 2021			Target Program dan Kegiatan Renja SKPD Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun 2022	
					Target Renja PD Tahun 2021	Realisasi Renja PD Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasiona		48 bulan						
		PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN								
		Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD		16 dok						
		Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun		4 dok						
		PROGRAM PENGUATAN KELEMBAGAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN ANAK		100%						
		Fasilitasi pengembangan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan (P2TP2A)								
		Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak								

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Renstra Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s / d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan PD Tahun 2021			Target Program dan Kegiatan Renja SKPD Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun 2022	
					Target Renja PD Tahun 2021	Realisasi Renja PD Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		Pelatihan bagi pelatih (TOT) SDM Pelayanan dan Pendampingan Korban KDRT								
		Penyusunan sistem perlindungan bagi perempuan								
		Fasilitasi upaya perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan								
		PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA DAN KESETARAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN								
		Kegiatan pembinaan organisasi perempuan								
		Kegiatan pendidikan dan pelatihan peningkatan peran serta dan kesetaraan jender								
		Kegiatan penyuluhan bagi ibu rumah tangga dalam membangun keluarga sejahtera								

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Renstra Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s / d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan PD Tahun 2021			Target Program dan Kegiatan Renja SKPD Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun 2022	
					Target Renja PD Tahun 2021	Realisasi Renja PD Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	PROGRAM KELUARGA BERENCANA	Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)								
	Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi bagi Keluarga Miskin	Jumlah pelayanan MKJP								
	Pelayanan KIE/Tekhnik motivasi dan konseling program KB/KS	Jumlah lokasi penyuluhan advokasi dan promosi program KKBPK								
	Pembinaan Keluarga Berencana	Jumlah pertemuan KKBPK								
	Pengendalian dan Pendistribusian Alokasi	Jumlah fasilitas kesehatan yang mendapat distribusi alokasi								
	PROGRAM KESEHATAN REPRODUKSI REMAJA	Total Fertility Rate (TFR)								
	Advokasi dan KIE tentang Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR)	Jumlah lokasi pembinaan kesehatan reproduksi remaja								
	PROGRAM PEMBINAAN PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PELAYANAN KB/KR YANG MANDIRI	Persentase pembinaan kelompok penggerak program KKBPK								
	Fasilitasi pembentukan kelompok masyarakat peduli KB	Jumlah kegiatan Jambore IMP dan PKB/PLKB								
	Pengendalian Penduduk	Jumlah kegiatan sosialisasi dan rapat								

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Renstra Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s / d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan PD Tahun 2021			Target Program dan Kegiatan Renja SKPD Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun 2022	
					Target Renja PD Tahun 2021	Realisasi Renja PD Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		terkait pengendalian penduduk								
	PROGRAM PROMOSI KESEHATAN IBU, BAYI ANAK MELALUI KELOMPOK KEGIATAN DI MASYARAKAT	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana KIE di masyarakat								
	Penyuluhan kesehatan ibu, bayi dan anak melalui kelompok kegiatan di masyarakat	Jumlah kegiatan pengadaan sarana dan prasarana serta KIE								
	PROGRAM PENYIAPAN TENAGA PENDAMPING KELOMPOK BINA KELUARGA	Persentase keluarga aktif mengikuti kegiatan di kelompok kegiatan								
	Pelatihan tenaga pendamping kelompok bina keluarga di kecamatan	Jumlah lokasi pembinaan Tribina								
	PROGRAM PENGEMBANGAN MODEL OPERASIONAL BKB POSYANDU - PADU	Persentase kelompok BKB Holistik Integratif								
	Pengkajian pengembangan model operasional BKB- Posyandu-PADU	Jumlah pertemuan koordinasi BKB Holistik Integratif								

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Renstra Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s / d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan PD Tahun 2021			Target Program dan Kegiatan Renja SKPD Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun 2022		
					Target Renja PD Tahun 2021	Realisasi Renja PD Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
	Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak										
2	08	02	2	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	95,80 %				95,80%	
2	08	02	2.01	Pelebagaan Pengarutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase peningkatan pecepatan PUG melalui PPRG di Perangkat Daerah	80,75 %				80,75%	
2	08	02	2.02	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase organisasi perempuan yang berpartisipasi dibidang politik, hukum, sosial dan ekonomi	53%				53%	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Renstra Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s / d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan PD Tahun 2021			Target Program dan Kegiatan Renja SKPD Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun 2022	
					Target Renja PD Tahun 2021	Realisasi Renja PD Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
2 08 02 2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase perempuan yang mendapatkan pemberdayaan ekonomi	75%					75%		
2 08 03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Cakupan perempuan korban kekerasan yang mendapatkan pelayanan pada unit layanan terpadu	100%					100%		
2 08 03 2.01	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Rasio KDRT	0,0036					0,0036		
2 08 03 2.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Korban Kekerasan yang mendapatkan pelayanan	100%					100%		
2 08 03 2.03	Penguatan dan	Persentase lembaga layanan yang	100%					100%		

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Renstra Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s / d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan PD Tahun 2021			Target Program dan Kegiatan Renja SKPD Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun 2022		
					Target Renja PD Tahun 2021	Realisasi Renja PD Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
	Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	terlatih									
2	08	04		PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Persentase pemenuhan lima pilar indikator ketahanan keluarga	40%				40%	
2	08	04	2.01	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesenjangan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan Kesenjangan gender dan hak anak	0				0	
2	08	04	2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah	Persentase pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan KG dan hak anak	0				0	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Renstra Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s / d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan PD Tahun 2021			Target Program dan Kegiatan Renja SKPD Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun 2022		
					Target Renja PD Tahun 2021	Realisasi Renja PD Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
2	08	04	2.03	Kabupaten/Kota Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Presentase penyediaan layanan bagi keluarga dalam mewujudkan KG dan hak anak	0				0	
2	08	05		PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Persentase Informasi Layak Anak	100%				100%	
2	08	05	2.01	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah media informasi	3 media				3 media	
2	08	06		PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Tingkat Capaian Kabupaten Layak Anak	Nindya				Nindya	
2	08	06	2.01	Pelembagaan PHA pada	Persentase Kecamatan Layak Anak	80%				80%	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Renstra Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s / d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan PD Tahun 2021			Target Program dan Kegiatan Renja SKPD Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun 2022		
					Target Renja PD Tahun 2021	Realisasi Renja PD Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
	Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota										
2	08	06	2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Pembentukan Forum Anak Kecamatan	85%				85%	
2	08	07		PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Cakupan anak korban kekerasan yang mendapatkan pelayanan pada unit layanan terpadu	100%				100%	
2	08	07	2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penurunan kekerasan terhadap anak	0,068%				0,068%	
2	08	07	2.02	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang	Persentase penyediaan lembaga layanan	100%				100%	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Renstra Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s / d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan PD Tahun 2021			Target Program dan Kegiatan Renja SKPD Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun 2022	
					Target Renja PD Tahun 2021	Realisasi Renja PD Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
2	08	07	2.03	Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						
2	08	07	2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase lembaga layanan yang terlatih	100%		100%		
2	14	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pelaksanaan program penunjang urusan pemerintahan daerah	95%		95%		
2	14	01	2.01	Perencanaan, Penggangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase sinergisitas perencanaan dan evaluasi perangkat daerah	95%		95%		
2	14	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan administrasi keuangan perangkat daerah	95%		95%		

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Renstra Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s / d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan PD Tahun 2021			Target Program dan Kegiatan Renja SKPD Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun 2022	
					Target Renja PD Tahun 2021	Realisasi Renja PD Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
2 14 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan administrasi kepegawaian perangkat daerah	95%					95%		
2 14 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah	95%					95%		
2 14 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	50%					50%		
2 14 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	95%					95%		
2 14 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	95%					95%		
2 14 02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	1,25					1,25		
2 14 02 2.01	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam	Persentase kebijakan provinsi yang ditindaklanjuti dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk	100%					100%		

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Renstra Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s / d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan PD Tahun 2021			Target Program dan Kegiatan Renja SKPD Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun 2022	
					Target Renja PD Tahun 2021	Realisasi Renja PD Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
2	14	02	2.02	rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk						
2	14	02	2.02	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemetaan perkiraan pengendalian penduduk	0			0	
2	14	03		PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Persentase CPR (Contraceptive Prevalence Rate)	73,50%			73,50%	
2	14	03	2.01	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	Persentase promosi KKBPK terhadap keluarga dan kampung KB	60%			60%	
2	14	03	2.02	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Cakupan PKB yang didayagunakan	37,71%			37,71%	
2	14	03	2.03	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan	Persentase penggunaan kontrasepsi jangka panjang	26,30%			26,30%	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Renstra Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s / d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan PD Tahun 2021			Target Program dan Kegiatan Renja SKPD Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun 2022		
					Target Renja PD Tahun 2021	Realisasi Renja PD Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
2	1403	2.04	Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Masyarakat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Persentase organisasi masyarakat yang berperan di kampung KB	50%				50%	
2	1404		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Total Fertility Rate (TFR)	2,24					2,24	
2	1404	2.01	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Persentase keluarga aktif mengikuti kegiatan tribina	75%				75%	
2	1404	2.02	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Masyarakat	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Masyarakat	Persentase organisasi masyarakat yang berperan dalam pembangunan keluarga melalui pembinaan	100%				100%	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Renstra Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s / d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan PD Tahun 2021			Target Program dan Kegiatan Renja SKPD Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun 2022	
					Target Renja PD Tahun 2021	Realisasi Renja PD Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	ketahanan dan kesejahteraan keluarga								

1.1.1. Realisasi program / kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja / hasil keluaran yang direncanakan.

Pada Tahun Anggaran 2021 secara umum semua kegiatan dapat terlaksana, meskipun ada kegiatan yang mengalami perubahan dari Renja awal.

1.1.2. Realisasi Program/Kegiatan Yang Telah Memenuhi Target Kinerja Hasil/Keluaran Yang Direncanakan

Realisasi program dan kegiatan dapat dijelaskan sebagai berikut :

I. Program Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan

1. Kegiatan Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 48.120.900, dan realisasi keuangan sebesar Rp. 46.932.900 atau 97,53%.
2. Kegiatan Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 423.264.400, dan realisasi keuangan sebesar Rp. 419.684.850 atau 99,15%.
3. Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 27.684.600, dan realisasi keuangan sebesar Rp. 27.634.600 atau 99,82%.

II. Program Perlindungan Perempuan

1. Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 30.739.000 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 30.564.500 atau 99,43%.

2. Kegiatan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 117.213.000 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 27.708.000 atau 23,64%.
3. Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 36.361.900 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 35.625.000 atau 97,97%.

III. Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak

1. Kegiatan Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 35.812.000 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 35.785.000 atau 99,92%.

IV. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)

1. Kegiatan Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 35.812.000 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 35.785.000 atau 100%.
2. Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 19.705.000 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 18.655.000 atau 94,67%.

V. Program Perlindungan Khusus Anak

1. Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 49.470.000 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 46.878.500 atau 94,76%.
2. Kegiatan Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah

Kabupaten/Kota, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 121.432.000 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 31.784.500 atau 26,17%.

URUSAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

I. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 8.937.300 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 8.842.000 atau 99%.
2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 2.993.934.269 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 2.895.166.705 atau 96,70%.
3. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 93.132.500 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 91.704.200 atau 98,47%.
4. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 318.147.650 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 297.902.823 atau 93,64%.
5. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 318.147.650 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 297.902.823 atau 99,24%.

II. Program Pengendalian Penduduk

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 13.949.000 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 13.927.400 atau 99,85%.

III. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)

1. Kegiatan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya

Lokal, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 3.382.566.500 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 2.958.343.300 atau 87,46%.

2. Kegiatan Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB), dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.149.199.000 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 1.103.851.500 atau 96,05%.
3. Kegiatan Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.024.411.000 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 713.465.900 atau 69,65%.

IV. Program Pemeberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera

1. Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.215.482.200 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 824.730.400 atau 67,85%.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan.

Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

Capaian kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berhubungan dengan dasar pembentukan Dinas sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 55 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Pencapaian kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak disajikan dalam tabel analisis pencapaian kinerja sebagai berikut:

Tabel 2.2 (T-C.2)

Pencapaian Kinerja Pelayanan DPPKBPPA Kabupaten Lima Puluh Kota

No	IKK (IKD dalam RPJMD)	Target Renstra OPD				Realisasi Capaian	Proyeksi Tahun			Catatan Analisis
		Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	
1.	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	7,8%	8,19%	8,59%	9,01%	6,9%	8,19%	8,59%	9,01%	
2.	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPRD	7,8%	8,57%	8,57%	8,57%	5,71%	8,57%	8,57%	8,57%	
3.	Rasio KDRT	0,002	0,004	0,004	0,003	0,0036	0,004	0,004	0,003	
4.	Partisipasi angkatan kerja perempuan	42000	42000	45000	99750	83161	42000	45000	99750	
5.	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

No	IKK (IKD dalam RPJMD)	Target Renstra OPD				Realisasi Capaian	Proyeksi Tahun			Catatan Analisis
	terpadu									
6.	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu tatalaksana KtP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
7.	Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
8.	Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
9.	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
10.	Cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

No.	Kerangka dan RPJMD	Target Renstra OPD				Realisasi Capaian	Proyeksi Tahun			Catatan Analisis
		0,004	0,0036	0,0029	0,0029		0,0036	0,0029	0,0029	
11.	Rasio kelahiran (perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan))	0,004	0,0036	0,0029	0,0029	0,005	0,0036	0,0029	0,0029	
12.	Persentase ARG (Anggaran responsif Gender pada belanja langsung APBD)	4,6%	5,06%	5,06%	6,1%	2,8%	5,06%	5,06%	6,1%	
13.	Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I	4,0	3,9%	3,7%	3,6%	4,71	3,9%	3,7%	3,6%	
14.	Laju pertumbuhan penduduk (LPP)	1,27	1,25	1,20	1,1	1,27	1,25	1,20	1,1	
15.	Total Fertility Rate (TFR)	2,37	2,24	2,22	2,20	2,48	2,24	2,22	2,20	
16.	Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang berperan aktif dalam pembangunan Daerah melalui Kampung KB	45%	50%	55%	60%	45%	50%	55%	60%	
17.	Ratio Akseptor KB	1 : 6	1 : 6	1 : 6	1 : 5	1 : 1,4	1 : 6	1 : 6	1 : 5	

No.	Kategori Data	Target Renstra OPD				Realisasi Capaian	Proyeksi Tahun			Catatan Analisis
		2023	2024	2025	2026		2023	2024	2025	
18.	Angka perbandingan Rasio CPR bagi perempuan menikah usia 15 - 49	73,18%	73,5%	74,3%	74,6%	73,66%	73,5%	74,3%	74,6%	
19.	Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15-19) per 1.000 perempuan usia 15-19 tahun (ASFR 15-19)	23	23	23	22	21	23	23	22	
20.	Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang istrinya dibawah 20 tahun	0,7%	0,7%	0,6%	0,6%	0,63%	0,7%	0,6%	0,6%	
21.	Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need)	10,25%	10,1%	9,1%	8,63%	13,93	10,1%	9,1%	8,63%	
22.	Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	26,13%	26,3%	26,7%	27,1%	24,7%	26,3%	26,7%	27,1%	
23.	Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB	75%	75%	77%	80%	78,2%	75%	77%	80%	
24.	Cakupan anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB	75%	75%	77%	80%	70,5%	75%	77%	80%	

		Target Renstra OPD				Realisasi Capaian	Proyeksi Tahun			Catatan Analisis
		80%	80%	82%	83%		80%	82%	83%	
25.	Cakupan anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB	80%	80%	82%	83%	80,9%	80%	82%	83%	
26.	Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di setiap Kecamatan	2	2	5	6	13	2	5	6	
27.	Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan Perangkat Daerah KB untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di bidang pengendalian penduduk	75%	76%	76%	78%	75%	76%	76%	78%	
28.	Cakupan PUS peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB mandiri	60%	65%	65%	70%	65,2%	65%	65%	70%	
29.	Rasio petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) setiap desa/kelurahan	1 : 1,3	1 : 1,3	1 : 1,2	1 : 1,2	1 : 1	1 : 1,3	1 : 1,2	1 : 1,2	
30.	Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
31.	Persentase Faskes dan jejaringnya (diseluruh tingkatan wilayah) yang bekerjasama dengan BPJS dan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

No	IKK (IKD dalam RPJMD) memberikan pelayanan KBKR sesuai dengan standarisasi pelayanan	Target Renstra OPD				Realisasi Capaian	Proyeksi Tahun			Catatan Analisis
32.	Cakupan penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga di setiap desa	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
33.	Cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga	60%	60%	65%	65%	65,8%	60%	65%	65%	
34.	Cakupan keluarga yang mempunyai balitadan anak yang memahami dan melaksanakan pengasuhan dan pembinaan tumbuhkembang anak	60%	60%	65%	65%	65,2%	60%	65%	65%	
35.	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	73,18%	73,5%	74,3%	74,6%	73,66%	73,5%	74,3%	74,6%	

Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dapat disajikan pada Tabel 2.3 dibawah ini :

Tabel 2.3

Pencapaian Indikator Kinerja Utama Kepala DPPKBPPPA

NO	Sasaran	Indikator	Target Renstra DPPKBPPPA				Realisasi Tahun 2021	Proyeksi			Catatan Analisis
			Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024		Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.	Meningkatnya kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	95,77%	95,80	95,85%	95,90%	95,05 %	95,80%	95,85%	95,95%	
2.	Meningkatnya perlindungan perempuan dan anak	Rasio kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	0,004	0,0036	0,0029	0,0029		0,0036	0,0029	0,0029	
		Rasio kekerasan terhadap anak	0,004	0,0036	0,0029	0,0029		0,0036	0,0029	0,0029	
3.	Meningkatnya Pengendalian Laju Pertumbuhan Penduduk	Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	1,27	1,25	1,20	1,1	1,27	1,25	1,20	1,1	
4.	Meningkatnya kualitas dan kuantitas kinerja dan pelayanan perangkat daerah	Nilai AKIP	68	68	69	69	NA	68	69	69	
		Nilai IRB	16	16	16	17	NA	16	16	17	
		Nilai IKM	85	85	85	85	NA	85	85	85	

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Berdasarkan analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah, kajian hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah, serta kajian terhadap pencapaian kinerja Renstra Perangkat Daerah, maka

dirumuskan isu-isu penting yang terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Perumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dimaksudkan untuk menentukan permasalahan, hambatan atas pelaksanaan program dan kegiatan penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dirumuskan sebagai berikut :

1. Masih kurangnya peran masyarakat dalam pengembangan KB secara mandiri;
2. Masih kurangnya jumlah akseptor KB dan pendistribusian alat kontrasepsi gratis / murah kepada pasangan usia subur;
3. Masih kurangnya sosialisasi pengembangan program KB bagi keluarga miskin;
4. Belum optimalnya pembinaan dan pengembangan keluarga sejahtera
5. Masih lemahnya tingkat keberdayaan perempuan dan kesetaraan gender;
6. Belum optimalnya upaya perlindungan perempuan dan anak.

Tantangan dalam meningkatkan pelayanan perangkat daerah antara lain :

- a. Masih kurangnya pemahaman masyarakat tentang informasi kependudukan
- b. Masih adanya fenomena kesenjangan gender
- c. Masih tingginya tingkat kekerasan pada perempuan dan anak

Sedangkan peluang yang dimiliki antara lain :

- a. Dukungan penuh dari pimpinan pemerintah daerah dalam pelaksanaan tugas dan fungsi
- b. Sudah tersedianya regulasi di daerah dalam pelaksanaan program dan kegiatan
- c. Dukungan penuh dari kader KB dan organisasi perempuan dalam mendukung program dan kegiatan
- d. Adanya dukungan penuh dari stakeholder terkait dalam penyelesaian permasalahan perlindungan perempuan dan anak

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Salah satu tujuan dilakukannya review terhadap rancangan awal RKPD adalah untuk menghindari inkonsistensi substansi Renja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan berbagai rumusan yang sudah tertuang dalam rancangan awal RKPD, karena pada hakikatnya Renja Perangkat Daerah tersebut disusun untuk mendukung pencapaian target prioritas pembangunan serta target program dan kegiatan yang sudah dirumuskan dalam Rancangan Awal RKPD. Pada akhirnya Renja Perangkat Daerah juga akan mengalami penyempurnaan setelah Rancangan RKPD tersebut sudah ditetapkan menjadi RKPD dengan Peraturan Bupati.

Adapun hasil perbandingan antara Rancangan Awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan yang tertuang dalam renja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak terlihat bahwa ada pengurangan jumlah kegiatan. Pengurangan kegiatan dilakukan karena kegiatan tersebut belum menjadi prioritas perangkat daerah. Hasil telaahan terhadap Rancangan Awal RKPD dalam kaitannya dengan analisis kebutuhan Renja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak disajikan dalam Tabel 2.3 berikut.

Tabel 2.3

Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023
Kabupaten Lima Puluh Kota

PD Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan dana	Catatan penting
	Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan		Indeks Pembangunan Gender (IPG)	95,85%	1.282.049.470	Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan		Indeks Pembangunan Gender (IPG)	95,85%	850,432,400	
			Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	46,95%							
	Pelebagaan PUG pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kab/Kota		Persentase peningkatan percepatan PUG melalui PPRG di Perangkat Daerah	80,80%	242.372.370	Pelebagaan PUG pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kab/Kota		Persentase peningkatan percepatan PUG melalui PPRG di Perangkat Daerah	80,80%	281,446,400	
	Koordinasi dan sinkronisasi perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	DPPKBPPA	Jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi terkait pelaksanaan PUG Jumlah advokasi dan koordinasi, yang	15 Kali	79.540.670	Koordinasi dan sinkronisasi perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	DPPKBPPA	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pengarusutamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Dokumen	101.998.100	Mendukung IKU OPD

No	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan								
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan			Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan			Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan dana	Catatan penting
					dilaksanakan terhadap jumlah kebijakan yang disusun										
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	DPPKBPPA	Jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi terkait pelaksanaan PUG	6 kali	20.000.000								
			Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	DPPKBPPA	Jumlah sosialisasi terkait peran perempuan dibidang sosial, politik dan hukum serta PUG Jumlah workshop, bimtek, pelatihan, sosialisasi terkait peran perempuan dibidang sosial, politik dan hukum	43 Perangkat Daerah 5 kali	64.559.550			Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	DPPKBPPA	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota	43 Perangkat Daerah	138,057,800	Mendukung IKU OPD
			Sosialisasi kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	DPPKBPPA	Persentase anggaran yang responsif gender (ARG) pada belanja langsung	5,56%	78.272.150			Sosialisasi kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	DPPKBPPA	Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti	43 Perangkat Daerah	41,390,500	Mendukung IKU OPD

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan								
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan			Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan		Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan dana	Catatan penting
					APBD Kabupaten						Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota			
				Jumlah sosialisasi terhadap peran perencana (subbag Program) dalam PUG dan PPRG	2 kali									
			Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota		Persentase organisasi perempuan yang berpartisipasi dibidang politik, hukum, sosial dan ekonomi	64,0%	910.075.100		Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota		Persentase organisasi perempuan yang berpartisipasi dibidang politik, hukum, sosial dan ekonomi	64,0%	421,786,000	
			Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	DPPKBPP A	Jumlah kegiatan organisasi perempuan		910.075.100		Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	DPPKBPPA	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Dokumen	421,786,000	Mendukung IKU OPD
				Jumlah lomba-lomba dalam rangka pembinaan Organisasi Perempuan	9 keg									
				Jumlah peringatan hari besar	2 kegiatan									
				Jumlah rapat koordinasi	20 kali									
				Jumlah sosialisasi	3 kali									
				Jumlah seminar	10 kali									

No	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan								
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan			Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan			Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan dana	Catatan penting
			Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	DPPKBPPA	Jumlah kegiatan advokasi										
			Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota		Persentase perempuan yang mendapatkan pemberdayaan ekonomi	75,0%	129.602.000		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota		Persentase perempuan yang mendapatkan pemberdayaan ekonomi	75,0%	147,200,000		
			Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	DPPKBPPA	Jumlah kegiatan advokasi										
			Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	DPPKBPPA	Jumlah pelatihan peningkatan kapasitas sumber daya lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan										
			Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE)	DPPKBPPA	Jumlah lokasi pembinaan dan penyuluhan terhadap	13 Kecamatan 4 Kali	129.602.000		Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE)	DPPKBPPA	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	10 Dokumen	147,200,000		Mendukung IKU OPD

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan								
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan			Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan		Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan dana	Catatan penting
			Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota		perempuan dan kelompok perempuan Jumlah pelatihan peningkatan kapasitas perempuan				Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota		Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia			
	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN				Cakupan perempuan korban kekerasan yang mendapatkan pelayanan pada unit layanan terpadu	100,0%	641.971.110	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN			Cakupan perempuan korban kekerasan yang mendapatkan pelayanan pada unit layanan terpadu	100%	149,878,000	
		Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota			Rasio KDRT	0,0029	369.224.130		Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota		Rasio KDRT	0.0029	92,787,000	
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota		DPPKBPPA	diseminasi data kekerasan bagi lembaga P2TP2A, K3N , PUSPAGA, WCC Koordinasi kegiatan ke kecamatan sinkronisasi kegiatan ke provinsi sosialisasi peraturan perundangan	1 kali 45 kali 40 kali 1 kali 1 kali	235.010.600							

No	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan								
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan			Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan			Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan dana	Catatan penting
					sosialisasi TPPO										
			Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	DPPKBPPA	Advokasi ke K3N dan TPPO advokasi ke P2TP2A dan WCC Pendampingan layanan korban kekerasan dan TPPO	20 kali 45 kali 45 kali	134.213.530			Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	DPPKBPPA	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	43 Perangkat Daerah	92,787,000	Mendukung IKU OPD
			Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Kordinasi Kewenangan Kabupaten / Kota		Persentase Korban Kekerasan yang mendapatkan pelayanan	100,0%	-								
			Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	DPPKBPPA	Jumlah lokasi yang mendapat layanan pengaduan masyarakat										
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan	DPPKBPPA	Jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penyediaan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan										

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan							
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan		Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan dana	Catatan penting
		Kabupaten / Kota		korban kekerasan									
		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Persentase lembaga layanan yang terlatih	100%	272.746.980		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Persentase lembaga layanan yang terlatih	100 %	57,091,000	
		Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	DPPKBPPA	Jumlah kegiatan advokasi kebijakan dan pendampingan penyediaan sarana prasarana layanan bagi perempuan korban kekerasan									
		Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	DPPKBPPA	Pelatihan Peningkatan kapasitas SDM P2TP2A Pelatihan Peningkatan kapasitas SDM Puspaga Pelatihan Peningkatan Kapasitas SDM WCC Pelayanan aktif dalam rangka Edukasi		272.746.980		Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	DPPKBPPA	Jumlah sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	30 orang	57,091,000	Mendukung IKU OPD

No	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan								
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan			Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan			Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan dana	Catatan penting
					PUSPAGA										
			Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	DPPKBPPA	Jumlah paket kebutuhan spesifik bagi perempuan dalam situasi darurat dan kondisi khusus										
			Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	DPPKBPPA	Jumlah kordinasi dan sinkronisasi antar lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan										
	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA				Persentase pemenuhan lima pilar indikator ketahanan keluarga	50%	20.000.000	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA				Persentase pemenuhan lima pilar indikator ketahanan keluarga	50%	13,714,000	
			Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Persentase peningkatan kualitas keluarga dakam mewujudkan Kesetaraan gender dan hak anak	50%	20.000.000		Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Persentase peningkatan kualitas keluarga dakam mewujudkan Kesetaraan gender dan hak anak	50%	13,714,000		
			Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG	DPPKBPPA	Jumlah kegiatan advokasi kebijakan dan	4 kali	20.000.000								

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan							
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan dana	Catatan penting		
			dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota		pendampingan								
			Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	DPPKBPPA	Jumlah kegiatan KIE KG dan perlindungan anak								
			Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	DPPKBPPA	Jumlah kegiatan pengembangan masyarakat untuk peningkatan kualitas keluarga			Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	DPPKBPPA	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Laporan	13,714,000	Mendukung IKU OPD
			Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota		Persentase pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan KG dan hak anak								
			Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia	DPPKBPPA	Jumlah advokasi kebijakan dan pendampingan pengembangan								

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan									
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan			Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan			Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan dana	Catatan penting
			Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga										
			Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	DPPKBPPA	Jumlah pelatihan peningkatan kapasitas sumber daya lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga										
			Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	DPPKBPPA	Jumlah kordinasi dan sinkronisasi antar lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga										
			Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota		Presentase penyediaan layanan bagi keluarga dalam mewujudkan KG dan hak anak										
			Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya	DPPKBPPA	Jumlah penyediaan layanan komprehensif bagi keluarga daam mewujudkan KG										

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan								
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan			Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan		Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan dana	Catatan penting
			dalam Daerah Kabupaten/Kota		dan perlindungan anak									
	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK				Persentase Informasi Layak Anak	100%	387.444.750	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK			Persentase Informasi Layak Anak	100%	102.687,700	
		Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			Jumlah media informasi	3 buah	387.444.750		Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/kota		Jumlah media informasi	3 buah	102,687,700	
			Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	DPPKBPPA	Jumlah buku profil Pengumpulan data PHA dan Indikator KLA untuk penyusunan buku profil Rapat tim penyusun buku Sosialisasi buku profil dan disseminasi data profil	50 buah 17 dokumen 2 kali 1 kali	165.141.900		Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	DPPKBPPA	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia	2 Dokumen	45.490.000	Mendukung IKU OPD
			Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	DPPKBPPA	jumlah promosi dan edukasi melalui media luar ruang Jumlah promosi melalui media elektronik	15 buah 25 kali 10 media 2 kal	222.302.850		Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	DPPKBPPA	Jumlah Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di	1 Dokumen	57,197,700	Mendukung IKU OPD

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan									
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan			Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan			Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan dana	Catatan penting
					Jumlah promosi melalui media massa Publikasi buku profil anak						Kewenangan Kabupaten/Kota				
	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)				Tingkat Capaian Kabupaten Layak Anak	Nindya	792.573.650	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)				Tingkat Capaian Kabupaten Layak Anak	Nindya	97,312,500	
		Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota			Persentase Kecamatan Layak Anak	80,0%	238.492.100		Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota			Persentase Kecamatan Layak Anak	80,0%	97,312,500	
			Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	DPPKBPPA	Jumlah Keputusan Bupati Jumlah MOU Jumlah PERBUP	1 dokumen 1 Dokumen 1 dokumen	159.429.600			Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	DPPKBPPA	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	2 Organisasi	51,750,000	Mendukung IKU OPD
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak	DPPKBPPA	Jumlah Koordinasi jumlah rapat koordinasi	10 lembaga 2 buah 10 kali	79.062.500			Koordinasi dan Sinkronisasi Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak	DPPKBPPA	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelebagaan	5 Dokumen	45,562,500	Mendukung IKU OPD

No	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan							
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan			Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan		Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan dana	Catatan penting
			Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah sinkronisasi rapat gugus tugas KLA	4 kali				Kewenangan Kabupaten/Kota		Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota		
			Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota		Persentase Pembentukan Forum Anak Kecamatan	85,0%	554.081.550							
			Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	DPPKBPPA	jumlah kegiatan ajang kreatifitas jumlah kegiatan forum anak opearsional layanan puspaga Peningkatan SDM PUSPAGA	2 kali 3 kali 12 bulan 12 bulan	252.844.130							
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	DPPKBPPA	pendampingan Festival Inovasi Fantasi anak (FIFA) Pendampingan forum anak daerah, kecamatan dan nagari pendampingan forum anak nasional pendampingan forum anak	10 orang 4 kali 10 orang 10 kali	190.605.800							

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan									
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan			Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan			Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan dana	Catatan penting
					propinsi										
			Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	DPPKBPPA	Advokasi dan sosialisasi organisasi sahabat anak Advokasi dan sosialisasi pembentukan Media sahabat anak komunikasi informasi melalui banner, leaflet, booklet, baliho sosialisasi dan advokasi pembentukan Asosiasi perusahaan sahabat anak (APSAI) Sosialisasi dan advokasi pembentukan Pusat Informasi Sahabat Anak (PISA)PISA		110.631.620								
			Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah		Jumlah kordinasi dan sinkronisasi antar lembaga penyedia layanan peningkatan										

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan						
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan dana	Catatan penting	
		Kabupaten/Kota	kualitas hidup anak									
	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK		Cakupan anak korban kekerasan yang mendapatkan pelayanan pada unit layanan terpadu	100%	477.051.610	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK		Cakupan anak korban kekerasan yang mendapatkan pelayanan pada unit layanan terpadu	100 %	300,121,900		
	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota		Persentase penurunan kekerasan terhadap anak	0,067%	153.919.990	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota		Persentase penurunan kekerasan terhadap anak	0.067 %	106,317,300		
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	DPPKBPPA	JUmlah Keputusan Bupati JUmlah MOU JUmlah PERBUP JUmlah Sosialisasi	1 Dokumen 1 Dokumen 2 Kali	138.919.990	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	DPPKBPPA	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	43 Perangkat Daerah	58.843.300	Mendukung IKU OPD	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap	DPPKBPPA	Jumlah bulan pendampingan	12 bulan	15.000.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap	DPPKBPPA	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan	32 Dokumen	47,474,000	Mendukung IKU OPD	

No	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan								
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan			Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan			Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan dana	Catatan penting
			Anak Kewenangan Kabupaten / Kota						Anak Kewenangan Kabupaten / Kota		Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota				
			Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Persentase penyediaan lembaga layanan	100%	152.576.500		Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Persentase penyediaan lembaga layanan	100 %	140,066,000		
			Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	DPPKBPPA	Jumlah bulan pendampingan	12 bulan	10.000.000								
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	DPPKBPPA	Jumlah Koordinasi Ke Kecamatan Jumlah Pendampingan Kasus Jumlah Rapat Jumlah Sosialisasi Kegiatan Pencegahan Kekerasan Pada Anak Sinkronisasi Kegiatan Ke Propinsi	50 Kali 50 Kasus 2 Kali 2 Kali 45 Kali	142.576.500		Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	DPPKBPPA	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	90 Layanan	140,066,000		Mendukung IKU OPD

No	Rancangan Awal RKP					Hasil Analisis Kebutuhan									
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan			Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan			Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan dana	Catatan penting
			Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	DPPKBPPA	Jumlah pendampingan										
			Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	DPPKBPPA	Jumlah pendampingan										
			Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Persentase lembaga layanan yang terlatih	100%	170.555.120		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Persentase penyediaan lembaga layanan	100 %	53,738,600		
			Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	DPPKBPPA	Jumlah pendampingan										

No	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan								
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan			Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan			Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan dana	Catatan penting
			Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	DPPKBPPA	Jumlah pelatihan peningkatan kapasitas sumber daya lembaga penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus	1 kali	10.000.000								
			Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	DPPKBPPA	Advokasi Dunia Usaha Advokasi Media Jumlah Workshop MOU Dunia Usaha MOU Media	3 Kali 2 Kali 2 Kali 2 Dokumen 2 Dokumen	160.555.120			Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	DPPKBPPA	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	25 Dokumen	53,738,600	Mendukung IKU OPD
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH				Persentase pelaksanaan program penunjang urusan pemerintahan daerah	95%	5.595.040.403	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH				Persentase pelaksanaan program penunjang urusan pemerintah daerah	95%	3,351,940,223	
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat		Persentase sinergisitas perencanaan	95%	25.404.610			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat		Persentase sinergisitas perencanaan,	95%	23,092,500	

No	Rancangan Awal RKP						Hasil Analisis Kebutuhan						
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan		Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan dana	Catatan penting
		Daerah		dan evaluasi perangkat daerah				Daerah		penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah			
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	DPPKBPPA	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	2 dokumen	7.362.960		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	DPPKBPPA	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 dokumen	9.114.500	
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	DPPKBPPA	Jumlah dokumen RKA SKPD	1 dokumen	1.167.430		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	DPPKBPPA	Jumlah Dokumen RKASKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 dokumen	3,753,000	
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	DPPKBPPA	Jumlah dokumen perubahan RKA - SKPD	1 dokumen	1.150.930		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	DPPKBPPA	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2 dokumen	1,056,000	
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	DPPKBPPA	Jumlah dokumen DPA SKPD	1 dokumen	1.150.930		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	DPPKBPPA	Jumlah Dokumen DPASKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 dokumen	1,981,000	

No	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan								
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan			Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan			Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan dana	Catatan penting
			Koordinasi dan Penyusunan Perubahan Dokumen DPA-SKPD	DPPKBPPA	Jumlah dokumen perubahan DPA SKPD	1 dokumen	1.192.950			Koordinasi dan Penyusunan Perubahan Dokumen DPA-SKPD	DPPKBPPA	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2 dokumen	1,998,000	
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	DPPKBPPA	Jumlah dokumen capaian kinerja yang tersusun	5 dokumen	11.014.630			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	DPPKBPPA	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Laporan	5,190,000	
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	DPPKBPPA	Jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah	4 Dokumen	2.364.780								
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase pelaksanaan administrasi keuangan perangkat daerah	95%	3.709.328.993			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase pelaksanaan administrasi keuangan perangkat daerah	95%	2,743,308,723	

No	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan								
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan			Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan			Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan dana	Catatan penting
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	DPPKBPPA	Jumlah bulan penyediaan gaji dan tunjangan ASN	12 bulan	3.702.743.953			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	DPPKBPPA	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	30 Orang/bulan	2.736.782.723	
			Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	DPPKBPPA	Jumlah Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD										
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	DPPKBPPA	Jumlah dokumen laporan akhir tahun yang tersusun	1 dokumen	6.585.040			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	DPPKBPPA	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	6,526,000	
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	DPPKBPPA	Jumlah dokumen Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD										
			Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		Jumlah laporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran										
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase pelaksanaan	95%	90.750.000								

No	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan							
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan			Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan		Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan dana	Catatan penting
					administrasi kepegawaian perangkat daerah									
			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	DPPKBPPA	Jumlah pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	125 Stel	68.750.000							
			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	DPPKBPPA	Jumlah paket pendidikan dan pelatihan yang diikuti	1 paket	22.000.000							
			Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah	95%	258.935.930		Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah	95%	184,863,000	
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	DPPKBPPA	Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	12 bulan	2.750.000		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	DPPKBPPA	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	600.000	
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	DPPKBPPA	Jumlah bulan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan									

No	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan								
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan			Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan			Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan dana	Catatan penting
					Kantor										
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	DPPKBPPA	Jumlah bulan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga										
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	DPPKBPPA	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 bulan	33.106.480			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	DPPKBPPA	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	25,389,800	
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	DPPKBPPA	Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan	12 bulan	26.839.450			Fasilitasi Kunjungan Tamu	DPPKBPPA	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	24,482,200	
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan	DPPKBPPA	Jumlah bulan penyediaan bahan bacaan dan buku peraturan perundang undangan	12 bulan	3.088.800								
			Fasilitasi Kunjungan Tamu	DPPKBPPA	Jumlah porsi penyediaan makan dan minum tamu	350 porsi	9.625.000			Fasilitasi Kunjungan Tamu		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 laporan	5,425,000	

No	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan								
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan			Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan			Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan dana	Catatan penting
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	DPPKBPPA	Jumlah porsi penyediaan makan dan minum rapat Jumlah OH yang mengikuti koordinasi dan konsultasi SKPD	700 porsi 600 OH	183.526.200			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	DPPKBPPA	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 laporan	128,966,000	
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	50%	768.043.100			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	50%	63,350,000	
			Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	DPPKBPPA											
			Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	DPPKBPPA	Jumlah unit pengadaan kendaraan dinas/operasional	1 unit	574.278.100								
			Pengadaan Mebel	DPPKBPPA	Jumlah paket pengadaan mobiler	1 Paket	109.285.000			Pengadaan Mebel	DPPKBPPA	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	51 Unit	29.350.000	

No	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan								
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan			Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan			Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan dana	Catatan penting
			Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	DPPKBPPA	Jumlah paket pengadaan peralatan dan mesin lainnya	1 Paket	84.480.000			Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	DPPKBPPA	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit	34.000000	
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	95%	363.407.770			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	95%	164,580,000	
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	DPPKBPPA	Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat	12 bulan	3.884.100			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	DPPKBPPA	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	750.000	
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	DPPKBPPA	Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 bulan	56.319.670			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	DPPKBPPA	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	31,950,000	
			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	DPPKBPPA	Jumlah bulan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor										
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	DPPKBPPA	Jumlah bulan penyediaan jasa pelayanan umum kantor	12 bulan	303.204.000			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	DPPKBPPA	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	131,880,000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan						
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan dana	Catatan penting	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	95%	379.170.000		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	95%	172,746,000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	DPPKBPPA	Jumlah bulan pemeliharaan kendaraan dinas operasional atau lapangan	12 bulan	293.227.000		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	DPPKBPPA	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	89 unit	148.671.000	
	Pemeliharaan Mebel	DPPKBPPA	Jumlah bulan pemeliharaan mebel									
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	DPPKBPPA	Jumlah bulan pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	12 bulan	17.743.000		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	DPPKBPPA	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	50 unit	8,990,000	
	Pemeliharaan / rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	DPPKBPPA	Jumlah paket pemeliharaan / rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	1 paket	68.200.000		Pemeliharaan / rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	DPPKBPPA	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	16 unit	15,085,000	
	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK		Laju Pertumbuhan	1,2	339.528.000	PROGRAM PENGENDALIAN		Laju Pertumbuhan	1,2	272,821,600		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan						
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan dana	Catatan penting	
			Penduduk (LPP)			PENDUDUK			Penduduk (LPP)			
	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk		Persentase kebijakan provinsi yang ditindaklanjuti dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk	100%	204.528.000		Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota		Persentase kebijakan provinsi yang ditindaklanjuti dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk	100%	97,378,000	
	Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota terhadap Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (Program KKBPK)	DPPKBPPA	Jumlah kebijakan daerah dalam pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga melalui kelompok BKB, BKR, BKL dan PIK R Terintegrasi Jumlah penyerasian kebijakan daerah terhadap KKBPK	1 dok 1 kegiatan	45.155.000							
	Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan	DPPKBPPA	Jumlah dokumen GDPK yang tersusun	1 Dokumen	50.000.000		Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan	DPPKBPPA	Jumlah Dokumen Penyusunan dan Pemanfaatan	1 Dokumen	97,378,000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan									
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan			Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan		Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan dana	Catatan penting	
			Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota								Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota		Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota		
			Dukungan Pelaksanaan Survei/Pendataan Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan	DPPKBPPA	Jumlah lokasi pelaksanaan survey / pendataan indeks pembangunan berwawasan kependudukan										
			Pelaksanaan Survei/Pendataan Indeks Pengetahuan Masyarakat tentang Kependudukan	DPPKBPPA	Jumlah lokasi pelaksanaan survey / pendataan indeks pengetahuan masy tentang kependudukan										
			Penguatan Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal	DPPKBPPA	Jumlah lokasi kerjasama pelaksanaan pendidikan										
			Penguatan Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Nonformal	DPPKBPPA	Jumlah lokasi Penguatan Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan										

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan									
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan			Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan			Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan dana	Catatan penting
					Nonformal										
			Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota	DPPKBPPA	Jumlah Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal sesuai Isu Lokal										
			Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Nonformal sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota	DPPKBPPA	Jumlah Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Nonformal sesuai Isu Lokal										
			Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal	DPPKBPPA	Jumlah Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal										

No	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan								
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan			Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan			Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan dana	Catatan penting
			Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Nonformal	DPPKBPPA	Jumlah Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Nonformal										
			Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Informal di Kelompok Kegiatan Masyarakat Binaan	DPPKBPPA	Jumlah Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Informal di Kelompok Kegiatan Masyarakat Binaan										
			Advokasi Tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan	DPPKBPPA	Jumlah Advokasi Tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan										
			Sosialisasi Tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan	DPPKBPPA	Jumlah Sosialisasi Tentang Pemanfaatan										

No	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan								
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan			Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan			Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan dana	Catatan penting
			Beserta Model Solusi Strategis sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan Kepada Pemangku Kepentingan		Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan Kepada Pemangku Kepentingan										
			Pelaksanaan Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga	DPPKBPPA	Jumlah sarasehan hasil Pemutakhiran Basis Data Keluarga	1 kali	109.373.000								
			Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program KKBPK	DPPKBPPA	Jumlah Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program KKBPK										
			Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota		Persentase pemetaan perkiraan pengendalian penduduk		135.000.000			Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota		Persentase pemetaan perkiraan pengendalian penduduk	60 %	175,443,600	
			Perumusan Parameter Kependudukan	DPPKBPPA	Jumlah dokumen perumusan kependudukan										

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan						
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan dana	Catatan penting	
		Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan	DPPKBPPA	Jumlah dokumen data kependudukan								
		Penyusunan Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	DPPKBPPA	Jumlah dokumen Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga								
		Pemetaan Kependudukan	DPPKBPPA	Jumlah Pemetaan Kependudukan								
		Penyusunan Kajian Dampak Kependudukan	DPPKBPPA	Jumlah Penyusunan Kajian Dampak Kependudukan								
		Pengembangan Model Solusi Strategis Pengendalian Dampak Kependudukan	DPPKBPPA	Jumlah dokumen Pengembangan Model Solusi Strategis Pengendalian Dampak Kependudukan								
		Pengukuran dan Perhitungan Indikator Kerentanan Dampak Kependudukan (Early		Jumlah dokumen Pengukuran dan Perhitungan								

No	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan								
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan			Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan			Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan dana	Catatan penting
			Warning System/Peringatan Dini)		Indikator Kerentanan Dampak Kependudukan (Early Warning System/Peringatan Dini)										
			Membentuk Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program KKBPK di Sektor Lain	DPPKBPPA	Jumlah Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program KKBPK di Sektor Lain yang terbentuk										
			Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	DPPKBPPA	Jumlah lokasi Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga										
			Pemanfaatan Data Hasil Pemutakhiran Data Keluarga	DPPKBPPA	Jumlah dokumen Data Hasil Pemutakhiran Data Keluarga										
			Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	DPPKBPPA	Jumlah dokumen Penyediaan Data dan	1 dok	10.000.000				DPPKBPPA	Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang	30 Dokumen	50.032.000	

No	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan								
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan			Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan			Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan dana	Catatan penting
					Informasi Keluarga					Penyediaan Data dan Informasi Keluarga		Tersedianya			
			Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	DPPKBPPA	Jumlah dokumen Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	1 dok	125.000.000								
			Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	DPPKBPPA	Jumlah Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB					Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	DPPKBPPA	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	79 Dokumen	125,411,600	
			Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program KKBPK	DPPKBPPA	Jumlah lokasi Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program KKBPK										
	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)				Persentase CPR (Contraceptive Prevalence Rate)	74,30%	8.450.860.097	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)				Persentase CPR (Contraceptive Prevalence Rate)	74,30 %	2,989,928,480	
		Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal			Persentase promosi KKBPK terhadap keluarga dan kampung KB	62,30%	4.267.282.857		Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya			Persentase promosi KKBPK terhadap keluarga dan kampung KB	63 %	1,309,972,780	

No	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan								
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan			Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan			Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan dana	Catatan penting
								Lokal							
			Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	DPPKBPPA	Jumlah pertemuan advokasi/KIE kepada stakeholder	13 kali	75.685.280			Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	DPPKBPPA	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	12 organisasi	4.375.000	
			Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK Sesuai Kearifan Budaya Lokal	DPPKBPPA	Jumlah lokasi penyuluhan advokasi dan promosi program KKBPK	13 Kecamatan	737.151.250			Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK Sesuai Kearifan Budaya Lokal	DPPKBPPA	Jumlah Dokumen Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Sesuai Kearifan Budaya Lokal	13 Dokumen	25,000,000	
			Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program KKBPK	DPPKBPPA	Jumlah pembuatan pamflet, lembar balik KKBPK	13 paket	55.000.000								

No	Rancangan Awal RKPД						Hasil Analisis Kebutuhan								
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan			Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan			Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan dana	Catatan penting
			Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	DPPKBPPA	Jumlah promosi KKBPK di radio	4 kali	55.000.000			Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	DPPKBPPA	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	316 Dokumen	70,640,000	
			Penggunaan Media Massa Cetak, Elektronik dan Media Lainnya sesuai Kearifan Budaya Lokal Dalam Pencitraan Program KKBPK	DPPKBPPA	Jumlah media massa cetak Elektronik dan Media Lainnya sesuai Kearifan Budaya Lokal Dalam Pencitraan Program KKBPK										
			Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	DPPKBPPA	Jumlah Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	4 kali	200.000.000			Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	DPPKBPPA	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	105 Laporan	202.800.000	

No	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan								
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan			Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan			Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan dana	Catatan penting
											Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)				
			Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	DPPKBPPA	Jumlah pengadaan sarana dan pra sarana Balai Penyuluhan KKBPK	1 Kegiatan	2.737.002.180			Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	DPPKBPPA	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	13 Laporan	967,157,780	
			Pengendalian Program KKBPK	DPPKBPPA	Jumlah kegiatan pertemuan di kabupaten dan kecamatan	14 kali	407.444.147			Pengendalian Program KKBPK	DPPKBPPA	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK	246 Laporan	40,000,000	
			Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/ Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)		Cakupan PKB yang didayagunakan	37,71%	1.342.355.960			Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/ Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)		Cakupan PKB yang didayagunakan	37,71%	483,200,000	
			Pembinaan IMP dan Program KKBPK di Lini Lapangan oleh	DPPKBPPA	Jumlah lokasi Pembinaan IMP dan Program KKBPK di Lini Lapangan oleh										

No	Rancangan Awal RKPД						Hasil Analisis Kebutuhan								
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan			Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan			Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan dana	Catatan penting
			PKB/PLKB		PKB/PLKB										
			Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB	DPPKBPPA	Jumlah paket Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB										
			Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPК untuk Petugas Keluarga Berencana/ Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	DPPKBPPA	Jumlah pertemuan dalam rangka Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPК untuk Petugas Keluarga Berencana/ Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)										
			Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	DPPKBPPA	Jumlah bulan operasional kader PPKBN dan PPKBJ Jumlah pertemuan peningkatan kapasitas kader	12 bulan 12 kali	1.342.355.960			Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	DPPKBPPA	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	716 Orang	483.200,000	

No	Rancangan Awal RKP					Hasil Analisis Kebutuhan						
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan dana	Catatan penting	
	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi Serta Pelaksanaan Pelayanan KB Di Daerah Kabupaten/Kota		Persentase penggunaan kontrasepsi jangka panjang	26,7%	1.497.483.780		Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi Serta Pelaksanaan Pelayanan KB Di Daerah Kabupaten/Kota		Persentase penggunaan kontrasepsi jangka panjang	26.7 %	676,835,700	
	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	DPPKBPPA	Jumlah fasilitas kesehatan yang mendapat distribusi alokon	37 Faskes	84.283.080		Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	DPPKBPPA	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	37 Laporan	89.410.100	
	Peningkatan Kompetensi Pengelola dan Petugas Logistik Alat dan Obat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang Pelayanan KB	DPPKBPPA	jumlah pertemuan dan sosialisasi dengan bidan klinik dan PKB	2 kali	83.485.500							
	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	DPPKBPPA	Jumlah pelayanan KB MKJP	13 kecamatan	1.021.465.200		Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	DPPKBPPA	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang	11079 Orang 13 Kecamatan	534,834,200	

No	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan								
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan			Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan			Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan dana	Catatan penting
											(MKJP)				
			Penyediaan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP	DPPKBPPA	Jumlah Penyediaan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP										
			Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang	DPPKBPPA	Jumlah fasilitasi kesehatan yang mendapat distribusi	37 Faskes	100.000.000								
			Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	DPPKBPPA	Tersedianya sarana penunjang pelayanan KB	37 paket	20.000.000								
			Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KB	DPPKBPPA	Jumlah pembinaan bagi peserta KB	5 kali	14.250.000								
			Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya	DPPKBPPA	Jumlah sosialisasi KB dan kesehatan reproduksi di faskes	13 kali	100.000.000			Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya	DPPKBPPA	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan	13 Laporan	52.591.400	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan dana	Catatan penting
								Jejarangnya			
		Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan	DPPKBPPA	Jumlah lokasi Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan							
		Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	DPPKBPPA	Jumlah pelatihan Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi							
		Dukungan Operasional Pelayanan Bergerak KB	DPPKBPPA	Jumlah pelayanan KB bergerak dengan mobil pelayanan							
		Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan dan Pasca Keguguran	DPPKBPPA	Jumlah sosialisasi KB pasca persalinan							

No	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan								
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan			Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan			Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan dana	Catatan penting
			Peningkatan Kesertaan KB Pria	DPPKBPPA	Jumlah sosialisasi KB pria										
			Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Masyarakat Tingkat Daerah Kabupaten / Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB		Persentase organisasi masyarakat yang berperan di kampung KB	55%	1.343.737.500			Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Masyarakat Tingkat Daerah Kabupaten / Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB		Persentase organisasi masyarakat yang berperan di kampung KB	55%	519.920,000	
			Penguatan Peran serta Organisasi Masyarakat dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	DPPKBPPA	Jumlah pertemuan Organisasi Masyarakat dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB										
			Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	DPPKBPPA	Jumlah pertemuan dengan lintas sektor di Kampung KB	28 kali	98.857.500								
			Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	DPPKBPPA	Jumlah pertemuan dan sosialisasi KKBPK di Kampung KB	28 kali	1.244.880.000			Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	DPPKBPPA	Jumlah Kampung KB yang Mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana	27 Kampung	519.920,000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan									
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan			Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan			Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan dana	Catatan penting
											(Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Kampung KB				
			Pembinaan Terpadu Kampung KB	DPPKBPPA	Jumlah lokasi pembinaan terpadu kampung KB										
	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)				Total Fertility Rate (TFR)	2,22	2.567.635.900	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)				Total Fertilty Rate (TFR)	2,22 .	1,966,068,000	
		Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga			Persentase keluarga aktif mengikuti kegiatan tribina	77%	2.559.814.900		Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga			Persentase keluarga aktif mengikuti kegiatan tribina	77 %	1,966,068,000	
		Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan		DPPKBPPA	Jumlah lokasi Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit										

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan									
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan			Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan			Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan dana	Catatan penting
			Ekonomi Keluarga)		Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)										
			Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	DPPKBPPA	Jumlah paket Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)										
			Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	DPPKBPPA	Jumlah Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi										

No	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan								
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan			Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan			Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan dana	Catatan penting
					Keluarga/UPPKS)										
			Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	DPPKBPPA	Jumlah orientasi/pelatihan teknis pelaksana/kader BKB,BKR,BKL,PIK R dan UPPKAS	13 Kecamatan	127.352.500								
			Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	DPPKBPPA	Jumlah kecamatan yang disediakan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	13 Kecamatan	1.739.330.400			Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	DPPKBPPA	Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	39366 Orang	1.787.540.000	

No	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan							
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan			Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan		Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan dana	Catatan penting
									Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	DPPKBPPA	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	1200 Keluarga	178,528,000	
			Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	DPPKBPPA	Jumlah kecamatan yang disediakan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)									
			Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan	DPPKBPPA	Jumlah Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB,									

No	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan								
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan			Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan			Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan dana	Catatan penting
			Ekonomi Keluarga/UPPKS)		BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)										
			Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	DPPKBPPA	Jumlah promosi dan sosialisasi kelompok kegiatan Menjadi Orang Tua Hebat, Genre, Kelanjutusiaan dan Pengelolaan Keuangan keluarga	5 kegiatan	693.132.000								
			Penyerasian Kebijakan dalam Pelaksanaan Program yang Mendukung Tercapainya IPK	DPPKBPPA	Jumlah pertemuan Koordinasi BKB Holistik Integratif										
			Penyediaan dan Pengembangan Materi IPK	DPPKBPPA	Jumlah dokumen pengembangan materi IPK										

No	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan								
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan			Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan			Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan dana	Catatan penting
			Advokasi dan Promosi IPK	DPPKBPPA	Jumlah Advokasi dan Promosi IPK										
			Sosialisasi IPK	DPPKBPPA	Jumlah Sosialisasi IPK										
			Pelaksanaan Koordinasi Evaluasi Pencapaian IPK	DPPKBPPA	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi Evaluasi Pencapaian IPK										
			Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga		Persentase organisasi kemasyarakatan yang berperan dalam pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga	100%	7.821.000								
			Penguatan Kebijakan Daerah dalam Rangka Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	DPPKBPPA	Jumlah kebijakan daerah dalam pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga melalui kelompok BKB, BKR, BKL dan PIK R Terintegrasi		7.821.000								

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan									
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan			Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan			Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan dana	Catatan penting
			(BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)												
			Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	DPPKBPPA	Jumlah mitra kerja dan organisasi kemasyarakatan dalam penggerakan operasional pembinaan program ketahanan dan kesejahteraan keluarga										
			Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	DPPKBPPA	Jumlah pelatihan peningkatan kapasitas mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga										
			Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan	DPPKBPPA	Jumlah dan Sosialisasi Program										

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan									
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan			Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan			Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan dana	Catatan penting
			Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja		Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja										
						20.554.154.990							10,094,904,803		

Dari Tabel diatas dapat dijelaskan bahwa berdasarkan analisis kebutuhan rancangan awal Rencana Kerja DPPKBPPPA, maka ada tambahan 2 sub kegiatan dalam rangka sinergisitas dengan 10 program pokok PKK dan dalam rangka mengakomodir program provinsi.

Sub Kegiatan tersebut adalah Penyusunan dan pemanfaatan Grand Design Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten / Kota dan Sub Kegiatan Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas.

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam menyusun Renja Perangkat Daerah, salah satu tahapan proses yang tidak boleh diabaikan adalah menampung usulan program dan kegiatan yang berasal dari bawah atau aspirasi masyarakat. Hal ini sangat penting dilaksanakan karena pada hakekatnya masyarakatlah yang akan menjadi penerima manfaat dari program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah.

Sebagai salah satu Perangkat Daerah dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berupaya semaksimal mungkin untuk menampung aspirasi masyarakat dengan berbagai cara dan dalam berbagai kesempatan, termasuk salah satunya melalui masukan dari hasil pelaksanaan Musrenbang, baik di tingkat nagari, kecamatan maupun di tingkat kabupaten. Renja DPPKBPPPA Tahun 2023 juga mengakomodir Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) Anggota DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota.

Aspirasi masyarakat akan menjadi perhatian serius DPPKBPPPA dalam pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2023. Suatu langkah penting yang harus diambil adalah kembali menata dan menyusun berbagai peraturan yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan sehingga program dan kegiatan DPPKBPPPA dapat dijalankan dengan tertib,

terarah, efektif dan efisien. Secara umum program dan kegiatan yang dituangkan dalam Rencana Kerja Perubahan DPPKBPPA Tahun 2023 ini sudah menampung dan mengakomodir hasil usulan pemangku kepentingan/masyarakat.

Tabel 2.4
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan
Tahun 2023

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
I	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan				
I.I	Kegiatan Pelembagaan PUG pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kab/Kota				
I.I.I	Sub Kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	DPPKBPP A	Jumlah Perangkat Daerah yang mendapat advokasi kebijakan dan pendampingan pelaksanaan PUG termasuk perencanaan pembangunan responsif gender (PPRG) kewenangan Kabupaten / Kota	43 PD	Reses Musrenbang
I.II	Kegiatan Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi				

	Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota				
I.II.I	Sub Kegiatan Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	DPPKBPP A	Jumlah dokumen hasil sosialisasi peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, Sosial dan ekonomi kewenangan kabupaten / kota	10 dok	Reses Musrenban g

1.1.1. Realisasi program / kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja / hasil keluaran yang direncanakan.

Pada Tahun Anggaran 2021 secara umum semua kegiatan dapat terlaksana, meskipun ada kegiatan yang mengalami perubahan dari Renja awal.

1.1.2. Realisasi Program/Kegiatan Yang Telah Memenuhi Target Kinerja Hasil/Keluaran Yang Direncanakan

Realisasi program dan kegiatan dapat dijelaskan sebagai berikut :

I. Program Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan

1. Kegiatan Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 48.120.900, dan realisasi keuangan sebesar Rp. 46.932.900 atau 97,53%.
2. Kegiatan Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 423.264.400, dan realisasi keuangan sebesar Rp. 419.684.850 atau 99,15%.
3. Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 27.684.600, dan realisasi keuangan sebesar Rp. 27.634.600 atau 99,82%.

II. Program Perlindungan Perempuan

1. Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 30.739.000 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 30.564.500 atau 99,43%.
2. Kegiatan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan

Kabupaten/Kota, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 117.213.000 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 27.708.000 atau 23,64%.

3. Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 36.361.900 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 35.625.000 atau 97,97%.

III. Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak

1. Kegiatan Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 35.812.000 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 35.785.000 atau 99,92%.

IV. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)

1. Kegiatan Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 35.812.000 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 35.785.000 atau 100%.
2. Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 19.705.000 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 18.655.000 atau 94,67%.

V. Program Perlindungan Khusus Anak

1. Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 49.470.000 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 46.878.500 atau 94,76%.
2. Kegiatan Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 121.432.000 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 31.784.500 atau 26,17%.

URUSAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

I. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 8.937.300 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 8.842.000 atau 99%.
2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 2.993.934.269 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 2.895.166.705 atau 96,70%.
3. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 93.132.500 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 91.704.200 atau 98,47%.
4. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 318.147.650 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 297.902.823 atau 93,64%.
5. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 318.147.650 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 297.902.823 atau 99,24%.

II. Program Pengendalian Penduduk

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 13.949.000 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 13.927.400 atau 99,85%.

III. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)

1. Kegiatan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 3.382.566.500 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 2.958.343.300 atau 87,46%.

2. Kegiatan Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB), dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.149.199.000 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 1.103.851.500 atau 96,05%.
3. Kegiatan Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.024.411.000 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 713.465.900 atau 69,65%.

IV. Program Pemeberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera

1. Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.215.482.200 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 824.730.400 atau 67,85%.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan.

Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

Capaian kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berhubungan dengan dasar pembentukan Dinas sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 55 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Pencapaian kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak disajikan dalam tabel analisis pencapaian kinerja sebagai berikut:

Tabel 2.2 (T-C.2)

Pencapaian Kinerja Pelayanan DPPKBPPA Kabupaten Lima Puluh Kota

No	IKK (IKD dalam RPJMD)	Target Renstra OPD				Realisasi Capaian	Proyeksi Tahun			Catatan Analisis
		Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	
1.	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	7,8%	8,19%	8,59%	9,01%	6,9%	8,19%	8,59%	9,01%	
2.	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPRD	7,8%	8,57%	8,57%	8,57%	5,71%	8,57%	8,57%	8,57%	
3.	Rasio KDRT	0,002	0,004	0,004	0,003	0,0036	0,004	0,004	0,003	
4.	Partisipasi angkatan kerja perempuan	42000	42000	45000	99750	83161	42000	45000	99750	
5.	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

No	IKK (IKD dalam RPJMD)	Target Renstra OPD				Realisasi Capaian	Proyeksi Tahun			Catatan Analisis
	terpadu									
6.	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu tatalaksana KtP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
7.	Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
8.	Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
9.	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
10.	Cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

No.	Kerangka dan RPJMD	Target Renstra OPD				Realisasi Capaian	Proyeksi Tahun			Catatan Analisis
		0,004	0,0036	0,0029	0,0029		0,0036	0,0029	0,0029	
11.	Rasio kelahiran dan perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	0,004	0,0036	0,0029	0,0029	0,005	0,0036	0,0029	0,0029	
12.	Persentase ARG (Anggaran responsif Gender pada belanja langsung APBD)	4,6%	5,06%	5,06%	6,1%	2,8%	5,06%	5,06%	6,1%	
13.	Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I	4,0	3,9%	3,7%	3,6%	4,71	3,9%	3,7%	3,6%	
14.	Laju pertumbuhan penduduk (LPP)	1,27	1,25	1,20	1,1	1,27	1,25	1,20	1,1	
15.	Total Fertility Rate (TFR)	2,37	2,24	2,22	2,20	2,48	2,24	2,22	2,20	
16.	Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang berperan aktif dalam pembangunan Daerah melalui Kampung KB	45%	50%	55%	60%	45%	50%	55%	60%	
17.	Ratio Akseptor KB	1 : 6	1 : 6	1 : 6	1 : 5	1 : 1,4	1 : 6	1 : 6	1 : 5	

No.	Indikator	Target Renstra OPD				Realisasi Capaian	Proyeksi Tahun			Catatan Analisis
		2023	2024	2025	2026		2023	2024	2025	
18.	Angka perkapita data demografi (CPR) bagi perempuan menikah usia 15 - 49	73,18%	73,5%	74,3%	74,6%	73,66%	73,5%	74,3%	74,6%	
19.	Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15-19) per 1.000 perempuan usia 15-19 tahun (ASFR 15-19)	23	23	23	22	21	23	23	22	
20.	Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang istrinya dibawah 20 tahun	0,7%	0,7%	0,6%	0,6%	0,63%	0,7%	0,6%	0,6%	
21.	Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need)	10,25%	10,1%	9,1%	8,63%	13,93	10,1%	9,1%	8,63%	
22.	Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	26,13%	26,3%	26,7%	27,1%	24,7%	26,3%	26,7%	27,1%	
23.	Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB	75%	75%	77%	80%	78,2%	75%	77%	80%	
24.	Cakupan anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB	75%	75%	77%	80%	70,5%	75%	77%	80%	

		Target Renstra OPD				Realisasi Capaian	Proyeksi Tahun			Catatan Analisis
		80%	80%	82%	83%		80%	82%	83%	
25.	Cakupan anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB	80%	80%	82%	83%	80,9%	80%	82%	83%	
26.	Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di setiap Kecamatan	2	2	5	6	13	2	5	6	
27.	Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan Perangkat Daerah KB untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di bidang pengendalian penduduk	75%	76%	76%	78%	75%	76%	76%	78%	
28.	Cakupan PUS peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB mandiri	60%	65%	65%	70%	65,2%	65%	65%	70%	
29.	Rasio petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) setiap desa/kelurahan	1 : 1,3	1 : 1,3	1 : 1,2	1 : 1,2	1 : 1	1 : 1,3	1 : 1,2	1 : 1,2	
30.	Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
31.	Persentase Faskes dan jejaringnya (diseluruh tingkatan wilayah) yang bekerjasama dengan BPJS dan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

No	IKK (IKD dalam RPJMD) memberikan pelayanan KBKR sesuai dengan standarisasi pelayanan	Target Renstra OPD				Realisasi Capaian	Proyeksi Tahun			Catatan Analisis
32.	Cakupan penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga di setiap desa	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
33.	Cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga	60%	60%	65%	65%	65,8%	60%	65%	65%	
34.	Cakupan keluarga yang mempunyai balitadan anak yang memahami dan melaksanakan pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak	60%	60%	65%	65%	65,2%	60%	65%	65%	
35.	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	73,18%	73,5%	74,3%	74,6%	73,66%	73,5%	74,3%	74,6%	

Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dapat disajikan pada Tabel 2.3 dibawah ini :

Tabel 2.3

Pencapaian Indikator Kinerja Utama Kepala DPPKBPPPA

NO	Sasaran	Indikator	Target Renstra DPPKBPPPA				Realisasi Tahun 2021	Proyeksi			Catatan Analisis
			Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024		Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.	Meningkatnya kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	95,77%	95,80	95,85%	95,90%	95,05 %	95,80%	95,85%	95,95%	
2.	Meningkatnya perlindungan perempuan dan anak	Rasio kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	0,004	0,0036	0,0029	0,0029		0,0036	0,0029	0,0029	
		Rasio kekerasan terhadap anak	0,004	0,0036	0,0029	0,0029		0,0036	0,0029	0,0029	
3.	Meningkatnya Pengendalian Laju Pertumbuhan Penduduk	Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	1,27	1,25	1,20	1,1	1,27	1,25	1,20	1,1	
4.	Meningkatnya kualitas dan kuantitas kinerja dan pelayanan perangkat daerah	Nilai AKIP	68	68	69	69	NA	68	69	69	
		Nilai IRB	16	16	16	17	NA	16	16	17	
		Nilai IKM	85	85	85	85	NA	85	85	85	

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Berdasarkan analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah, kajian hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah, serta kajian terhadap pencapaian kinerja Renstra Perangkat Daerah, maka

dirumuskan isu-isu penting yang terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Perumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dimaksudkan untuk menentukan permasalahan, hambatan atas pelaksanaan program dan kegiatan penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dirumuskan sebagai berikut :

1. Masih kurangnya peran masyarakat dalam pengembangan KB secara mandiri;
2. Masih kurangnya jumlah akseptor KB dan pendistribusian alat kontrasepsi gratis / murah kepada pasangan usia subur;
3. Masih kurangnya sosialisasi pengembangan program KB bagi keluarga miskin;
4. Belum optimalnya pembinaan dan pengembangan keluarga sejahtera
5. Masih lemahnya tingkat keberdayaan perempuan dan kesetaraan gender;
6. Belum optimalnya upaya perlindungan perempuan dan anak.

Tantangan dalam meningkatkan pelayanan perangkat daerah antara lain :

- a. Masih kurangnya pemahaman masyarakat tentang informasi kependudukan
- b. Masih adanya fenomena kesenjangan gender
- c. Masih tingginya tingkat kekerasan pada perempuan dan anak

Sedangkan peluang yang dimiliki antara lain :

- a. Dukungan penuh dari pimpinan pemerintah daerah dalam pelaksanaan tugas dan fungsi
- b. Sudah tersedianya regulasi di daerah dalam pelaksanaan program dan kegiatan
- c. Dukungan penuh dari kader KB dan organisasi perempuan dalam mendukung program dan kegiatan
- d. Adanya dukungan penuh dari stakeholder terkait dalam penyelesaian permasalahan perlindungan perempuan dan anak

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Salah satu tujuan dilakukannya review terhadap rancangan awal RKPD adalah untuk menghindari inkonsistensi substansi Renja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan berbagai rumusan yang sudah tertuang dalam rancangan awal RKPD, karena pada hakikatnya Renja Perangkat Daerah tersebut disusun untuk mendukung pencapaian target prioritas pembangunan serta target program dan kegiatan yang sudah dirumuskan dalam Rancangan Awal RKPD. Pada akhirnya Renja Perangkat Daerah juga akan mengalami penyempurnaan setelah Rancangan RKPD tersebut sudah ditetapkan menjadi RKPD dengan Peraturan Bupati.

Adapun hasil perbandingan antara Rancangan Awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan yang tertuang dalam renja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak terlihat bahwa ada pengurangan jumlah kegiatan. Pengurangan kegiatan dilakukan karena kegiatan tersebut belum menjadi prioritas perangkat daerah. Hasil telaahan terhadap Rancangan Awal RKPD dalam kaitannya dengan analisis kebutuhan Renja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak disajikan dalam Tabel 2.4 berikut.

Tabel 2.3

Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023
Kabupaten Lima Puluh Kota

PD Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan dana	Catatan penting
	Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan		Indeks Pembangunan Gender (IPG)	95,85%	1.282.049.470	Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan		Indeks Pembangunan Gender (IPG)	95,85%	850,432,400	
			Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	46,95%							
	Pelebagaan PUG pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kab/Kota		Persentase peningkatan percepatan PUG melalui PPRG di Perangkat Daerah	80,80%	242.372.370	Pelebagaan PUG pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kab/Kota		Persentase peningkatan percepatan PUG melalui PPRG di Perangkat Daerah	80,80%	281,446,400	
	Koordinasi dan sinkronisasi perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	DPPKBPPA	Jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi terkait pelaksanaan PUG Jumlah advokasi dan koordinasi, yang	15 Kali	79.540.670	Koordinasi dan sinkronisasi perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	DPPKBPPA	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pengarusutamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Dokumen	101.998.100	Mendukung IKU OPD

No	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan								
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan			Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan			Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan dana	Catatan penting
					dilaksanakan terhadap jumlah kebijakan yang disusun										
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	DPPKBPPA	Jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi terkait pelaksanaan PUG	6 kali	20.000.000								
			Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	DPPKBPPA	Jumlah sosialisasi terkait peran perempuan dibidang sosial, politik dan hukum serta PUG Jumlah workshop, bimtek, pelatihan, sosialisasi terkait peran perempuan dibidang sosial, politik dan hukum	43 Perangkat Daerah 5 kali	64.559.550			Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	DPPKBPPA	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota	43 Perangkat Daerah	138,057,800	Mendukung IKU OPD
			Sosialisasi kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	DPPKBPPA	Persentase anggaran yang responsif gender (ARG) pada belanja langsung	5,56%	78.272.150			Sosialisasi kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	DPPKBPPA	Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti	43 Perangkat Daerah	41,390,500	Mendukung IKU OPD

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan								
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan			Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan		Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan dana	Catatan penting
					APBD Kabupaten						Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota			
				Jumlah sosialisasi terhadap peran perencana (subag Program) dalam PUG dan PPRG	2 kali									
			Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota		Persentase organisasi perempuan yang berpartisipasi dibidang politik, hukum, sosial dan ekonomi	64,0%	910.075.100		Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota		Persentase organisasi perempuan yang berpartisipasi dibidang politik, hukum, sosial dan ekonomi	64,0%	421,786,000	
			Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	DPPKBPP A	Jumlah kegiatan organisasi perempuan		910.075.100		Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	DPPKBPPA	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Dokumen	421,786,000	Mendukung IKU OPD
				Jumlah lomba-lomba dalam rangka pembinaan Organisasi Perempuan	9 keg									
				Jumlah peringatan hari besar	2 kegiatan									
				Jumlah rapat koordinasi	20 kali									
				Jumlah sosialisasi	3 kali									
				Jumlah seminar	10 kali									

No	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan								
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan			Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan			Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan dana	Catatan penting
			Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	DPPKBPPA	Jumlah kegiatan advokasi										
			Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota		Persentase perempuan yang mendapatkan pemberdayaan ekonomi	75,0%	129.602.000		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota		Persentase perempuan yang mendapatkan pemberdayaan ekonomi	75,0%	147,200,000		
			Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	DPPKBPPA	Jumlah kegiatan advokasi										
			Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	DPPKBPPA	Jumlah pelatihan peningkatan kapasitas sumber daya lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan										
			Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE)	DPPKBPPA	Jumlah lokasi pembinaan dan penyuluhan terhadap	13 Kecamatan 4 Kali	129.602.000		Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE)	DPPKBPPA	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	10 Dokumen	147,200,000		Mendukung IKU OPD

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan								
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan			Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan		Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan dana	Catatan penting
			Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota		perempuan dan kelompok perempuan Jumlah pelatihan peningkatan kapasitas perempuan				Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota		Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia			
	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN				Cakupan perempuan korban kekerasan yang mendapatkan pelayanan pada unit layanan terpadu	100,0%	641.971.110	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN			Cakupan perempuan korban kekerasan yang mendapatkan pelayanan pada unit layanan terpadu	100%	149,878,000	
		Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota			Rasio KDRT	0,0029	369.224.130		Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota		Rasio KDRT	0.0029	92,787,000	
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota		DPPKBPPA	diseminasi data kekerasan bagi lembaga P2TP2A, K3N , PUSPAGA, WCC Koordinasi kegiatan ke kecamatan sinkronisasi kegiatan ke provinsi sosialisasi peraturan perundangan	1 kali 45 kali 40 kali 1 kali 1 kali	235.010.600							

No	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan								
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan			Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan			Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan dana	Catatan penting
					sosialisasi TPPO										
			Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	DPPKBPPA	Advokasi ke K3N dan TPPO advokasi ke P2TP2A dan WCC Pendampingan layanan korban kekerasan dan TPPO	20 kali 45 kali 45 kali	134.213.530			Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	DPPKBPPA	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	43 Perangkat Daerah	92,787,000	Mendukung IKU OPD
			Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Kordinasi Kewenangan Kabupaten / Kota		Persentase Korban Kekerasan yang mendapatkan pelayanan	100,0%	-								
			Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	DPPKBPPA	Jumlah lokasi yang mendapat layanan pengaduan masyarakat										
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan	DPPKBPPA	Jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penyediaan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan										

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan						
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan dana	Catatan penting	
		Kabupaten / Kota	korban kekerasan									
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Persentase lembaga layanan yang terlatih	100%	272.746.980	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Persentase lembaga layanan yang terlatih	100 %	57,091,000		
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	DPPKBPPA	Jumlah kegiatan advokasi kebijakan dan pendampingan penyediaan sarana prasarana layanan bagi perempuan korban kekerasan									
	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	DPPKBPPA	Pelatihan Peningkatan kapasitas SDM P2TP2A Pelatihan Peningkatan kapasitas SDM Puspaga Pelatihan Peningkatan Kapasitas SDM WCC Pelayanan aktif dalam rangka Edukasi		272.746.980	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	DPPKBPPA	Jumlah sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	30 orang	57,091,000	Mendukung IKU OPD	

No	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan								
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan			Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan			Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan dana	Catatan penting
					PUSPAGA										
			Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	DPPKBPPA	Jumlah paket kebutuhan spesifik bagi perempuan dalam situasi darurat dan kondisi khusus										
			Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	DPPKBPPA	Jumlah kordinasi dan sinkronisasi antar lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan										
	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA				Persentase pemenuhan lima pilar indikator ketahanan keluarga	50%	20.000.000	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA				Persentase pemenuhan lima pilar indikator ketahanan keluarga	50%	13,714,000	
			Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Persentase peningkatan kualitas keluarga dakam mewujudkan Kesetaraan gender dan hak anak	50%	20.000.000		Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Persentase peningkatan kualitas keluarga dakam mewujudkan Kesetaraan gender dan hak anak	50%	13,714,000		
			Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG	DPPKBPPA	Jumlah kegiatan advokasi kebijakan dan	4 kali	20.000.000								

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan								
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan			Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan		Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan dana	Catatan penting
			dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota		pendampingan									
			Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	DPPKBPPA	Jumlah kegiatan KIE KG dan perlindungan anak									
			Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	DPPKBPPA	Jumlah kegiatan pengembangan masyarakat untuk peningkatan kualitas keluarga				Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	DPPKBPPA	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Laporan	13,714,000	Mendukung IKU OPD
			Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota		Persentase pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan KG dan hak anak									
			Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia	DPPKBPPA	Jumlah advokasi kebijakan dan pendampingan pengembangan									

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan									
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan			Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan			Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan dana	Catatan penting
			Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga										
			Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	DPPKBPPA	Jumlah pelatihan peningkatan kapasitas sumber daya lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga										
			Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	DPPKBPPA	Jumlah kordinasi dan sinkronisasi antar lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga										
			Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota		Presentase penyediaan layanan bagi keluarga dalam mewujudkan KG dan hak anak										
			Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya	DPPKBPPA	Jumlah penyediaan layanan komprehensif bagi keluarga daam mewujudkan KG										

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan								
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan			Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan		Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan dana	Catatan penting
			dalam Daerah Kabupaten/Kota		dan perlindungan anak									
	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK				Persentase Informasi Layak Anak	100%	387.444.750	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK			Persentase Informasi Layak Anak	100%	102.687,700	
		Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			Jumlah media informasi	3 buah	387.444.750		Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/kota		Jumlah media informasi	3 buah	102,687,700	
		Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	DPPKBPPA	Jumlah buku profil Pengumpulan data PHA dan Indikator KLA untuk penyusunan buku profil Rapat tim penyusun buku Sosialisasi buku profil dan disseminasi data profil	50 buah 17 dokumen 2 kali 1 kali	165.141.900		Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	DPPKBPPA	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia	2 Dokumen	45.490.000	Mendukung IKU OPD	
		Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	DPPKBPPA	jumlah promosi dan edukasi melalui media luar ruang Jumlah promosi melalui media elektronik	15 buah 25 kali 10 media 2 kal	222.302.850		Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	DPPKBPPA	Jumlah Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di	1 Dokumen	57,197,700	Mendukung IKU OPD	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan									
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan			Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan			Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan dana	Catatan penting
					Jumlah promosi melalui media massa Publikasi buku profil anak						Kewenangan Kabupaten/Kota				
	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)				Tingkat Capaian Kabupaten Layak Anak	Nindya	792.573.650	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)				Tingkat Capaian Kabupaten Layak Anak	Nindya	97,312,500	
		Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota			Persentase Kecamatan Layak Anak	80,0%	238.492.100		Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota			Persentase Kecamatan Layak Anak	80,0%	97,312,500	
			Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	DPPKBPPA	Jumlah Keputusan Bupati Jumlah MOU Jumlah PERBUP	1 dokumen 1 Dokumen 1 dokumen	159.429.600			Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	DPPKBPPA	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	2 Organisasi	51,750,000	Mendukung IKU OPD
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak	DPPKBPPA	Jumlah Koordinasi jumlah rapat koordinasi	10 lembaga 2 buah 10 kali	79.062.500			Koordinasi dan Sinkronisasi Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak	DPPKBPPA	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelebagaan	5 Dokumen	45,562,500	Mendukung IKU OPD

No	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan							
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan			Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan		Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan dana	Catatan penting
			Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah sinkronisasi rapat gugus tugas KLA	4 kali			Kewenangan Kabupaten/Kota		Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota			
			Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota		Persentase Pembentukan Forum Anak Kecamatan	85,0%	554.081.550							
			Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	DPPKBPPA	jumlah kegiatan ajang kreatifitas jumlah kegiatan forum anak opearsional layanan puspaga Peningkatan SDM PUSPAGA	2 kali 3 kali 12 bulan 12 bulan	252.844.130							
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	DPPKBPPA	pendampingan Festival Inovasi Fantasi anak (FIFA) Pendampingan forum anak daerah, kecamatan dan nagari pendampingan forum anak nasional pendampingan forum anak	10 orang 4 kali 10 orang 10 kali	190.605.800							

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan									
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan			Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan			Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan dana	Catatan penting
					propinsi										
			Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	DPPKBPPA	Advokasi dan sosialisasi organisasi sahabat anak Advokasi dan sosialisasi pembentukan Media sahabat anak komunikasi informasi melalui banner, leaflet, booklet, baliho sosialisasi dan advokasi pembentukan Asosiasi perusahaan sahabat anak (APSAI) Sosialisasi dan advokasi pembentukan Pusat Informasi Sahabat Anak (PISA)PISA		110.631.620								
			Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah		Jumlah kordinasi dan sinkronisasi antar lembaga penyedia layanan peningkatan										

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan						
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan dana	Catatan penting	
		Kabupaten/Kota	kualitas hidup anak									
	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK		Cakupan anak korban kekerasan yang mendapatkan pelayanan pada unit layanan terpadu	100%	477.051.610	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK		Cakupan anak korban kekerasan yang mendapatkan pelayanan pada unit layanan terpadu	100 %	300,121,900		
	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota		Persentase penurunan kekerasan terhadap anak	0,067%	153.919.990	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota		Persentase penurunan kekerasan terhadap anak	0.067 %	106,317,300		
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	DPPKBPPA	JUmlah Keputusan Bupati JUmlah MOU JUmlah PERBUP JUmlah Sosialisasi	1 Dokumen 1 Dokumen 2 Kali	138.919.990	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	DPPKBPPA	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	43 Perangkat Daerah	58.843.300	Mendukung IKU OPD	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap	DPPKBPPA	Jumlah bulan pendampingan	12 bulan	15.000.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap	DPPKBPPA	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan	32 Dokumen	47,474,000	Mendukung IKU OPD	

No	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan								
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan			Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan			Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan dana	Catatan penting
			Anak Kewenangan Kabupaten / Kota						Anak Kewenangan Kabupaten / Kota		Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota				
			Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Persentase penyediaan lembaga layanan	100%	152.576.500		Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Persentase penyediaan lembaga layanan	100 %	140,066,000		
			Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	DPPKBPPA	Jumlah bulan pendampingan	12 bulan	10.000.000								
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	DPPKBPPA	Jumlah Koordinasi Ke Kecamatan Jumlah Pendampingan Kasus Jumlah Rapat Jumlah Sosialisasi Kegiatan Pencegahan Kekerasan Pada Anak Sinkronisasi Kegiatan Ke Propinsi	50 Kali 50 Kasus 2 Kali 2 Kali 45 Kali	142.576.500		Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	DPPKBPPA	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	90 Layanan	140,066,000		Mendukung IKU OPD

No	Rancangan Awal RKP					Hasil Analisis Kebutuhan									
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan			Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan			Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan dana	Catatan penting
			Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	DPPKBPPA	Jumlah pendampingan										
			Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	DPPKBPPA	Jumlah pendampingan										
			Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Persentase lembaga layanan yang terlatih	100%	170.555.120		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Persentase penyediaan lembaga layanan	100 %	53,738,600		
			Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	DPPKBPPA	Jumlah pendampingan										

No	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan								
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan			Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan			Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan dana	Catatan penting
			Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	DPPKBPPA	Jumlah pelatihan peningkatan kapasitas sumber daya lembaga penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus	1 kali	10.000.000								
			Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	DPPKBPPA	Advokasi Dunia Usaha Advokasi Media Jumlah Workshop MOU Dunia Usaha MOU Media	3 Kali 2 Kali 2 Kali 2 Dokumen 2 Dokumen	160.555.120			Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	DPPKBPPA	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	25 Dokumen	53,738,600	Mendukung IKU OPD
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH				Persentase pelaksanaan program penunjang urusan pemerintahan daerah	95%	5.595.040.403	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH				Persentase pelaksanaan program penunjang urusan pemerintah daerah	95%	3,351,940,223	
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat		Persentase sinergisitas perencanaan	95%	25.404.610			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat		Persentase sinergisitas perencanaan,	95%	23,092,500	

No	Rancangan Awal RKPД						Hasil Analisis Kebutuhan						
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan		Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan dana	Catatan penting
		Daerah		dan evaluasi perangkat daerah				Daerah		penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah			
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	DPPKBPPA	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	2 dokumen	7.362.960		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	DPPKBPPA	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 dokumen	9.114.500	
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	DPPKBPPA	Jumlah dokumen RKA SKPD	1 dokumen	1.167.430		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	DPPKBPPA	Jumlah Dokumen RKASKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 dokumen	3,753,000	
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	DPPKBPPA	Jumlah dokumen perubahan RKA - SKPD	1 dokumen	1.150.930		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	DPPKBPPA	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2 dokumen	1,056,000	
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	DPPKBPPA	Jumlah dokumen DPA SKPD	1 dokumen	1.150.930		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	DPPKBPPA	Jumlah Dokumen DPASKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 dokumen	1,981,000	

No	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan								
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan			Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan			Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan dana	Catatan penting
			Koordinasi dan Penyusunan Perubahan Dokumen DPA-SKPD	DPPKBPPA	Jumlah dokumen perubahan DPA SKPD	1 dokumen	1.192.950			Koordinasi dan Penyusunan Perubahan Dokumen DPA-SKPD	DPPKBPPA	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2 dokumen	1,998,000	
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	DPPKBPPA	Jumlah dokumen capaian kinerja yang tersusun	5 dokumen	11.014.630			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	DPPKBPPA	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Laporan	5,190,000	
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	DPPKBPPA	Jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah	4 Dokumen	2.364.780								
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase pelaksanaan administrasi keuangan perangkat daerah	95%	3.709.328.993			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase pelaksanaan administrasi keuangan perangkat daerah	95%	2,743,308,723	

No	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan								
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan			Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan			Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan dana	Catatan penting
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	DPPKBPPA	Jumlah bulan penyediaan gaji dan tunjangan ASN	12 bulan	3.702.743.953			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	DPPKBPPA	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	30 Orang/bulan	2.736.782.723	
			Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	DPPKBPPA	Jumlah Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD										
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	DPPKBPPA	Jumlah dokumen laporan akhir tahun yang tersusun	1 dokumen	6.585.040			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	DPPKBPPA	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	6,526,000	
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	DPPKBPPA	Jumlah dokumen Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD										
			Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		Jumlah laporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran										
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase pelaksanaan	95%	90.750.000								

No	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan							
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan			Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan		Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan dana	Catatan penting
					administrasi kepegawaian perangkat daerah									
			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	DPPKBPPA	Jumlah pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	125 Stel	68.750.000							
			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	DPPKBPPA	Jumlah paket pendidikan dan pelatihan yang diikuti	1 paket	22.000.000							
			Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah	95%	258.935.930		Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah	95%	184,863,000	
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	DPPKBPPA	Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	12 bulan	2.750.000		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	DPPKBPPA	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	600.000	
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	DPPKBPPA	Jumlah bulan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan									

No	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan								
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan			Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan			Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan dana	Catatan penting
					Kantor										
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	DPPKBPPA	Jumlah bulan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga										
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	DPPKBPPA	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 bulan	33.106.480			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	DPPKBPPA	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	25,389,800	
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	DPPKBPPA	Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan	12 bulan	26.839.450			Fasilitasi Kunjungan Tamu	DPPKBPPA	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	24,482,200	
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan	DPPKBPPA	Jumlah bulan penyediaan bahan bacaan dan buku peraturan perundang undangan	12 bulan	3.088.800								
			Fasilitasi Kunjungan Tamu	DPPKBPPA	Jumlah porsi penyediaan makan dan minum tamu	350 porsi	9.625.000			Fasilitasi Kunjungan Tamu		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 laporan	5,425,000	

No	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan								
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan			Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan			Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan dana	Catatan penting
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	DPPKBPPA	Jumlah porsi penyediaan makan dan minum rapat Jumlah OH yang mengikuti koordinasi dan konsultasi SKPD	700 porsi 600 OH	183.526.200			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	DPPKBPPA	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 laporan	128,966,000	
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	50%	768.043.100			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	50%	63,350,000	
			Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	DPPKBPPA											
			Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	DPPKBPPA	Jumlah unit pengadaan kendaraan dinas/operasional	1 unit	574.278.100								
			Pengadaan Mebel	DPPKBPPA	Jumlah paket pengadaan mobiler	1 Paket	109.285.000			Pengadaan Mebel	DPPKBPPA	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	51 Unit	29.350.000	

No	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan								
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan			Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan			Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan dana	Catatan penting
			Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	DPPKBPPA	Jumlah paket pengadaan peralatan dan mesin lainnya	1 Paket	84.480.000			Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	DPPKBPPA	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit	34.000000	
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	95%	363.407.770			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	95%	164,580,000	
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	DPPKBPPA	Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat	12 bulan	3.884.100			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	DPPKBPPA	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	750.000	
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	DPPKBPPA	Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 bulan	56.319.670			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	DPPKBPPA	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	31,950,000	
			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	DPPKBPPA	Jumlah bulan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor										
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	DPPKBPPA	Jumlah bulan penyediaan jasa pelayanan umum kantor	12 bulan	303.204.000			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	DPPKBPPA	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	131,880,000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan						
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan dana	Catatan penting	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	95%	379.170.000		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	95%	172,746,000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	DPPKBPPA	Jumlah bulan pemeliharaan kendaraan dinas operasional atau lapangan	12 bulan	293.227.000		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	DPPKBPPA	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	89 unit	148.671.000	
	Pemeliharaan Mebel	DPPKBPPA	Jumlah bulan pemeliharaan mebel									
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	DPPKBPPA	Jumlah bulan pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	12 bulan	17.743.000		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	DPPKBPPA	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	50 unit	8,990,000	
	Pemeliharaan / rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	DPPKBPPA	Jumlah paket pemeliharaan / rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	1 paket	68.200.000		Pemeliharaan / rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	DPPKBPPA	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	16 unit	15,085,000	
	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK		Laju Pertumbuhan	1,2	339.528.000	PROGRAM PENGENDALIAN		Laju Pertumbuhan	1.2 .	272,821,600		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan						
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan dana	Catatan penting	
			Penduduk (LPP)			PENDUDUK			Penduduk (LPP)			
	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk		Persentase kebijakan provinsi yang ditindaklanjuti dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk	100%	204.528.000		Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota		Persentase kebijakan provinsi yang ditindaklanjuti dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk	100%	97,378,000	
	Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota terhadap Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (Program KKBPK)	DPPKBPPA	Jumlah kebijakan daerah dalam pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga melalui kelompok BKB, BKR, BKL dan PIK R Terintegrasi Jumlah penyerasian kebijakan daerah terhadap KKBPK	1 dok 1 kegiatan	45.155.000							
	Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan	DPPKBPPA	Jumlah dokumen GDPK yang tersusun	1 Dokumen	50.000.000		Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan	DPPKBPPA	Jumlah Dokumen Penyusunan dan Pemanfaatan	1 Dokumen	97,378,000	

No	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan								
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan			Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan			Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan dana	Catatan penting
			Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota							Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota		Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota			
			Dukungan Pelaksanaan Survei/Pendataan Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan	DPPKBPPA	Jumlah lokasi pelaksanaan survey / pendataan indeks pembangunan berwawasan kependudukan										
			Pelaksanaan Survei/Pendataan Indeks Pengetahuan Masyarakat tentang Kependudukan	DPPKBPPA	Jumlah lokasi pelaksanaan survey / pendataan indeks pengetahuan masy tentang kependudukan										
			Penguatan Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal	DPPKBPPA	Jumlah lokasi kerjasama pelaksanaan pendidikan										
			Penguatan Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Nonformal	DPPKBPPA	Jumlah lokasi Penguatan Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan										

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan									
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan			Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan			Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan dana	Catatan penting
					Nonformal										
			Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota	DPPKBPPA	Jumlah Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal sesuai Isu Lokal										
			Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Nonformal sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota	DPPKBPPA	Jumlah Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Nonformal sesuai Isu Lokal										
			Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal	DPPKBPPA	Jumlah Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal										

No	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan								
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan			Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan			Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan dana	Catatan penting
			Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Nonformal	DPPKBPPA	Jumlah Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Nonformal										
			Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Informal di Kelompok Kegiatan Masyarakat Binaan	DPPKBPPA	Jumlah Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Informal di Kelompok Kegiatan Masyarakat Binaan										
			Advokasi Tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan	DPPKBPPA	Jumlah Advokasi Tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan										
			Sosialisasi Tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan	DPPKBPPA	Jumlah Sosialisasi Tentang Pemanfaatan										

No	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan								
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan			Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan			Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan dana	Catatan penting
			Beserta Model Solusi Strategis sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan Kepada Pemangku Kepentingan		Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan Kepada Pemangku Kepentingan										
			Pelaksanaan Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga	DPPKBPPA	Jumlah sarasehan hasil Pemutakhiran Basis Data Keluarga	1 kali	109.373.000								
			Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program KKBPK	DPPKBPPA	Jumlah Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program KKBPK										
			Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota		Persentase pemetaan perkiraan pengendalian penduduk		135.000.000			Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota		Persentase pemetaan perkiraan pengendalian penduduk	60 %	175,443,600	
			Perumusan Parameter Kependudukan	DPPKBPPA	Jumlah dokumen perumusan kependudukan										

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan						
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan dana	Catatan penting	
		Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan	DPPKBPPA	Jumlah dokumen data kependudukan								
		Penyusunan Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	DPPKBPPA	Jumlah dokumen Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga								
		Pemetaan Kependudukan	DPPKBPPA	Jumlah Pemetaan Kependudukan								
		Penyusunan Kajian Dampak Kependudukan	DPPKBPPA	Jumlah Penyusunan Kajian Dampak Kependudukan								
		Pengembangan Model Solusi Strategis Pengendalian Dampak Kependudukan	DPPKBPPA	Jumlah dokumen Pengembangan Model Solusi Strategis Pengendalian Dampak Kependudukan								
		Pengukuran dan Perhitungan Indikator Kerentanan Dampak Kependudukan (Early		Jumlah dokumen Pengukuran dan Perhitungan								

No	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan								
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan			Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan			Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan dana	Catatan penting
			Warning System/Peringatan Dini)		Indikator Kerentanan Dampak Kependudukan (Early Warning System/Peringatan Dini)										
			Membentuk Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program KKBPK di Sektor Lain	DPPKBPPA	Jumlah Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program KKBPK di Sektor Lain yang terbentuk										
			Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	DPPKBPPA	Jumlah lokasi Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga										
			Pemanfaatan Data Hasil Pemutakhiran Data Keluarga	DPPKBPPA	Jumlah dokumen Data Hasil Pemutakhiran Data Keluarga										
			Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	DPPKBPPA	Jumlah dokumen Penyediaan Data dan	1 dok	10.000.000				DPPKBPPA	Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang	30 Dokumen	50.032.000	

No	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan								
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan			Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan			Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan dana	Catatan penting
					Informasi Keluarga					Penyediaan Data dan Informasi Keluarga		Tersedianya			
			Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	DPPKBPPA	Jumlah dokumen Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	1 dok	125.000.000								
			Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	DPPKBPPA	Jumlah Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB					Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	DPPKBPPA	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	79 Dokumen	125,411,600	
			Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program KKBPK	DPPKBPPA	Jumlah lokasi Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program KKBPK										
	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)				Persentase CPR (Contraceptive Prevalence Rate)	74,30%	8.450.860.097	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)				Persentase CPR (Contraceptive Prevalence Rate)	74,30 %	2,989,928,480	
		Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal			Persentase promosi KKBPK terhadap keluarga dan kampung KB	62,30%	4.267.282.857		Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya			Persentase promosi KKBPK terhadap keluarga dan kampung KB	63 %	1,309,972,780	

No	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan								
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan			Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan			Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan dana	Catatan penting
								Lokal							
			Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	DPPKBPPA	Jumlah pertemuan advokasi/KIE kepada stakeholder	13 kali	75.685.280			Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	DPPKBPPA	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	12 organisasi	4.375.000	
			Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK Sesuai Kearifan Budaya Lokal	DPPKBPPA	Jumlah lokasi penyuluhan advokasi dan promosi program KKBPK	13 Kecamatan	737.151.250			Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK Sesuai Kearifan Budaya Lokal	DPPKBPPA	Jumlah Dokumen Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Sesuai Kearifan Budaya Lokal	13 Dokumen	25,000,000	
			Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program KKBPK	DPPKBPPA	Jumlah pembuatan pamflet, lembar balik KKBPK	13 paket	55.000.000								

No	Rancangan Awal RKPД						Hasil Analisis Kebutuhan								
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan			Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan			Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan dana	Catatan penting
			Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	DPPKBPPA	Jumlah promosi KKBPK di radio	4 kali	55.000.000			Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	DPPKBPPA	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	316 Dokumen	70,640,000	
			Penggunaan Media Massa Cetak, Elektronik dan Media Lainnya sesuai Kearifan Budaya Lokal Dalam Pencitraan Program KKBPK	DPPKBPPA	Jumlah media massa cetak Elektronik dan Media Lainnya sesuai Kearifan Budaya Lokal Dalam Pencitraan Program KKBPK										
			Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	DPPKBPPA	Jumlah Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	4 kali	200.000.000			Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	DPPKBPPA	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	105 Laporan	202.800.000	

No	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan								
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan			Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan			Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan dana	Catatan penting
											Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)				
			Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	DPPKBPPA	Jumlah pengadaan sarana dan pra sarana Balai Penyuluhan KKBPK	1 Kegiatan	2.737.002.180			Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	DPPKBPPA	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	13 Laporan	967,157,780	
			Pengendalian Program KKBPK	DPPKBPPA	Jumlah kegiatan pertemuan di kabupaten dan kecamatan	14 kali	407.444.147			Pengendalian Program KKBPK	DPPKBPPA	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK	246 Laporan	40,000,000	
			Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/ Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)		Cakupan PKB yang didayagunakan	37,71%	1.342.355.960			Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/ Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)		Cakupan PKB yang didayagunakan	37,71%	483,200,000	
			Pembinaan IMP dan Program KKBPK di Lini Lapangan oleh	DPPKBPPA	Jumlah lokasi Pembinaan IMP dan Program KKBPK di Lini Lapangan oleh										

No	Rancangan Awal RKPД						Hasil Analisis Kebutuhan								
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan			Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan			Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan dana	Catatan penting
			PKB/PLKB		PKB/PLKB										
			Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB	DPPKBPPA	Jumlah paket Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB										
			Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPК untuk Petugas Keluarga Berencana/ Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	DPPKBPPA	Jumlah pertemuan dalam rangka Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPК untuk Petugas Keluarga Berencana/ Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)										
			Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	DPPKBPPA	Jumlah bulan operasional kader PPKBN dan PPKBJ Jumlah pertemuan peningkatan kapasitas kader	12 bulan 12 kali	1.342.355.960			Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	DPPKBPPA	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	716 Orang	483.200,000	

No	Rancangan Awal RKP					Hasil Analisis Kebutuhan							
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan dana	Catatan penting		
		Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi Serta Pelaksanaan Pelayanan KB Di Daerah Kabupaten/Kota		Persentase penggunaan kontrasepsi jangka panjang	26,7%	1.497.483.780		Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi Serta Pelaksanaan Pelayanan KB Di Daerah Kabupaten/Kota		Persentase penggunaan kontrasepsi jangka panjang	26.7 %	676,835,700	
		Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	DPPKBPPA	Jumlah fasilitas kesehatan yang mendapat distribusi alokon	37 Faskes	84.283.080		Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	DPPKBPPA	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	37 Laporan	89.410.100	
		Peningkatan Kompetensi Pengelola dan Petugas Logistik Alat dan Obat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang Pelayanan KB	DPPKBPPA	jumlah pertemuan dan sosialisasi dengan bidan klinik dan PKB	2 kali	83.485.500							
		Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	DPPKBPPA	Jumlah pelayanan KB MKJP	13 kecamatan	1.021.465.200		Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	DPPKBPPA	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang	11079 Orang 13 Kecamatan	534.834,200	

No	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan							
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan			Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan			Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan dana
											(MKJP)			
			Penyediaan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP	DPPKBPPA	Jumlah Penyediaan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP									
			Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang	DPPKBPPA	Jumlah fasilitasi kesehatan yang mendapat distribusi	37 Faskes	100.000.000							
			Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	DPPKBPPA	Tersedianya sarana penunjang pelayanan KB	37 paket	20.000.000							
			Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KB	DPPKBPPA	Jumlah pembinaan bagi peserta KB	5 kali	14.250.000							
			Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya	DPPKBPPA	Jumlah sosialisasi KB dan kesehatan reproduksi di faskes	13 kali	100.000.000			Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya	DPPKBPPA	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan	13 Laporan	52.591.400

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan dana	Catatan penting
								Jejarangnya			
		Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan	DPPKBPPA	Jumlah lokasi Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan							
		Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	DPPKBPPA	Jumlah pelatihan Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi							
		Dukungan Operasional Pelayanan Bergerak KB	DPPKBPPA	Jumlah pelayanan KB bergerak dengan mobil pelayanan							
		Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan dan Pasca Keguguran	DPPKBPPA	Jumlah sosialisasi KB pasca persalinan							

No	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan								
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan			Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan			Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan dana	Catatan penting
			Peningkatan Kesertaan KB Pria	DPPKBPPA	Jumlah sosialisasi KB pria										
			Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Masyarakat Tingkat Daerah Kabupaten / Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB		Persentase organisasi masyarakat yang berperan di kampung KB	55%	1.343.737.500			Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Masyarakat Tingkat Daerah Kabupaten / Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB		Persentase organisasi masyarakat yang berperan di kampung KB	55%	519.920,000	
			Penguatan Peran serta Organisasi Masyarakat dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	DPPKBPPA	Jumlah pertemuan Organisasi Masyarakat dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB										
			Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	DPPKBPPA	Jumlah pertemuan dengan lintas sektor di Kampung KB	28 kali	98.857.500								
			Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	DPPKBPPA	Jumlah pertemuan dan sosialisasi KKBPK di Kampung KB	28 kali	1.244.880.000			Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	DPPKBPPA	Jumlah Kampung KB yang Mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana	27 Kampung	519.920,000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan									
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan			Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan			Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan dana	Catatan penting
											(Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Kampung KB				
			Pembinaan Terpadu Kampung KB	DPPKBPPA	Jumlah lokasi pembinaan terpadu kampung KB										
	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)				Total Fertility Rate (TFR)	2,22	2.567.635.900	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)				Total Fertilty Rate (TFR)	2,22 .	1,966,068,000	
		Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga			Persentase keluarga aktif mengikuti kegiatan tribina	77%	2.559.814.900		Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga			Persentase keluarga aktif mengikuti kegiatan tribina	77 %	1,966,068,000	
		Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan		DPPKBPPA	Jumlah lokasi Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit										

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan									
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan			Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan			Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan dana	Catatan penting
			Ekonomi Keluarga)		Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)										
			Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	DPPKBPPA	Jumlah paket Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)										
			Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	DPPKBPPA	Jumlah Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi										

No	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan								
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan			Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan			Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan dana	Catatan penting
					Keluarga/UPPKS)										
			Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	DPPKBPPA	Jumlah orientasi/pelatihan teknis pelaksana/kader BKB,BKR,BKL,PIK R dan UPPKAS	13 Kecamatan	127.352.500								
			Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	DPPKBPPA	Jumlah kecamatan yang disediakan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	13 Kecamatan	1.739.330.400			Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	DPPKBPPA	Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	39366 Orang	1.787.540.000	

No	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan							
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan			Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan		Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan dana	Catatan penting
									Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	DPPKBPPA	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	1200 Keluarga	178,528,000	
			Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	DPPKBPPA	Jumlah kecamatan yang disediakan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)									
			Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan	DPPKBPPA	Jumlah Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB,									

No	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan								
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan			Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan			Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan dana	Catatan penting
			Ekonomi Keluarga/UPPKS)		BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)										
			Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	DPPKBPPA	Jumlah promosi dan sosialisasi kelompok kegiatan Menjadi Orang Tua Hebat, Genre, Kelanjutusiaan dan Pengelolaan Keuangan keluarga	5 kegiatan	693.132.000								
			Penyerasian Kebijakan dalam Pelaksanaan Program yang Mendukung Tercapainya IPK	DPPKBPPA	Jumlah pertemuan Koordinasi BKB Holistik Integratif										
			Penyediaan dan Pengembangan Materi IPK	DPPKBPPA	Jumlah dokumen pengembangan materi IPK										

No	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan								
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan			Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan			Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan dana	Catatan penting
			Advokasi dan Promosi IPK	DPPKBPPA	Jumlah Advokasi dan Promosi IPK										
			Sosialisasi IPK	DPPKBPPA	Jumlah Sosialisasi IPK										
			Pelaksanaan Koordinasi Evaluasi Pencapaian IPK	DPPKBPPA	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi Evaluasi Pencapaian IPK										
			Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Masyarakat Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga		Persentase organisasi masyarakat yang berperan dalam pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga	100%	7.821.000								
			Penguatan Kebijakan Daerah dalam Rangka Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Masyarakat dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	DPPKBPPA	Jumlah kebijakan daerah dalam pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga melalui kelompok BKB, BKR, BKL dan PIK R Terintegrasi		7.821.000								

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan									
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan			Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan			Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan dana	Catatan penting
			(BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)												
			Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	DPPKBPPA	Jumlah mitra kerja dan organisasi kemasyarakatan dalam penggerakan operasional pembinaan program ketahanan dan kesejahteraan keluarga										
			Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	DPPKBPPA	Jumlah pelatihan peningkatan kapasitas mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga										
			Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan	DPPKBPPA	Jumlah dan Sosialisasi Program										

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan									
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan			Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan			Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan dana	Catatan penting
			Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja		Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja										
						20.554.154.990							10,094,904,803		

Dari Tabel diatas dapat dijelaskan bahwa berdasarkan analisis kebutuhan rancangan awal Rencana Kerja DPPKBPPPA, maka ada tambahan 2 sub kegiatan dalam rangka sinergisitas dengan 10 program pokok PKK dan dalam rangka mengakomodir program provinsi.

Sub Kegiatan tersebut adalah Penyusunan dan pemanfaatan Grand Design Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten / Kota dan Sub Kegiatan Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas.

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam menyusun Renja Perangkat Daerah, salah satu tahapan proses yang tidak boleh diabaikan adalah menampung usulan program dan kegiatan yang berasal dari bawah atau aspirasi masyarakat. Hal ini sangat penting dilaksanakan karena pada hakekatnya masyarakatlah yang akan menjadi penerima manfaat dari pogram dan kegiatan kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah.

Sebagai salah satu Perangkat Daerah dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berupaya semaksimal mungkin untuk menampung aspirasi masyarakat dengan berbagai cara dan dalam berbagai kesempatan, termasuk salah satunya melalui masukan dari hasil pelaksanaan Musrenbang, baik di tingkat nagari, kecamatan maupun di tingkat kabupaten. Renja DPPKBPPPA Tahun 2023 juga mengakomodir Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) Anggota DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota.

Aspirasi masyarakat akan menjadi perhatian serius DPPKBPPPA dalam pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2023. Suatu langkah penting yang harus diambil adalah kembali menata dan menyusun berbagai peraturan yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan sehingga program dan kegiatan DPPKPPPA dapat dijalankan dengan tertib,

terarah, efektif dan efisien. Secara umum program dan kegiatan yang dituangkan dalam Rencana Kerja Perubahan DPPKBPPA Tahun 2023 ini sudah menampung dan mengakomodir hasil usulan pemangku kepentingan/masyarakat.

Tabel 2.4
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan
Tahun 2023

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
I	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan				
I.I	Kegiatan Pelembagaan PUG pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kab/Kota				
I.I.I	Sub Kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	DPPKBPP A	Jumlah Perangkat Daerah yang mendapat advokasi kebijakan dan pendampingan pelaksanaan PUG termasuk perencanaan pembangunan responsif gender (PPRG) kewenangan Kabupaten / Kota	43 PD	Reses Musrenbang
I.II	Kegiatan Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi				

	Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota				
I.II.I	Sub Kegiatan Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	DPPKBPP A	Jumlah dokumen hasil sosialisasi peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, Sosial dan ekonomi kewenangan kabupaten / kota	10 dok	Reses Musrenban g

Tabel 2.4

Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023
Kabupaten Lima Puluh Kota

PD Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan dana	Catatan penting
	Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan		Indeks Pembangunan Gender (IPG)	95,85%	1.282.049.470	Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan		Indeks Pembangunan Gender (IPG)	95,85%	850,432,400	
			Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	46,95%							
	Pelebagaan PUG pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kab/Kota		Persentase peningkatan percepatan PUG melalui PPRG di Perangkat Daerah	80,80%	242.372.370	Pelebagaan PUG pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kab/Kota		Persentase peningkatan percepatan PUG melalui PPRG di Perangkat Daerah	80,80%	281,446,400	
	Koordinasi dan sinkronisasi perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	DPPKBPPA	Jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi terkait pelaksanaan PUG Jumlah advokasi dan koordinasi, yang	15 Kali	79.540.670	Koordinasi dan sinkronisasi perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	DPPKBPPA	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pengarusutamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Dokumen	101.998.100	Mendukung IKU OPD

No	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan								
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan			Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan			Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan dana	Catatan penting
					dilaksanakan terhadap jumlah kebijakan yang disusun										
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	DPPKBPPA	Jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi terkait pelaksanaan PUG	6 kali	20.000.000								
			Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	DPPKBPPA	Jumlah sosialisasi terkait peran perempuan dibidang sosial, politik dan hukum serta PUG Jumlah workshop, bimtek, pelatihan, sosialisasi terkait peran perempuan dibidang sosial, politik dan hukum	43 Perangkat Daerah 5 kali	64.559.550			Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	DPPKBPPA	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota	43 Perangkat Daerah	138,057,800	Mendukung IKU OPD
			Sosialisasi kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	DPPKBPPA	Persentase anggaran yang responsif gender (ARG) pada belanja langsung	5,56%	78.272.150			Sosialisasi kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	DPPKBPPA	Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti	43 Perangkat Daerah	41,390,500	Mendukung IKU OPD

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan								
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan			Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan		Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan dana	Catatan penting
					APBD Kabupaten						Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota			
				Jumlah sosialisasi terhadap peran perencana (subbag Program) dalam PUG dan PPRG	2 kali									
			Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota		Persentase organisasi perempuan yang berpartisipasi dibidang politik, hukum, sosial dan ekonomi	64,0%	910.075.100		Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota		Persentase organisasi perempuan yang berpartisipasi dibidang politik, hukum, sosial dan ekonomi	64,0%	421,786,000	
			Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	DPPKBPP A	Jumlah kegiatan organisasi perempuan		910.075.100		Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	DPPKBPPA	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Dokumen	421,786,000	Mendukung IKU OPD
				Jumlah lomba-lomba dalam rangka pembinaan Organisasi Perempuan	9 keg									
				Jumlah peringatan hari besar	2 kegiatan									
				Jumlah rapat koordinasi	20 kali									
				Jumlah sosialisasi	3 kali									
				Jumlah seminar	10 kali									

No	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan								
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan			Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan			Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan dana	Catatan penting
			Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	DPPKBPPA	Jumlah kegiatan advokasi										
			Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota		Persentase perempuan yang mendapatkan pemberdayaan ekonomi	75,0%	129.602.000		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota		Persentase perempuan yang mendapatkan pemberdayaan ekonomi	75,0%	147,200,000		
			Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	DPPKBPPA	Jumlah kegiatan advokasi										
			Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	DPPKBPPA	Jumlah pelatihan peningkatan kapasitas sumber daya lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan										
			Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE)	DPPKBPPA	Jumlah lokasi pembinaan dan penyuluhan terhadap	13 Kecamatan 4 Kali	129.602.000		Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE)	DPPKBPPA	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	10 Dokumen	147,200,000		Mendukung IKU OPD

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan								
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan			Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan		Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan dana	Catatan penting
			Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota		perempuan dan kelompok perempuan Jumlah pelatihan peningkatan kapasitas perempuan				Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota		Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia			
	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN				Cakupan perempuan korban kekerasan yang mendapatkan pelayanan pada unit layanan terpadu	100,0%	641.971.110	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN			Cakupan perempuan korban kekerasan yang mendapatkan pelayanan pada unit layanan terpadu	100%	149,878,000	
		Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota			Rasio KDRT	0,0029	369.224.130		Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota		Rasio KDRT	0.0029	92,787,000	
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota		DPPKBPPA	diseminasi data kekerasan bagi lembaga P2TP2A, K3N , PUSPAGA, WCC Koordinasi kegiatan ke kecamatan sinkronisasi kegiatan ke provinsi sosialisasi peraturan perundangan	1 kali 45 kali 40 kali 1 kali 1 kali	235.010.600							

No	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan								
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan			Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan			Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan dana	Catatan penting
					sosialisasi TPPO										
			Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	DPPKBPPA	Advokasi ke K3N dan TPPO advokasi ke P2TP2A dan WCC Pendampingan layanan korban kekerasan dan TPPO	20 kali 45 kali 45 kali	134.213.530			Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	DPPKBPPA	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	43 Perangkat Daerah	92,787,000	Mendukung IKU OPD
			Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten / Kota		Persentase Korban Kekerasan yang mendapatkan pelayanan	100,0%	-								
			Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	DPPKBPPA	Jumlah lokasi yang mendapat layanan pengaduan masyarakat										
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan	DPPKBPPA	Jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penyediaan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan										

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan						
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan dana	Catatan penting	
		Kabupaten / Kota	korban kekerasan									
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Persentase lembaga layanan yang terlatih	100%	272.746.980	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Persentase lembaga layanan yang terlatih	100 %	57,091,000		
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	DPPKBPPA	Jumlah kegiatan advokasi kebijakan dan pendampingan penyediaan sarana prasarana layanan bagi perempuan korban kekerasan									
	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	DPPKBPPA	Pelatihan Peningkatan kapasitas SDM P2TP2A Pelatihan Peningkatan kapasitas SDM Puspaga Pelatihan Peningkatan Kapasitas SDM WCC Pelayanan aktif dalam rangka Edukasi		272.746.980	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	DPPKBPPA	Jumlah sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	30 orang	57,091,000	Mendukung IKU OPD	

No	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan								
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan			Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan			Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan dana	Catatan penting
					PUSPAGA										
			Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	DPPKBPPA	Jumlah paket kebutuhan spesifik bagi perempuan dalam situasi darurat dan kondisi khusus										
			Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	DPPKBPPA	Jumlah kordinasi dan sinkronisasi antar lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan										
	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA				Persentase pemenuhan lima pilar indikator ketahanan keluarga	50%	20.000.000	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA				Persentase pemenuhan lima pilar indikator ketahanan keluarga	50%	13,714,000	
			Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Persentase peningkatan kualitas keluarga dakam mewujudkan Kesetaraan gender dan hak anak	50%	20.000.000		Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Persentase peningkatan kualitas keluarga dakam mewujudkan Kesetaraan gender dan hak anak	50%	13,714,000		
			Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG	DPPKBPPA	Jumlah kegiatan advokasi kebijakan dan	4 kali	20.000.000								

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan								
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan			Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan		Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan dana	Catatan penting
			dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota		pendampingan									
			Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	DPPKBPPA	Jumlah kegiatan KIE KG dan perlindungan anak									
			Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	DPPKBPPA	Jumlah kegiatan pengembangan masyarakat untuk peningkatan kualitas keluarga				Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	DPPKBPPA	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Laporan	13,714,000	Mendukung IKU OPD
			Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota		Persentase pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan KG dan hak anak									
			Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia	DPPKBPPA	Jumlah advokasi kebijakan dan pendampingan pengembangan									

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan									
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan			Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan			Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan dana	Catatan penting
			Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga										
			Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	DPPKBPPA	Jumlah pelatihan peningkatan kapasitas sumber daya lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga										
			Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	DPPKBPPA	Jumlah kordinasi dan sinkronisasi antar lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga										
			Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota		Presentase penyediaan layanan bagi keluarga dalam mewujudkan KG dan hak anak										
			Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya	DPPKBPPA	Jumlah penyediaan layanan komprehensif bagi keluarga daam mewujudkan KG										

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan								
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan			Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan		Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan dana	Catatan penting
			dalam Daerah Kabupaten/Kota		dan perlindungan anak									
	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK				Persentase Informasi Layak Anak	100%	387.444.750	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK			Persentase Informasi Layak Anak	100%	102.687,700	
		Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			Jumlah media informasi	3 buah	387.444.750		Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/kota		Jumlah media informasi	3 buah	102,687,700	
			Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	DPPKBPPA	Jumlah buku profil Pengumpulan data PHA dan Indikator KLA untuk penyusunan buku profil Rapat tim penyusun buku Sosialisasi buku profil dan disseminasi data profil	50 buah 17 dokumen 2 kali 1 kali	165.141.900		Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	DPPKBPPA	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia	2 Dokumen	45.490.000	Mendukung IKU OPD
			Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	DPPKBPPA	jumlah promosi dan edukasi melalui media luar ruang Jumlah promosi melalui media elektronik	15 buah 25 kali 10 media 2 kal	222.302.850		Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	DPPKBPPA	Jumlah Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di	1 Dokumen	57,197,700	Mendukung IKU OPD

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan									
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan			Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan			Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan dana	Catatan penting
					Jumlah promosi melalui media massa Publikasi buku profil anak						Kewenangan Kabupaten/Kota				
	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)				Tingkat Capaian Kabupaten Layak Anak	Nindya	792.573.650	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)				Tingkat Capaian Kabupaten Layak Anak	Nindya	97,312,500	
		Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota			Persentase Kecamatan Layak Anak	80,0%	238.492.100		Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota			Persentase Kecamatan Layak Anak	80,0%	97,312,500	
			Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	DPPKBPPA	Jumlah Keputusan Bupati Jumlah MOU Jumlah PERBUP	1 dokumen 1 Dokumen 1 dokumen	159.429.600			Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	DPPKBPPA	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	2 Organisasi	51,750,000	Mendukung IKU OPD
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak	DPPKBPPA	Jumlah Koordinasi jumlah rapat koordinasi	10 lembaga 2 buah 10 kali	79.062.500			Koordinasi dan Sinkronisasi Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak	DPPKBPPA	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelebagaan	5 Dokumen	45,562,500	Mendukung IKU OPD

No	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan							
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan			Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan		Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan dana	Catatan penting
			Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah sinkronisasi rapat gugus tugas KLA	4 kali				Kewenangan Kabupaten/Kota	Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota			
			Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota		Persentase Pembentukan Forum Anak Kecamatan	85,0%	554.081.550							
			Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	DPPKBPPA	jumlah kegiatan ajang kreatifitas jumlah kegiatan forum anak opearsional layanan puspaga Peningkatan SDM PUSPAGA	2 kali 3 kali 12 bulan 12 bulan	252.844.130							
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	DPPKBPPA	pendampingan Festival Inovasi Fantasi anak (FIFA) Pendampingan forum anak daerah, kecamatan dan nagari pendampingan forum anak nasional pendampingan forum anak	10 orang 4 kali 10 orang 10 kali	190.605.800							

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan									
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan			Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan			Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan dana	Catatan penting
					propinsi										
			Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	DPPKBPPA	Advokasi dan sosialisasi organisasi sahabat anak Advokasi dan sosialisasi pembentukan Media sahabat anak komunikasi informasi melalui banner, leaflet, booklet, baliho sosialisasi dan advokasi pembentukan Asosiasi perusahaan sahabat anak (APSAI) Sosialisasi dan advokasi pembentukan Pusat Informasi Sahabat Anak (PISA)PISA		110.631.620								
			Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah		Jumlah kordinasi dan sinkronisasi antar lembaga penyedia layanan peningkatan										

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan						
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan dana	Catatan penting	
		Kabupaten/Kota	kualitas hidup anak									
	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK		Cakupan anak korban kekerasan yang mendapatkan pelayanan pada unit layanan terpadu	100%	477.051.610	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK		Cakupan anak korban kekerasan yang mendapatkan pelayanan pada unit layanan terpadu	100 %	300,121,900		
	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota		Persentase penurunan kekerasan terhadap anak	0,067%	153.919.990	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota		Persentase penurunan kekerasan terhadap anak	0.067 %	106,317,300		
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	DPPKBPPA	JUmlah Keputusan Bupati JUmlah MOU JUmlah PERBUP JUmlah Sosialisasi	1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 2 Kali	138.919.990	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	DPPKBPPA	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	43 Perangkat Daerah	58.843.300	Mendukung IKU OPD	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap	DPPKBPPA	Jumlah bulan pendampingan	12 bulan	15.000.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap	DPPKBPPA	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan	32 Dokumen	47,474,000	Mendukung IKU OPD	

No	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan								
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan			Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan			Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan dana	Catatan penting
			Anak Kewenangan Kabupaten / Kota						Anak Kewenangan Kabupaten / Kota		Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota				
			Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Persentase penyediaan lembaga layanan	100%	152.576.500		Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Persentase penyediaan lembaga layanan	100 %	140,066,000		
			Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	DPPKBPPA	Jumlah bulan pendampingan	12 bulan	10.000.000								
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	DPPKBPPA	Jumlah Koordinasi Ke Kecamatan Jumlah Pendampingan Kasus Jumlah Rapat Jumlah Sosialisasi Kegiatan Pencegahan Kekerasan Pada Anak Sinkronisasi Kegiatan Ke Propinsi	50 Kali 50 Kasus 2 Kali 2 Kali 45 Kali	142.576.500		Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	DPPKBPPA	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	90 Layanan	140,066,000		Mendukung IKU OPD

No	Rancangan Awal RKP					Hasil Analisis Kebutuhan									
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan			Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan			Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan dana	Catatan penting
			Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	DPPKBPPA	Jumlah pendampingan										
			Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	DPPKBPPA	Jumlah pendampingan										
			Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Persentase lembaga layanan yang terlatih	100%	170.555.120		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Persentase penyediaan lembaga layanan	100 %	53,738,600		
			Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	DPPKBPPA	Jumlah pendampingan										

No	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan								
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan			Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan			Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan dana	Catatan penting
			Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	DPPKBPPA	Jumlah pelatihan peningkatan kapasitas sumber daya lembaga penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus	1 kali	10.000.000								
			Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	DPPKBPPA	Advokasi Dunia Usaha Advokasi Media Jumlah Workshop MOU Dunia Usaha MOU Media	3 Kali 2 Kali 2 Kali 2 Dokumen 2 Dokumen	160.555.120			Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	DPPKBPPA	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	25 Dokumen	53,738,600	Mendukung IKU OPD
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH				Persentase pelaksanaan program penunjang urusan pemerintahan daerah	95%	5.595.040.403	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH				Persentase pelaksanaan program penunjang urusan pemerintah daerah	95%	3,351,940,223	
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat		Persentase sinergitas perencanaan	95%	25.404.610			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat		Persentase sinergitas perencanaan,	95%	23,092,500	

No	Rancangan Awal RKPd						Hasil Analisis Kebutuhan						
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan		Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan dana	Catatan penting
		Daerah		dan evaluasi perangkat daerah				Daerah		penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah			
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	DPPKBPPA	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	2 dokumen	7.362.960		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	DPPKBPPA	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 dokumen	9.114.500	
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	DPPKBPPA	Jumlah dokumen RKA SKPD	1 dokumen	1.167.430		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	DPPKBPPA	Jumlah Dokumen RKASKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 dokumen	3,753,000	
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	DPPKBPPA	Jumlah dokumen perubahan RKA - SKPD	1 dokumen	1.150.930		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	DPPKBPPA	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2 dokumen	1,056,000	
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	DPPKBPPA	Jumlah dokumen DPA SKPD	1 dokumen	1.150.930		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	DPPKBPPA	Jumlah Dokumen DPASKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 dokumen	1,981,000	

No	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan								
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan			Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan			Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan dana	Catatan penting
			Koordinasi dan Penyusunan Perubahan Dokumen DPA-SKPD	DPPKBPPA	Jumlah dokumen perubahan DPA SKPD	1 dokumen	1.192.950			Koordinasi dan Penyusunan Perubahan Dokumen DPA-SKPD	DPPKBPPA	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2 dokumen	1,998,000	
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	DPPKBPPA	Jumlah dokumen capaian kinerja yang tersusun	5 dokumen	11.014.630			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	DPPKBPPA	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Laporan	5,190,000	
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	DPPKBPPA	Jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah	4 Dokumen	2.364.780								
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase pelaksanaan administrasi keuangan perangkat daerah	95%	3.709.328.993			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase pelaksanaan administrasi keuangan perangkat daerah	95%	2,743,308,723	

No	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan								
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan			Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan			Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan dana	Catatan penting
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	DPPKBPPA	Jumlah bulan penyediaan gaji dan tunjangan ASN	12 bulan	3.702.743.953			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	DPPKBPPA	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	30 Orang/bulan	2.736.782.723	
			Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	DPPKBPPA	Jumlah Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD										
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	DPPKBPPA	Jumlah dokumen laporan akhir tahun yang tersusun	1 dokumen	6.585.040			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	DPPKBPPA	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	6,526,000	
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	DPPKBPPA	Jumlah dokumen Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD										
			Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		Jumlah laporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran										
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase pelaksanaan	95%	90.750.000								

No	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan							
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan			Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan		Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan dana	Catatan penting
					administrasi kepegawaian perangkat daerah									
			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	DPPKBPPA	Jumlah pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	125 Stel	68.750.000							
			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	DPPKBPPA	Jumlah paket pendidikan dan pelatihan yang diikuti	1 paket	22.000.000							
			Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah	95%	258.935.930		Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah	95%	184,863,000	
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	DPPKBPPA	Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	12 bulan	2.750.000		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	DPPKBPPA	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	600.000	
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	DPPKBPPA	Jumlah bulan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan									

No	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan								
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan			Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan			Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan dana	Catatan penting
					Kantor										
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	DPPKBPPA	Jumlah bulan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga										
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	DPPKBPPA	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 bulan	33.106.480			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	DPPKBPPA	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	25,389,800	
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	DPPKBPPA	Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan	12 bulan	26.839.450			Fasilitasi Kunjungan Tamu	DPPKBPPA	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	24,482,200	
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan	DPPKBPPA	Jumlah bulan penyediaan bahan bacaan dan buku peraturan perundang undangan	12 bulan	3.088.800								
			Fasilitasi Kunjungan Tamu	DPPKBPPA	Jumlah porsi penyediaan makan dan minum tamu	350 porsi	9.625.000			Fasilitasi Kunjungan Tamu		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 laporan	5,425,000	

No	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan								
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan			Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan			Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan dana	Catatan penting
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	DPPKBPPA	Jumlah porsi penyediaan makan dan minum rapat Jumlah OH yang mengikuti koordinasi dan konsultasi SKPD	700 porsi 600 OH	183.526.200			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	DPPKBPPA	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 laporan	128,966,000	
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	50%	768.043.100			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	50%	63,350,000	
			Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	DPPKBPPA											
			Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	DPPKBPPA	Jumlah unit pengadaan kendaraan dinas/operasional	1 unit	574.278.100								
			Pengadaan Mebel	DPPKBPPA	Jumlah paket pengadaan mobiler	1 Paket	109.285.000			Pengadaan Mebel	DPPKBPPA	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	51 Unit	29.350.000	

No	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan								
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan			Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan		Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan dana	Catatan penting	
			Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	DPPKBPPA	Jumlah paket pengadaan peralatan dan mesin lainnya	1 Paket	84.480.000			Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	DPPKBPPA	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit	34.000000	
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	95%	363.407.770			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	95%	164,580,000	
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	DPPKBPPA	Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat	12 bulan	3.884.100			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	DPPKBPPA	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	750.000	
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	DPPKBPPA	Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 bulan	56.319.670			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	DPPKBPPA	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	31,950,000	
			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	DPPKBPPA	Jumlah bulan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor										
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	DPPKBPPA	Jumlah bulan penyediaan jasa pelayanan umum kantor	12 bulan	303.204.000			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	DPPKBPPA	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	131,880,000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan						
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan dana	Catatan penting	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	95%	379.170.000		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	95%	172,746,000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	DPPKBPPA	Jumlah bulan pemeliharaan kendaraan dinas operasional atau lapangan	12 bulan	293.227.000		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	DPPKBPPA	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	89 unit	148.671.000	
	Pemeliharaan Mebel	DPPKBPPA	Jumlah bulan pemeliharaan mebel									
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	DPPKBPPA	Jumlah bulan pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	12 bulan	17.743.000		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	DPPKBPPA	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	50 unit	8,990,000	
	Pemeliharaan / rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	DPPKBPPA	Jumlah paket pemeliharaan / rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	1 paket	68.200.000		Pemeliharaan / rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	DPPKBPPA	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	16 unit	15,085,000	
	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK		Laju Pertumbuhan	1,2	339.528.000	PROGRAM PENGENDALIAN		Laju Pertumbuhan	1.2 .	272,821,600		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan							
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan		Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan dana	Catatan penting
				Penduduk (LPP)			PENDUDUK			Penduduk (LPP)			
		Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk		Persentase kebijakan provinsi yang ditindaklanjuti dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk	100%	204.528.000		Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota		Persentase kebijakan provinsi yang ditindaklanjuti dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk	100%	97,378,000	
		Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota terhadap Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (Program KKBPK)	DPPKBPPA	Jumlah kebijakan daerah dalam pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluargamelalui kelompok BKB, BKR, BKL dan PIK R Terintegrasi Jumlah penyerasian kebijakan daerah terhadap KKBPK	1 dok 1 kegiatan	45.155.000							
		Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan	DPPKBPPA	Jumlah dokumen GDPK yang tersusun	1 Dokumen	50.000.000		Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan	DPPKBPPA	Jumlah Dokumen Penyusunan dan Pemanfaatan	1 Dokumen	97,378,000	

No	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan								
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan			Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan			Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan dana	Catatan penting
			Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota							Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota		Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota			
			Dukungan Pelaksanaan Survei/Pendataan Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan	DPPKBPPA	Jumlah lokasi pelaksanaan survey / pendataan indeks pembangunan berwawasan kependudukan										
			Pelaksanaan Survei/Pendataan Indeks Pengetahuan Masyarakat tentang Kependudukan	DPPKBPPA	Jumlah lokasi pelaksanaan survey / pendataan indeks pengetahuan masy tentang kependudukan										
			Penguatan Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal	DPPKBPPA	Jumlah lokasi kerjasama pelaksanaan pendidikan										
			Penguatan Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Nonformal	DPPKBPPA	Jumlah lokasi Penguatan Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan										

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan									
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan			Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan			Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan dana	Catatan penting
					Nonformal										
			Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota	DPPKBPPA	Jumlah Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal sesuai Isu Lokal										
			Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Nonformal sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota	DPPKBPPA	Jumlah Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Nonformal sesuai Isu Lokal										
			Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal	DPPKBPPA	Jumlah Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal										

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan									
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan			Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan			Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan dana	Catatan penting
			Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Nonformal	DPPKBPPA	Jumlah Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Nonformal										
			Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Informal di Kelompok Kegiatan Masyarakat Binaan	DPPKBPPA	Jumlah Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Informal di Kelompok Kegiatan Masyarakat Binaan										
			Advokasi Tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan	DPPKBPPA	Jumlah Advokasi Tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan										
			Sosialisasi Tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan	DPPKBPPA	Jumlah Sosialisasi Tentang Pemanfaatan										

No	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan								
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan			Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan			Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan dana	Catatan penting
			Beserta Model Solusi Strategis sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan Kepada Pemangku Kepentingan		Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan Kepada Pemangku Kepentingan										
			Pelaksanaan Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga	DPPKBPPA	Jumlah sarasehan hasil Pemutakhiran Basis Data Keluarga	1 kali	109.373.000								
			Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program KKBPK	DPPKBPPA	Jumlah Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program KKBPK										
			Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota		Persentase pemetaan perkiraan pengendalian penduduk		135.000.000			Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota		Persentase pemetaan perkiraan pengendalian penduduk	60 %	175,443,600	
			Perumusan Parameter Kependudukan	DPPKBPPA	Jumlah dokumen perumusan kependudukan										

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan						
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan dana	Catatan penting	
		Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan	DPPKBPPA	Jumlah dokumen data kependudukan								
		Penyusunan Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	DPPKBPPA	Jumlah dokumen Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga								
		Pemetaan Kependudukan	DPPKBPPA	Jumlah Pemetaan Kependudukan								
		Penyusunan Kajian Dampak Kependudukan	DPPKBPPA	Jumlah Penyusunan Kajian Dampak Kependudukan								
		Pengembangan Model Solusi Strategis Pengendalian Dampak Kependudukan	DPPKBPPA	Jumlah dokumen Pengembangan Model Solusi Strategis Pengendalian Dampak Kependudukan								
		Pengukuran dan Perhitungan Indikator Kerentanan Dampak Kependudukan (Early		Jumlah dokumen Pengukuran dan Perhitungan								

No	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan								
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan			Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan			Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan dana	Catatan penting
			Warning System/Peringatan Dini)		Indikator Kerentanan Dampak Kependudukan (Early Warning System/Peringatan Dini)										
			Membentuk Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program KKBPK di Sektor Lain	DPPKBPPA	Jumlah Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program KKBPK di Sektor Lain yang terbentuk										
			Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	DPPKBPPA	Jumlah lokasi Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga										
			Pemanfaatan Data Hasil Pemutakhiran Data Keluarga	DPPKBPPA	Jumlah dokumen Data Hasil Pemutakhiran Data Keluarga										
			Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	DPPKBPPA	Jumlah dokumen Penyediaan Data dan	1 dok	10.000.000				DPPKBPPA	Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang	30 Dokumen	50.032.000	

No	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan								
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan			Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan			Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan dana	Catatan penting
					Informasi Keluarga					Penyediaan Data dan Informasi Keluarga		Tersedianya			
			Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	DPPKBPPA	Jumlah dokumen Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	1 dok	125.000.000								
			Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	DPPKBPPA	Jumlah Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB					Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	DPPKBPPA	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	79 Dokumen	125,411,600	
			Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program KKBPK	DPPKBPPA	Jumlah lokasi Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program KKBPK										
	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)				Persentase CPR (Contraceptive Prevalence Rate)	74,30%	8.450.860.097	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)				Persentase CPR (Contraceptive Prevalence Rate)	74,30 %	2,989,928,480	
		Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal			Persentase promosi KKBPK terhadap keluarga dan kampung KB	62,30%	4.267.282.857		Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya			Persentase promosi KKBPK terhadap keluarga dan kampung KB	63 %	1,309,972,780	

No	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan								
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan			Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan			Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan dana	Catatan penting
								Lokal							
			Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	DPPKBPPA	Jumlah pertemuan advokasi/KIE kepada stakeholder	13 kali	75.685.280			Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	DPPKBPPA	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	12 organisasi	4.375.000	
			Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK Sesuai Kearifan Budaya Lokal	DPPKBPPA	Jumlah lokasi penyuluhan advokasi dan promosi program KKBPK	13 Kecamatan	737.151.250			Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK Sesuai Kearifan Budaya Lokal	DPPKBPPA	Jumlah Dokumen Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Sesuai Kearifan Budaya Lokal	13 Dokumen	25,000,000	
			Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program KKBPK	DPPKBPPA	Jumlah pembuatan pamflet, lembar balik KKBPK	13 paket	55.000.000								

No	Rancangan Awal RKPД						Hasil Analisis Kebutuhan								
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan			Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan			Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan dana	Catatan penting
			Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	DPPKBPPA	Jumlah promosi KKBPK di radio	4 kali	55.000.000			Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	DPPKBPPA	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	316 Dokumen	70,640,000	
			Penggunaan Media Massa Cetak, Elektronik dan Media Lainnya sesuai Kearifan Budaya Lokal Dalam Pencitraan Program KKBPK	DPPKBPPA	Jumlah media massa cetak Elektronik dan Media Lainnya sesuai Kearifan Budaya Lokal Dalam Pencitraan Program KKBPK										
			Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	DPPKBPPA	Jumlah Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	4 kali	200.000.000			Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	DPPKBPPA	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	105 Laporan	202.800.000	

No	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan								
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan			Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan			Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan dana	Catatan penting
											Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)				
			Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	DPPKBPPA	Jumlah pengadaan sarana dan pra sarana Balai Penyuluhan KKBPK	1 Kegiatan	2.737.002.180			Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	DPPKBPPA	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	13 Laporan	967,157,780	
			Pengendalian Program KKBPK	DPPKBPPA	Jumlah kegiatan pertemuan di kabupaten dan kecamatan	14 kali	407.444.147			Pengendalian Program KKBPK	DPPKBPPA	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK	246 Laporan	40,000,000	
			Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/ Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)		Cakupan PKB yang didayagunakan	37,71%	1.342.355.960			Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/ Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)		Cakupan PKB yang didayagunakan	37,71%	483,200,000	
			Pembinaan IMP dan Program KKBPK di Lini Lapangan oleh	DPPKBPPA	Jumlah lokasi Pembinaan IMP dan Program KKBPK di Lini Lapangan oleh										

No	Rancangan Awal RKPД						Hasil Analisis Kebutuhan								
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan			Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan			Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan dana	Catatan penting
			PKB/PLKB		PKB/PLKB										
			Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB	DPPKBPPA	Jumlah paket Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB										
			Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPК untuk Petugas Keluarga Berencana/ Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	DPPKBPPA	Jumlah pertemuan dalam rangka Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPК untuk Petugas Keluarga Berencana/ Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)										
			Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	DPPKBPPA	Jumlah bulan operasional kader PPKBN dan PPKBJ Jumlah pertemuan peningkatan kapasitas kader	12 bulan 12 kali	1.342.355.960			Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	DPPKBPPA	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	716 Orang	483.200,000	

No	Rancangan Awal RKP					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan dana	Catatan penting
	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi Serta Pelaksanaan Pelayanan KB Di Daerah Kabupaten/Kota		Persentase penggunaan kontrasepsi jangka panjang	26,7%	1.497.483.780	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi Serta Pelaksanaan Pelayanan KB Di Daerah Kabupaten/Kota		Persentase penggunaan kontrasepsi jangka panjang	26.7 %	676,835,700	
	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	DPPKBPPA	Jumlah fasilitas kesehatan yang mendapat distribusi alokon	37 Faskes	84.283.080	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	DPPKBPPA	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	37 Laporan	89.410.100	
	Peningkatan Kompetensi Pengelola dan Petugas Logistik Alat dan Obat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang Pelayanan KB	DPPKBPPA	jumlah pertemuan dan sosialisasi dengan bidan klinik dan PKB	2 kali	83.485.500						
	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	DPPKBPPA	Jumlah pelayanan KB MKJP	13 kecamatan	1.021.465.200	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	DPPKBPPA	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang	11079 Orang 13 Kecamatan	534,834,200	

No	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan								
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan			Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan			Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan dana	Catatan penting
											(MKJP)				
			Penyediaan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP	DPPKBPPA	Jumlah Penyediaan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP										
			Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang	DPPKBPPA	Jumlah fasilitasi kesehatan yang mendapat distribusi	37 Faskes	100.000.000								
			Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	DPPKBPPA	Tersedianya sarana penunjang pelayanan KB	37 paket	20.000.000								
			Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KB	DPPKBPPA	Jumlah pembinaan bagi peserta KB	5 kali	14.250.000								
			Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya	DPPKBPPA	Jumlah sosialisasi KB dan kesehatan reproduksi di faskes	13 kali	100.000.000			Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya	DPPKBPPA	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan	13 Laporan	52.591.400	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan dana	Catatan penting
								Jejarangnya			
		Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan	DPPKBPPA	Jumlah lokasi Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan							
		Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	DPPKBPPA	Jumlah pelatihan Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi							
		Dukungan Operasional Pelayanan Bergerak KB	DPPKBPPA	Jumlah pelayanan KB bergerak dengan mobil pelayanan							
		Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan dan Pasca Keguguran	DPPKBPPA	Jumlah sosialisasi KB pasca persalinan							

No	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan								
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan			Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan			Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan dana	Catatan penting
			Peningkatan Kesertaan KB Pria	DPPKBPPA	Jumlah sosialisasi KB pria										
			Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Masyarakat Tingkat Daerah Kabupaten / Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB		Persentase organisasi masyarakat yang berperan di kampung KB	55%	1.343.737.500			Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Masyarakat Tingkat Daerah Kabupaten / Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB		Persentase organisasi masyarakat yang berperan di kampung KB	55%	519.920,000	
			Penguatan Peran serta Organisasi Masyarakat dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	DPPKBPPA	Jumlah pertemuan Organisasi Masyarakat dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB										
			Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	DPPKBPPA	Jumlah pertemuan dengan lintas sektor di Kampung KB	28 kali	98.857.500								
			Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	DPPKBPPA	Jumlah pertemuan dan sosialisasi KKBPK di Kampung KB	28 kali	1.244.880.000			Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	DPPKBPPA	Jumlah Kampung KB yang Mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana	27 Kampung	519.920,000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan									
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan			Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan			Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan dana	Catatan penting
											(Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Kampung KB				
			Pembinaan Terpadu Kampung KB	DPPKBPPA	Jumlah lokasi pembinaan terpadu kampung KB										
	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)				Total Fertility Rate (TFR)	2,22	2.567.635.900	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)				Total Fertilty Rate (TFR)	2,22 .	1,966,068,000	
		Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga			Persentase keluarga aktif mengikuti kegiatan tribina	77%	2.559.814.900		Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga			Persentase keluarga aktif mengikuti kegiatan tribina	77 %	1,966,068,000	
		Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan		DPPKBPPA	Jumlah lokasi Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit										

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan									
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan			Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan			Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan dana	Catatan penting
			Ekonomi Keluarga)		Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)										
			Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	DPPKBPPA	Jumlah paket Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)										
			Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	DPPKBPPA	Jumlah Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi										

No	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan								
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan			Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan			Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan dana	Catatan penting
					Keluarga/UPPKS)										
			Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	DPPKBPPA	Jumlah orientasi/pelatihan teknis pelaksana/kader BKB,BKR,BKL,PIK R dan UPPKAS	13 Kecamatan	127.352.500								
			Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	DPPKBPPA	Jumlah kecamatan yang disediakan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	13 Kecamatan	1.739.330.400			Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	DPPKBPPA	Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	39366 Orang	1.787.540.000	

No	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan							
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan			Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan		Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan dana	Catatan penting
									Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	DPPKBPPA	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	1200 Keluarga	178,528,000	
			Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	DPPKBPPA	Jumlah kecamatan yang disediakan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)									
			Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan	DPPKBPPA	Jumlah Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB,									

No	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan								
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan			Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan			Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan dana	Catatan penting
			Ekonomi Keluarga/UPPKS)		BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)										
			Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	DPPKBPPA	Jumlah promosi dan sosialisasi kelompok kegiatan Menjadi Orang Tua Hebat, Genre, Kelanjutusiaan dan Pengelolaan Keuangan keluarga	5 kegiatan	693.132.000								
			Penyerasian Kebijakan dalam Pelaksanaan Program yang Mendukung Tercapainya IPK	DPPKBPPA	Jumlah pertemuan Koordinasi BKB Holistik Integratif										
			Penyediaan dan Pengembangan Materi IPK	DPPKBPPA	Jumlah dokumen pengembangan materi IPK										

No	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan								
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan			Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan			Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan dana	Catatan penting
			Advokasi dan Promosi IPK	DPPKBPPA	Jumlah Advokasi dan Promosi IPK										
			Sosialisasi IPK	DPPKBPPA	Jumlah Sosialisasi IPK										
			Pelaksanaan Koordinasi Evaluasi Pencapaian IPK	DPPKBPPA	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi Evaluasi Pencapaian IPK										
			Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Masyarakat Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga		Persentase organisasi masyarakat yang berperan dalam pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga	100%	7.821.000								
			Penguatan Kebijakan Daerah dalam Rangka Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Masyarakat dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	DPPKBPPA	Jumlah kebijakan daerah dalam pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga melalui kelompok BKB, BKR, BKL dan PIK R Terintegrasi		7.821.000								

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan									
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan			Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan			Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan dana	Catatan penting
			(BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)												
			Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	DPPKBPPA	Jumlah mitra kerja dan organisasi kemasyarakatan dalam penggerakan operasional pembinaan program ketahanan dan kesejahteraan keluarga										
			Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	DPPKBPPA	Jumlah pelatihan peningkatan kapasitas mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga										
			Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan	DPPKBPPA	Jumlah dan Sosialisasi Program										

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan									
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan			Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan			Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan dana	Catatan penting
			Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja		Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja										
						20.554.154.990							10,094,904,803		

Dari Tabel diatas dapat dijelaskan bahwa berdasarkan analisis kebutuhan rancangan awal Rencana Kerja DPPKBPPPA, maka ada tambahan 2 sub kegiatan dalam rangka sinergisitas dengan 10 program pokok PKK dan dalam rangka mengakomodir program provinsi.

Sub Kegiatan tersebut adalah Penyusunan dan pemanfaatan Grand Design Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten / Kota dan Sub Kegiatan Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas.

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam menyusun Renja Perangkat Daerah, salah satu tahapan proses yang tidak boleh diabaikan adalah menampung usulan program dan kegiatan yang berasal dari bawah atau aspirasi masyarakat. Hal ini sangat penting dilaksanakan karena pada hakekatnya masyarakatlah yang akan menjadi penerima manfaat dari pogram dan kegiatan kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah.

Sebagai salah satu Perangkat Daerah dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berupaya semaksimal mungkin untuk menampung aspirasi masyarakat dengan berbagai cara dan dalam berbagai kesempatan, termasuk salah satunya melalui masukan dari hasil pelaksanaan Musrenbang, baik di tingkat nagari, kecamatan maupun di tingkat kabupaten. Renja DPPKBPPPA Tahun 2023 juga mengakomodir Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) Anggota DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota.

Aspirasi masyarakat akan menjadi perhatian serius DPPKBPPPA dalam pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2023. Suatu langkah penting yang harus diambil adalah kembali menata dan menyusun berbagai peraturan yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan sehingga program dan kegiatan DPPKPPPA dapat dijalankan dengan tertib,

terarah, efektif dan efisien. Secara umum program dan kegiatan yang dituangkan dalam Rencana Kerja Perubahan DPPKBPPA Tahun 2023 ini sudah menampung dan mengakomodir hasil usulan pemangku kepentingan/masyarakat.

Tabel 2.5
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan
Tahun 2023

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
I	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan				
I.I	Kegiatan Pelembagaan PUG pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kab/Kota				
I.I.I	Sub Kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	DPPKBPPA	Jumlah Perangkat Daerah yang mendapat advokasi kebijakan dan pendampingan pelaksanaan PUG termasuk perencanaan pembangunan responsif gender (PPRG) kewenangan Kabupaten / Kota	43 PD	Reses Musrenbang
I.II	Kegiatan Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi				

	Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota				
I.II.I	Sub Kegiatan Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	DPPKBPP A	Jumlah dokumen hasil sosialisasi peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, Sosial dan ekonomi kewenangan kabupaten / kota	10 dok	Reses Musrenban g

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional, Provinsi Sumatera Barat dan Kabupaten Lima Puluh Kota

a. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Arah kebijakan pembangunan nasional merupakan pedoman untuk merumuskan permasalahan, prioritas dan sasaran serta rencana program pembangunan daerah. Keberhasilan pembangunan nasional adalah keberhasilan dari semua prioritas dan program pembangunan yang dilaksanakan secara nyata oleh semua pemangku kepentingan.

Prioritas pembangunan disusun sebagai penjabaran operasional dari Strategi Pembangunan yang digariskan dalam RPJMN 2015-2019 dalam upaya melaksanakan Agenda Pembangunan Nasional untuk memenuhi Nawa Cita, yaitu :

- Cita 1 : Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara ;
- Cita 2 : Mengembangkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya ;
- Cita 3 : Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan ;
- Cita 4 : Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya ;
- Cita 5 : Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia ;
- Cita 6 : Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional ;
- Cita 7 : Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategi ekonomi domestik;
- Cita 8 : Melakukan revolusi karakter bangsa ; dan

Cita 9 : Memperteguh kebhinnekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

b. Telaahan terhadap Kebijakan Provinsi Sumatera Barat

Kabupaten Lima Puluh Kota merupakan bagian dari Provinsi Sumatera Barat. Oleh karena itu keberhasilan pembangunan Sumatera Barat juga sangat dipengaruhi oleh keberhasilan pembangunan di Kabupaten Lima Puluh Kota. Untuk itu, pembangunan di Kabupaten Lima Puluh Kota harus bisa disinkronkan dengan pembangunan di Provinsi Sumatera Barat. Berdasarkan hal tersebut, maka dalam penyusunan renja ini, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak perlu melakukan telaahan terhadap kebijakan yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

c. Telaahan terhadap Kebijakan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota

Kebijakan yang akan dituangkan dalam Renja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ini mengacu dan mempedomani RKPD Kabupaten Lima Puluh Kota yang telah ditetapkan melalui Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 36 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

a. Telaahan terhadap Renstra DPPKBPPPA Tahun 2021 - 2026

Visi dan misi Kepala Daerah terpilih sebagaimana yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2021-2026 adalah:

**“MEWUJUDKAN LIMA PULUH KOTA YANG MADANI, BERADAT DAN
BERBUDAYA DALAM KERANGKA ADAT BASANDI SYARAK,
SYARAK BASANDI KITABULLAH ”**

Adapun misi pembangunan sebagai penjabaran visi tersebut sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berbudaya dan berdaya saing berlandaskan keimanan;
 2. Mendorong pertumbuhan dan perkembangan ekonomi lintas sektoral yang memiliki keunggulan ditingkat lokal dan regional;
 3. Mendorong potensi nagari sebagai poros pembangunan daerah;
 4. Meningkatkan kualitas layanan publik melalui reformasi birokrasi seutuhnya;
 5. Meningkatkan pembangunan infrastruktur secara terpadu yang mendorong pertumbuhan ekonomi dan kualitas kehidupan masyarakat yang lebih baik;
- b. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2023.

Selain merupakan penjabaran Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak maka Renja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tahun 2023 juga merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2023. Dalam merumuskan tujuan dan sasaran Renja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak maka berdasarkan RKPD tersebut diformulasikan permasalahan terkait dengan urusan pemerintahan daerah yang merupakan kewenangan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Permasalahan-

permasalahan tersebut adalah sebagai berikut :

- I. Permasalahan pada urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana
 1. Pemahaman tentang kontrasepsi MKJP masih rendah, sedangkan pemahaman kontrasepsi suntik masih sangat tinggi
 2. Pencapaian CPR tinggi tetapi tidak diiringi dengan penurunan TFR
 3. Jasa medis pemasangan IUD implant bagi peserta JKN belum berjalan dengan semestinya.
 4. Belum semua sekolah mendukung kegiatan PIK remaja.
 5. Masih lemahnya pencatatan dan pelaporan ditingkat kecamatan dalam hal ketepatan waktu dan akurasi serta analisis data
 6. Terbatasnya jumlah dan kualitas tenaga penyuluh KB di lapangan;
 7. Banyaknya kasus² kesehatan reproduksi di masyarakat,
 8. Pengetahuan kader BKB, BKR, dan BKL masih rendah
 9. Pemahaman masyarakat tentang kelompok BKB, BKR, dan BKL masih rendah
 10. Jumlah kader IMP (PPKBN/PPKBJ) masih kurang, terutama di daerah padat penduduk
 11. Standar Anggaran Biaya untuk biaya operasional PPKBN/PPKBJ masih rendah
 12. Operasional kader BKB, BKR, BKL dan UPPKS tidak ada
 13. Pemahaman masyarakat tentang 8 fungsi keluarga masih kurang
 14. Kurangnya sarana BKB Kit dan Kartu Kembang Anak
- II. Permasalahan pada urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
 1. Perempuan kurang memiliki kesempatan dan peran dalam pengambilan keputusan, sehingga manfaat yang diperoleh perempuan belum bisa disetarakan dengan kaum laki-laki, yang

mengakibatkan fenomena kesenjangan gender di Kabupaten Lima Puluh kota

2. Upaya fasilitasi peningkatan kualitas SDM SKPD dalam rangka penyusunan rencana dan anggaran yang responsive gender, masih rendah
3. Masih rendahnya pemahaman eksekutif maupun legislatif tentang PUG dan Pemberdayaan Perempuan sebagai suatu strategi pembangunan, yang menentukan keberhasilan pembangunan di segala bidang
4. Belum maksimalnya pelaksanaan program dan kegiatan menuju keadilan dan kesetaraan gender.
5. Semua SDM yang terlibat kegiatan PUG belum dilatih pelatihan pemantapan tupoksi pokja PUG, focal point, pelatihan PPRG maupun penyusunan GAP dan GBS.
6. Terbatasnya alokasi dana yang ada di kabupaten untuk pelaksanaan program dan kegiatan PUG.
7. Semakin menipisnya perilaku masyarakat yang mencerminkan adat dan budaya Minangkabau terutama puti bungsu (remaja putri) dan rang mudo
8. Kemiskinan rumah tangga menjadi faktor penyebab terjadinya KDRT
9. Belum maksimalnya penataan administrasi organisasi perempuan
10. Rendahnya wawasan organisasi perempuan untuk mengangkat kualitas hidup perempuan.
11. Masih tingginya tingkat kekerasan pada perempuan dan anak (Pada tahun 2021 terdapat 94 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak)
12. Belum tersedianya shelter (rumah aman) bagi korban tindak kekerasan

Berdasarkan permasalahan pada kedua urusan pemerintahan yang dilaksanakan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagaimana tersebut di atas maka ditetapkanlah tujuan dan sasaran Renja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2023 sebagai berikut :

A. Tujuan

1. Meningkatkan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
2. Meningkatkan keluarga berencana dan keluarga sejahtera
3. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan publik

B. Sasaran :

C. Meningkatnya kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan

D. Meningkatnya perlindungan perempuan dan anak

1. Meningkatnya kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan
2. Meningkatnya perlindungan perempuan dan anak
3. Meningkatnya Pengendalian Laju Pertumbuhan Penduduk
4. Meningkatnya kualitas dan kuantitas kinerja dan pelayanan perangkat daerah

3.3 Program dan Kegiatan

Penetapan program dan kegiatan DPPKBPPPA untuk Rencana Kerja DPPKBPPPA Tahun 2023 mengacu kepada program dan kegiatan yang ada dalam Renstra DPPKBPPPA Tahun 2021-2026. Adapun pencantuman nomenklatur program dan kegiatan mengacu kepada

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, sebagaimana dapat dilihat pada tabel-tabel berikut :

Tabel 3.1.
Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Lingkup Urusan Pembedayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
I	Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan		
		1. Pelembagaan PUG pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kab/Kota	
			1. Koordinasi dan sinkronisasi perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG
			2. Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG
			3. Sosialisasi kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG
		2. Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	
			4. Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi
		3. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan	

		Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	
			5. Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota
II	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN		
		4. Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	
			6. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
			7. Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota
		5. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
			8. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota
III	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK		
		6. Pengumpulan,	

		Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/kota	
			9. Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota
			10. Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota
IV	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)		
		7. Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	
			11. Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota
			12. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
		8. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	
			13. Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup

			Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
			14. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
			15. Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
V	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK		
		9. Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	
			16. Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
		10. Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
			17. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota
		11. Penguatan dan Pengembangan Lembaga	

		Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
			18. Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Berdasarkan Tabel diatas dapat disimpulkan yaitu Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada Tahun 2023 akan melaksanakan 5 Program, 11 Kegiatan dan 18 Sub Kegiatan urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Ringkasan program, kegiatan dan sub kegiatan penunjang urusan Pemerintah Daerah dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.2.
Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
I.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		
		1. Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
			1. Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah
			2. Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat

			Daerah dalam Dokumen Perencanaan
			3. Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah
			4. Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah
			5. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
		2. Administrasi Keuangan	
			6. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
			7. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
			8. Penyiapan Bahan Pelaksanaan Verifikasi
			9. Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
			10. Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
			11. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
			12. Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran
			13. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
		3. Administrasi Umum	
			14. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
			15. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
			16. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
			17. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
			18. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
			19. Penyediaan Alat Tulis Kantor
			20. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
			21. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
			22. Penyediaan Makanan dan Minuman

			23. Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
			24. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
			25. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
			26. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
			27. Pengadaan Mebeleur
			28. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
			29. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
			30. Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor
		4. Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	
			31. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
			32. Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu
			33. Pendidikan dan Pelatihan Formal

Berdasarkan Tabel diatas dapat disimpulkan yaitu Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada Tahun 2023 akan melaksanakan 1 Program, 4 Kegiatan dan 33 Sub Kegiatan penunjang urusan pemerintahan daerah.

Tabel 3.3.
Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Lingkup Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
I.	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK		
		1. Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah	

		Daerah Provinsi Dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Dalam Rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	
			1. Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota terhadap Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (Program KKBPK)
II.	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)		
		2. Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	
			2. Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK Sesuai Kearifan Budaya Lokal
			3. Pengelolaan operasional dan sarana di balai penyuluhan KKBPK
			4. Pengendalian Program KKBPK
		3. Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/ Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	
			5. Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)
		4. Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi Serta Pelaksanaan Pelayanan KB Di Daerah Kabupaten/Kota	

			6. Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)
			7. Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB
III.	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)		
		5. Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	
			8. Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)
			9. Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan Serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)
			10. Penyerasian Kebijakan Dalam Pelaksanaan Program yang Mendukung Tercapainya IPK
			11. Penumbuhan dan peningkatan kesadaran keluarga dalam keterlibatan perencanaan kehidupan menuju keluarga berkualitas

Berdasarkan Tabel diatas dapat disimpulkan yaitu Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan Anak pada Tahun 2023 akan melaksanakan 3 Program, 5 Kegiatan dan 10 Sub Kegiatan urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

T-B.36

Identifikasi Permasalahan untuk Penentuan Program Prioritas Kabupaten Lima Puluh Kota

No	Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Interpretasi Belum Tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)	Permasalahan	Faktor-faktor Penentu Keberhasilan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

Pendanaan program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada tahun 2023 serta prakiraan maju tahun 2023 dapat dilihat pada Tabel 4.4 berikut ini :

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Penetapan program dan kegiatan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tahun 2022 mengacu kepada program dan kegiatan yang ada dalam Rancangan Awal Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tahun 2021-2026. Adapun pencantuman nomenklatur program dan kegiatan mengacu pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor. 050.5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Berkaitan dengan hal tersebut diatas, maka program dan kegiatan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dikelompokkan ke dalam 3 bagian, yaitu program dan kegiatan pada setiap Perangkat Daerah yang merupakan program dan kegiatan yang bersifat rutin, dan program kegiatan yang terkait dengan urusan pemerintahan daerah. Urusan yang dilaksanakan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak meliputi : Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana serta urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor : 476/22/DPPKBPPPA-LK/IX/2021 Tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 – 2026, berikut ini adalah tabel rencana target IKU DPPKBPPPA.

Tabel 4.1
Rencana Target Kinerja IKU DPPKBPPPA

No	Sasaran	Indikator	Target		Ket
			2022	2023	
1.	Meningkatnya kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	95,80%	95,85%	IKU OPD
2.	Meningkatnya perlindungan perempuan dan anak	Rasio kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	0,0036	0,0029	IKU OPD
		Rasio kekerasan terhadap anak	0,0036	0,0029	IKU OPD
3.	Meningkatnya Pengendalian Laju Pertumbuhan Penduduk	Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	1,25	1,20	IKU OPD
4.	Meningkatnya kualitas dan kuantitas kinerja dan pelayanan perangkat daerah	Nilai AKIP	68	69	IKU OPD
		Nilai IRB	16	16	
		Nilai IKM	85	85	

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa sasaran Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak terdiri dari 4 sasaran dengan 7 indikator, yaitu :

1. Meningkatnya kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan

Dengan indikator :

- Indeks Pembangunan Gender (IPG)

2. Meningkatnya perlindungan perempuan dan anak

Dengan indikator :

- Rasio kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)
- Rasio kekerasan terhadap anak

3. Meningkatnya Pengendalian Laju Pertumbuhan Penduduk
 - Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)
4. Meningkatnya kualitas dan kuantitas kinerja dan pelayanan perangkat daerah

Dengan indikator :

- Nilai AKIP
- Nilai IRB
- Nilai IKM

Rencana kinerja pelayanan perangkat daerah tahun Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 4.2
Rencana Target Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Tahun 2023

No	Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Satuan	Target		Ket
			2022	2023	
1.	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak				
1.1	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	%	8,19	8,59	
1.2	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPRD	%	8,57	8,57	
1.3	Rasio KDRT		0,004	0,004	
1.4	Partisipasi angkatan kerja perempuan		42000	45000	
1.5	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu	%	100	100	
1.6	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu tatalaksana KtP/A danPPT/PKT di Rumah	%	100	100	

	Sakit				
1.7	Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu	%	100	100	
1.8	Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	%	100	100	
1.9	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum	%	100	100	
1.10	Cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan	%	100	100	
1.11	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)		0,0036	0,0029	
1.12	Persentase ARG (Anggaran Responsif Gender pada belanja langsung APBD)	%	5,06	5,06	
2.	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana				
2.1	Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I	%	3,9	3,7	
2.2	Laju pertumbuhan penduduk (LPP)		1,25	1,20	
2.3	Total Fertility Rate (TFR)	%	2,24	2,22	
2.4	Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang berperan aktif dalam pembangunan Daerah melalui Kampung KB	%	50	55	
2.5	Ratio Akseptor KB	1 : 6	1 : 6		
2.6	Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15 - 49	73,5	74,3		
2.7	Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15-19) per 1.000 perempuan usia 15 ² 19 tahun (ASFR 15-19)	23	23		
2.8	Cakupan Pasangan Usia Subur	%	0,7	0,6	

	(PUS) yang istrinya dibawah 20 tahun				
2.9	Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need)	%	10,1	9,1	
2.10	Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	%	26,3	26,7	
2.11	Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB	%	75	77	
2.12	Cakupan anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB	%	75	77	
2.13	Cakupan anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB	%	80	82	
2.14	Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di setiap Kecamatan	Jumlah	2	5	
2.15	Cakupan PKB/PLKB yang di dayagunakan Perangkat Daerah KB untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di bidang pengendalian penduduk	%	76	76	
2.16	Cakupan PUS peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB mandiri	%	65	65	
2.17	Rasio petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) setiap desa/kelurahan		1 : 1,3	1 : 1,2	
2.18	Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat	%	100	100	
2.19	Persentase Faskes dan jejaringnya (diseluruh tingkatan wilayah) yang bekerjasama dengan BPJS dan memberikan pelayanan KBKR sesuai dengan standarisasi pelayanan	%	100	100	
2.20	Cakupan penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga di setiap desa	%	100	100	
2.21	Cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga	%	60	65	

	melalui 8 fungsi Keluarga				
2.22	Cakupan keluarga yang mempunyai balitadan anak yang memahami dan melaksanakan pengasuhan dan pembinaan tumbuhkembang anak	%	60	65	
2.23	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	%	73,5	74,3	

Sedangkan kebutuhan pendanaan berdasarkan urusan dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 4.3

Rencana Kebutuhan Pendanaan berdasarkan Urusan, Jumlah Program dan Kegiatan Tahun 2023

No	Bidang Urusan	Tahun 2023		Tahun 2024	Tahun 2023		Tahun 2024	Ket
		Program		Pagu Indikatif (Rp)	Kegiatan		Pagu Indikatif (Rp)	
		Jml	Total Pagu (Rp)		Jumlah	Total Pagu (Rp)		
1.	Program Penunjang Pemerintah Daerah	1	4.118.358.934	4.418.560.000	7 (26 sub keg)	5.085.900.366	5.585.124.510	
2.	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	5	2.257.256.500	3.488.400.997	12 (20 sub keg)	2.257.256.500	3.488.400.997	
3.	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	3	5.019.671.700	6.469.271.600	6 (14 sub keg)	5.019.671.700	6.469.271.600	
	Total	9	11.395.287.134	14.376.232.597	25 (60 sub keg)	11.395.287.134	14.376.232.597	

Dari Tabel di atas dapat dijelaskan bahwa pada tahun 2023 berdasarkan pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor. 050.5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, Rencana Kerja DPPKBPPPA terdiri dari : 9 Program, 25 Kegiatan dan 60 Sub Kegiatan, dengan alokasi dana sebesar Rp. 11.395.287.134, termasuk didalamnya penyediaan gaji dan tunjangan ASN.

Sedangkan pendanaan program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada Tahun 2022 serta prakiraan maju tahun 2023 dapat dilihat pada table 4.4 berikut ini :

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Lima Puluh Kota
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 2.14.2.08.0.00.08.0000 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Sub Unit Organisasi : 2.14.2.08.0.00.08.0000 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024									
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)						
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target							
2																				
					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR															
2	08				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK					1,514,146,500										3,088,730,450
2	08	02			PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN					850,432,400										996,971,950
2	08	02	2.01		Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota					281,446,400										279,106,500
2	08	02	2.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pengarusutamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase peningkatan percepatan PUG melalui PPRG di Perangkat Daerah	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	95,85 %	20 Dokumen	80.8 %	101,998,100	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Pembangunan Gender (IPG)	95,85 %		138,541,000	
2	08	02	2.01	03	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase peningkatan percepatan PUG melalui PPRG di Perangkat Daerah	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	95,85 %	43 Perangkat Daerah	80.8 %	138,057,800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Pembangunan Gender (IPG)	95,85 %		52,565,500	
2	08	02	2.01	04	Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG Termasuk PPRG	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase peningkatan percepatan PUG melalui PPRG di Perangkat Daerah	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	95,85 %	43 Perangkat Daerah	80.8 %	41,390,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Pembangunan Gender (IPG)	95,85 %		88,000,000	
2	08	02	2.02		Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota					421,786,000										660,934,700
2	08	02	2.02	01	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase organisasi perempuan yang berpartisipasi dibidang politik, hukum, sosial dan ekonomi	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	95,85 %	10 Dokumen	64 %	421,786,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Pembangunan Gender (IPG)	95,85 %		660,934,700	
2	08	02	2.03		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota					147,200,000										56,930,750
2	08	02	2.03	03	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia	Persentase perempuan yang mendapatkan pemberdayaan ekonomi	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	95,85 %	10 Dokumen	75 %	147,200,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Indeks Pembangunan Gender (IPG)	95,85 %		56,930,750	
2	08	03			PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN					149,878,000										808,491,000
2	08	03	2.01		Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota					92,787,000										208,491,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Lima Puluh Kota
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 2.14.2.08.0.00.08.0000 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Sub Unit Organisasi : 2.14.2.08.0.00.08.0000 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2.08.03.2.01.02	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Cakupan perempuan korban kekerasan yang mendapatkan pelayanan pada unit layanan terpadu	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Rasio KDRT	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	43 Perangkat Daerah	0.0029	92,787,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan perempuan korban kekerasan yang mendapatkan pelayanan pada unit layanan terpadu	100 %	108,491,000
2.08.03.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								57,091,000					350,000,000
2.08.03.2.03.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Cakupan perempuan korban kekerasan yang mendapatkan pelayanan pada unit layanan terpadu	Jumlah sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	Persentase lembaga layanan yang terlatih	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	30 Orang	100 %	57,091,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan perempuan korban kekerasan yang mendapatkan pelayanan pada unit layanan terpadu	100 %	350,000,000
2.08.04	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA								13,714,000					173,267,500
2.08.04.2.01	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								13,714,000					173,267,500
2.08.04.2.01.03	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan lima pilar indikator ketahanan keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan Kesetaraan gender dan hak anak	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50 %	20 Laporan	50 %	13,714,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase pemenuhan lima pilar indikator ketahanan keluarga	50 %	173,267,500
2.08.05	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK								102,687,700					110,000,000
2.08.05.2.01	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								102,687,700					110,000,000
2.08.05.2.01.01	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Informasi Layak Anak	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia	Jumlah media informasi	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	2 Dokumen	3 buah	45,490,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Informasi Layak Anak	100 %	60,000,000
2.08.05.2.01.02	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Informasi Layak Anak	Jumlah Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah media informasi	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	3 buah	57,197,700	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Informasi Layak Anak	100 %	50,000,000
2.08.06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)								97,312,500					250,000,000
2.08.06.2.01	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota								97,312,500					250,000,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Lima Puluh Kota
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 2.14.2.08.0.00.08.0000 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Sub Unit Organisasi : 2.14.2.08.0.00.08.0000 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2.08.06.2.01.01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Tingkat Capaian Kabupaten Layak Anak	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	Persentase Kecamatan Layak Anak	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nindya -	2 Organisasi	80 %	51,750,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Tingkat Capaian Kabupaten Layak Anak	Nindya -	150,000,000
2.08.06.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Tingkat Capaian Kabupaten Layak Anak	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Kecamatan Layak Anak	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nindya -	5 Dokumen	80 %	45,562,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Tingkat Capaian Kabupaten Layak Anak	Nindya -	100,000,000
2.08.07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK								300,121,900					750,000,000
2.08.07.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota								106,317,300					300,000,000
2.08.07.2.01.01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Cakupan anak korban kekerasan yang mendapatkan pelayanan pada unit layanan terpadu	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase penurunan kekerasan terhadap anak	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	43 Perangkat Daerah	0.067 %	58,843,300	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan anak korban kekerasan yang mendapatkan pelayanan pada unit layanan terpadu	100 %	150,000,000
2.08.07.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Cakupan anak korban kekerasan yang mendapatkan pelayanan pada unit layanan terpadu	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase penurunan kekerasan terhadap anak	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	32 Dokumen	0.067 %	47,474,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan anak korban kekerasan yang mendapatkan pelayanan pada unit layanan terpadu	100 %	150,000,000
2.08.07.2.02	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								140,066,000					200,000,000
2.08.07.2.02.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Cakupan anak korban kekerasan yang mendapatkan pelayanan pada unit layanan terpadu	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase penyediaan lembaga layanan	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	90 Layanan	100 %	140,066,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan anak korban kekerasan yang mendapatkan pelayanan pada unit layanan terpadu	100 %	200,000,000
2.08.07.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								53,738,600					250,000,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Lima Puluh Kota
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 2.14.2.08.0.00.08.0000 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Sub Unit Organisasi : 2.14.2.08.0.00.08.0000 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2 08 07 2.03 03	Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan anak korban kekerasan yang mendapatkan pelayanan pada unit layanan terpadu	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase penyediaan lembaga layanan	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	25 Dokumen	100 %	53,738,600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan anak korban kekerasan yang mendapatkan pelayanan pada unit layanan terpadu	100 %	250,000,000
2 14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA								8,580,758,303				10,428,222,500	
2 14 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								3,351,940,223				4,418,560,000	
2 14 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								23,092,500				25,500,000	
2 14 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan program penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase sinergisitas perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	95 %	2 Dokumen	95 %	9,114,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pelaksanaan program penunjang urusan pemerintah daerah	95 %	5,000,000
2 14 01 2.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Persentase pelaksanaan program penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Persentase sinergisitas perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	95 %	2 Dokumen	95 %	3,753,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pelaksanaan program penunjang urusan pemerintah daerah	95 %	3,000,000
2 14 01 2.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Persentase pelaksanaan program penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Persentase sinergisitas perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	95 %	2 Dokumen	95 %	1,056,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pelaksanaan program penunjang urusan pemerintah daerah	95 %	2,000,000
2 14 01 2.01 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Persentase pelaksanaan program penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Persentase sinergisitas perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	95 %	2 Dokumen	95 %	1,981,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pelaksanaan program penunjang urusan pemerintah daerah	95 %	2,500,000
2 14 01 2.01 05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Persentase pelaksanaan program penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Persentase sinergisitas perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	95 %	2 Dokumen	95 %	1,998,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pelaksanaan program penunjang urusan pemerintah daerah	95 %	2,500,000
2 14 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase pelaksanaan program penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase sinergisitas perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	95 %	5 Laporan	95 %	5,190,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pelaksanaan program penunjang urusan pemerintah daerah	95 %	7,000,000
2 14 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								2,743,308,723				3,107,000,000	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Lima Puluh Kota
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 2.14.2.08.0.00.08.0000 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Sub Unit Organisasi : 2.14.2.08.0.00.08.0000 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2.14.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase pelaksanaan program penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase pelaksanaan administrasi keuangan perangkat daerah	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	95 %	30 Orang/bulan	95 %	2,736,782,723	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pelaksanaan program penunjang urusan pemerintah daerah	95 %	3,100,000,000
2.14.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase pelaksanaan program penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase pelaksanaan administrasi keuangan perangkat daerah	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	95 %	2 Laporan	95 %	6,526,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pelaksanaan program penunjang urusan pemerintah daerah	95 %	7,000,000
2.14.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah								184,863,000					216,560,000
2.14.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase pelaksanaan program penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Persentase pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	95 %	1 Paket	95 %	600,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pelaksanaan program penunjang urusan pemerintah daerah	95 %	3,000,000
2.14.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase pelaksanaan program penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Persentase pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	95 %	2 Paket	95 %	25,389,800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pelaksanaan program penunjang urusan pemerintah daerah	95 %	30,000,000
2.14.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase pelaksanaan program penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Persentase pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	95 %	2 Paket	95 %	24,482,200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pelaksanaan program penunjang urusan pemerintah daerah	95 %	25,000,000
2.14.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase pelaksanaan program penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	95 %	1 Laporan	95 %	5,425,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pelaksanaan program penunjang urusan pemerintah daerah	95 %	7,000,000
2.14.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase pelaksanaan program penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	95 %	2 Laporan	95 %	128,966,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pelaksanaan program penunjang urusan pemerintah daerah	95 %	150,000,000
2.14.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								63,350,000					415,000,000
2.14.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Persentase pelaksanaan program penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Persentase pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	95 %	51 Unit	50 %	29,350,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pelaksanaan program penunjang urusan pemerintah daerah	95 %	40,000,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Lima Puluh Kota
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 2.14.2.08.0.00.08.0000 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Sub Unit Organisasi : 2.14.2.08.0.00.08.0000 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2.14.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase pelaksanaan program penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Persentase pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	95 %	3 Unit	50 %	34,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pelaksanaan program penunjang urusan pemerintah daerah	95 %	75,000,000
2.14.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								164,580,000					284,500,000
2.14.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase pelaksanaan program penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	95 %	1 Laporan	95 %	750,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pelaksanaan program penunjang urusan pemerintah daerah	95 %	1,500,000
2.14.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase pelaksanaan program penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	95 %	1 Laporan	95 %	31,950,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pelaksanaan program penunjang urusan pemerintah daerah	95 %	33,000,000
2.14.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase pelaksanaan program penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	95 %	1 Laporan	95 %	131,880,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pelaksanaan program penunjang urusan pemerintah daerah	95 %	250,000,000
2.14.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								172,746,000					290,000,000
2.14.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase pelaksanaan program penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Persentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	95 %	89 Unit	95 %	148,671,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pelaksanaan program penunjang urusan pemerintah daerah	95 %	180,000,000
2.14.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase pelaksanaan program penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Persentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	95 %	50 Unit	95 %	8,990,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pelaksanaan program penunjang urusan pemerintah daerah	95 %	10,000,000
2.14.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase pelaksanaan program penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Persentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	95 %	16 Unit	95 %	15,085,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pelaksanaan program penunjang urusan pemerintah daerah	95 %	100,000,000
2.14.02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK								272,821,600					245,000,000
2.14.02.2.01	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk								97,378,000					100,000,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Lima Puluh Kota
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 2.14.2.08.0.00.08.0000 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Sub Unit Organisasi : 2.14.2.08.0.00.08.0000 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024						
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target				
2	14	02	2.01	02	Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	Jumlah Dokumen Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	Persentase kebijakan provinsi yang ditindaklanjuti dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1.2 .	1 Dokumen	100 %	97,378,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	1.2 .	100,000,000
2	14	02	2.02		Pemetaan Prakiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota							175,443,600		145,000,000			
2	14	02	2.02	11	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya	Persentase pemetaan prakiraan pengendalian penduduk	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1,20 .	30 Dokumen	60 %	50,032,000	DAK Non Fisik-BOKB-KB	Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	1,20 .	15,000,000
2	14	02	2.02	13	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Persentase pemetaan prakiraan pengendalian penduduk	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1,20 .	79 Dokumen	60 %	125,411,600	DAK Non Fisik-BOKB-KB	Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	1,20 .	130,000,000
2	14	03			PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)							2,989,928,480		3,264,662,500			
2	14	03	2.01		Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal							1,309,972,780		860,000,000			
2	14	03	2.01	01	Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Persentase CPR (Contraceptive Prevalence Rate)	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Persentase promosi KKBPK terhadap keluarga dan kampung KB	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	74,30 %	12 Organisasi	63 %	4,375,000	DAK Non Fisik-BOKB-KB	Persentase CPR (Contraceptive Prevalence Rate)	74,30 %	5,000,000
2	14	03	2.01	02	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Persentase CPR (Contraceptive Prevalence Rate)	Jumlah Dokumen Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Persentase promosi KKBPK terhadap keluarga dan kampung KB	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	74,30 %	13 Dokumen	63 %	25,000,000	DAK Non Fisik-BOKB-KB	Persentase CPR (Contraceptive Prevalence Rate)	74,30 %	50,000,000
2	14	03	2.01	04	Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Persentase CPR (Contraceptive Prevalence Rate)	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Persentase promosi KKBPK terhadap keluarga dan kampung KB	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	74,30 %	316 Dokumen	63 %	70,640,000	DAK Non Fisik-BOKB-KB	Persentase CPR (Contraceptive Prevalence Rate)	74,30 %	100,000,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Lima Puluh Kota
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 2.14.2.08.0.00.08.0000 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Sub Unit Organisasi : 2.14.2.08.0.00.08.0000 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024						
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target				
2	14	03	2.01	06	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Persentase CPR (Contraceptive Prevalence Rate)	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Persentase promosi KKBPK terhadap keluarga dan kampung KB	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	74,30 %	105 Laporan	63 %	202,800,000	DAK Non Fisik-BOKB-KB	Persentase CPR (Contraceptive Prevalence Rate)	74,30 %	210,000,000
2	14	03	2.01	07	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	Persentase CPR (Contraceptive Prevalence Rate)	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	Persentase promosi KKBPK terhadap keluarga dan kampung KB	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	74,30 %	13 Laporan	63 %	967,157,780	DAK Non Fisik-BOKB-KB	Persentase CPR (Contraceptive Prevalence Rate)	74,30 %	450,000,000
2	14	03	2.01	08	Pengendalian Program KKBPK	Persentase CPR (Contraceptive Prevalence Rate)	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK	Persentase promosi KKBPK terhadap keluarga dan kampung KB	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	74,30 %	246 Laporan	63 %	40,000,000	DAK Non Fisik-BOKB-KB	Persentase CPR (Contraceptive Prevalence Rate)	74,30 %	45,000,000
2	14	03	2.02		Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)							483,200,000			1,000,000,000		
2	14	03	2.02	04	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Persentase CPR (Contraceptive Prevalence Rate)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Cakupan PKB yang didayagunakan	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	74.30 %	716 Orang	37.71 %	483,200,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Non Fisik-BOKB-KB	Persentase CPR (Contraceptive Prevalence Rate)	74.30 %	1,000,000,000
2	14	03	2.03		Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota							676,835,700			904,662,500		
2	14	03	2.03	01	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Persentase CPR (Contraceptive Prevalence Rate)	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Persentase penggunaan kontrasepsi jangka panjang	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	74.30 %	37 Laporan	26.7 %	89,410,100	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Non Fisik-BOKB-KB	Persentase CPR (Contraceptive Prevalence Rate)	74.30 %	165,053,400
2	14	03	2.03	03	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Persentase CPR (Contraceptive Prevalence Rate)	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Persentase penggunaan kontrasepsi jangka panjang	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	74.30 %	11079 Orang	26.7 %	534,834,200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Non Fisik-BOKB-KB	Persentase CPR (Contraceptive Prevalence Rate)	74.30 %	699,590,700

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Lima Puluh Kota
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 2.14.2.08.0.00.08.0000 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Sub Unit Organisasi : 2.14.2.08.0.00.08.0000 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024						
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target				
2	14	03	2.03	08	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Persentase CPR (Contraceptive Prevalence Rate)	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Persentase penggunaan kontrasepsi jangka panjang	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	74.30 %	13 Laporan	26.7 %	52,591,400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Non Fisik-BOKB-KB	Persentase CPR (Contraceptive Prevalence Rate)	74.30 %	40,018,400
2	14	03	2.04		Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Masyarakat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB					519,920,000				500,000,000			
2	14	03	2.04	03	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	Persentase CPR (Contraceptive Prevalence Rate)	Jumlah Kampung KB yang Mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Kampung KB	Persentase organisasi masyarakat yang berperan di kampung KB	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	74.30 %	27 Kampung	55 %	519,920,000	DAK Non Fisik-BOKB-KB	Persentase CPR (Contraceptive Prevalence Rate)	74.30 %	500,000,000
2	14	04			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)					1,966,068,000				2,500,000,000			
2	14	04	2.01		Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga					1,966,068,000				2,500,000,000			
2	14	04	2.01	05	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Total Fertlity Rate (TFR)	Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Persentase keluarga aktif mengikuti kegiatan tribina	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2,22 .	39366 Orang	77 %	1,787,540,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Non Fisik-BOKB-KB	Total Fertlity Rate (TFR)	2,22 .	2,300,000,000
2	14	04	2.01	14	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Total Fertlity Rate (TFR)	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Persentase keluarga aktif mengikuti kegiatan tribina	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2,22 .	1200 Keluarga	77 %	178,528,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Total Fertlity Rate (TFR)	2,22 .	200,000,000
TOTAL												10,094,904,803				13,516,952,950	

BAB V

PENUTUP

Terkait dengan penyiapan dan penyediaan dokumen perencanaan pembangunan di tingkat Perangkat Daerah, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak telah menyusun dan menetapkan Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2016-2021 yang memuat tujuan, sasaran, kebijakan dan program pembangunan yang akan dilaksanakan selama 5 tahun kedepan sesuai dengan kewenangan, tugas pokok dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Kemudian terkait dengan perencanaan tahunan daerah maka Pemerintah Kabupaten juga telah menetapkan Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2023.

Sehubungan dengan ini maka Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak juga menyusun dan menetapkan Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Renja DPPKBPPPA) tahun 2023. Renja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ini memuat hal-hal yang terkait dengan pelaksanaan Renja tahun lalu, permasalahan dan rumusan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh pengguna anggaran dan pejabat pelaksana teknis kegiatan pada tahun yang akan datang.

Keberhasilan pelaksanaan Renja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ini sangat tergantung kepada peran aktif seluruh jajaran pimpinan dan staf Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana,

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Untuk itu diperlukan sikap mental, tekad, semangat, dan kekuatan serta disiplin semua unsur Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dengan cara memberi dukungan penuh terhadap pelaksanaan program serta kegiatan sesuai dengan fungsi dan kemampuan masing-masing.

Disamping itu, keberhasilan pelaksanaan Renja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak juga sangat tergantung kepada keseriusan segenap unsur Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam menyiapkan peraturan-peraturan yang akan menjadi dasar hukum bagi pelaksanaan program dan kegiatan serta dalam penataan pengelolaan program dan kegiatan tersebut selama satu tahun yang akan datang, baik dari segi tata kelola sumberdaya manusia, tata kelola anggaran yang telah dialokasikan maupun tata kelola peralatan/perlengkapan. Diharapkan pada awal tahun anggaran berjalan atau awal tahun 2023, seluruh kebutuhan pelaksanaan program/kegiatan tersebut sudah dapat diselesaikan.

Demikian Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2023 disusun, semoga mampu meningkatkan kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun yang akan datang.

Tanjung Pati, 04 Agustus 2021

Pih. KEPALA DINAS PPKBPPPA
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

YULIA MASNA, SKM
NIP. 19751126 199501 1 001



BUPATI LIMA PULUH KOTA

KEPUTUSAN BUPATI LIMA PULUH KOTA NOMOR 391 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA DALAM FORMASI JABATAN *EX-OFFICIO*

BUPATI LIMA PULUH KOTA,

- Menimbang** : a. bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 125 ayat (1) huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang mengamanatkan bahwa persiapan penyusunan Renja Perangkat Daerah meliputi penyusunan rancangan Keputusan Kepala Daerah tentang pembentukan tim penyusun Renja Perangkat Daerah, perlu dibentuk Struktur Organisasi Tim Penyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2023 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas perlu ditetapkan dengan suatu Keputusan Bupati.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada DPRD dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2011 Nomor 10);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 15);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pemerintahan Nagari (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2018 Nomor 1);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 Nomor 1);
17. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 140 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Lima Puluh Kota (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2011 Nomor 140);
18. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 71) Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 83 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2018 Nomor 80);
19. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 25 Tahun 2021 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 Nomor 25).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Struktur Organisasi Tim Penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023 Di Lingkungan Pemerintah

Kabupaten Lima Puluh Kota Dalam Formasi Jabatan *Ex-Officio* dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan yang utuh dengan Keputusan ini.

- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Tugas secara umum :
 - a. Mengambil langkah-langkah yang tepat dan diperlukan dalam rangka penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahun 2023;
 - b. Melaksanakan kegiatan yang dibutuhkan untuk penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah seperti Forum Perangkat Daerah, dan rapat-rapat lainnya.
 - c. Menyusun dan menyajikan Rencana Kerja (Renja), mulai dari Rancangan Awal sampai pada penetapan Renja, sesuai dengan sistematika yang ditetapkan dalam peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
 2. Tugas berdasarkan kedudukan dalam Tim :
 - a. Ketua bertugas mengatur dan memimpin seluruh anggota tim dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2023 di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota;
 - b. Wakil Ketua I bertugas membantu Ketua dalam mengatur dan memimpin penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2023 sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
 - c. Wakil Ketua II bertugas membantu Ketua dalam mengatur dan memimpin penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2023 sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
 - d. Wakil Ketua III bertugas membantu Ketua dalam mengatur dan memimpin penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2023 sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
 - e. Sekretaris bertugas mengecek dan menyiapkan kelengkapan bahan dan seluruh administrasi untuk kelancaran penyusunan dan penulisan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2023 di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota;
 - f. Anggota bertugas menghimpun, mengolah, mengonsep, menyusun, dan menulis serta mengetik naskah Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2023 di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota.
- KETIGA** : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab dan wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Bupati Lima Puluh Kota.
- KEEMPAT** : Untuk kelancaran penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2023 di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota, Ketua Tim dapat menetapkan

pembagian tugas yang lebih rinci kepada seluruh anggota Tim.

KELIMA : Pembiayaan yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2021 dan 2022 melalui DPA masing-masing Perangkat Daerah.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sarilamak
Pada tanggal 6 Desember 2021

BUPATI LIMA PULUH KOTA,



SAFARUDDIN DT. BANDARO RAJO

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LIMA PULUH KOTA

NOMOR : 391 TAHUN 2021

TANGGAL : 06 Desember 2021

TENTANG : PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI TIM
PENYUSUN RENCANA KERJA (RENJA) PERANGKAT
DAERAH TAHUN 2023 DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
DALAM FORMASI JABATAN *EX-OFFICIO*

No.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
1.	SEKRETARIAT DAERAH	
	Sekretaris Daerah	Ketua
	Asisten Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Wakil Ketua I
	Asisten Perekonomian Dan Pembangunan	Wakil Ketua II
	Asisten Administrasi Umum	Wakil Ketua III
	Kabag Perencanaan Dan Keuangan	Sekretaris
	Kabag Pemerintahan	Anggota
	Kabag Hukum	Anggota
	Kabag Organisasi	Anggota
	Kabag Administrasi Pembangunan	Anggota
	Kabag Pengadaan Barang/Jasa	Anggota
	Kabag Perekonomian Dan Sumber Daya Alam	Anggota
	Kabag Kesejahteraan Rakyat	Anggota
	Kabag Umum	Anggota
	Kabag Protokol Dan Komunikasi Pimpinan	Anggota
	Kasubag Perencanaan	Anggota
	Kasubag Keuangan	Anggota
	Kasubag Pelaporan	Anggota
	Kasubag Protokol	Anggota
	Kasubag Komunikasi Pimpinan	Anggota
	Kasubag Dokumentasi Pimpinan	Anggota
	Kasubag Kelembagaan Dan Anjab	Anggota
	Kasubag Pelayanan Publik Dan Tata Laksana	Anggota
	Kasubag Kinerja Dan Reformasi Birokrasi	Anggota
	Kasubag Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli Dan Kepegawaian	Anggota
	Kasubag Perlengkapan	Anggota
	Kasubag Rumah Tangga	Anggota
	Kasubag Pengelolaan Pengadaan Barang Dan Jasa	Anggota
	Kasubag Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Anggota
	Kasubag Pimpinan Dan Advokasi Pengadaan Barang Dan Jasa	Anggota
	Kasubag Penyusunan Program	Anggota
	Kasubag Pengendalian Program	Anggota

No.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
	Kasubag Evaluasi Dan Pelaporan	Anggota
	Kasubag Pembinaan BUMD Dan BLUD	Anggota
	Kasubag Perekonomian	Anggota
	Kasubag Sumber Daya Alam	Anggota
	Kasubag Peraturan Perundang-Undangan	Anggota
	Kasubag Bantuan Hukum	Anggota
	Kasubag Dokumentasi Dan Informasi	Anggota
	Kasubag Bina Mental Dan Spiritual	Anggota
	Kasubag Kesejahteraan Sosial	Anggota
	Kasubag Kesejahteraan Masyarakat	Anggota
	Kasubag Administrasi Pemerintahan Dan Kewilayahan	Anggota
	Kasubag Otonomi Daerah	Anggota
	Kasubag Kerjasama Daerah	Anggota
	Pelaksana pada Sekretariat Daerah	Anggota
2.	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	
	Sekretaris DPRD	Ketua
	Kabag Umum dan Keuangan	Sekretaris
	Kabag Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan	Anggota
	Kabag Persidangan dan Perundang-Undangan	Anggota
	Kasubag Fasilitasi Penganggaran	Anggota
	Kasubag Program dan Keuangan	Anggota
	Kasubag Kajian Perundang-Undangan	Anggota
	Kasubag Humas, Protokol, dan Publikasi	Anggota
	Kasubag Fasilitasi Pengawasan	Anggota
	Kasubag Tata Usaha dan Kepegawaian	Anggota
	Kasubag Rumah Tangga	Anggota
	Kasubag Persidangan dan Risalah	Anggota
	Kasubag Kerjasama dan Aspirasi	Anggota
	Pelaksana pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Anggota
3.	INSPEKTORAT	
	Inspektur	Ketua
	Sekretariat	Sekretaris
	Inspektur Pembantu Wilayah I	Anggota
	Inspektur Pembantu Wilayah II	Anggota
	Inspektur Pembantu Wilayah III	Anggota
	Inspektur Pembantu Wilayah IV	Anggota
	Inspektur Pembantu Pengawasan Tertentu	Anggota
	Kasubag Perencanaan	Anggota
	Kasubag Analisi Dan Evaluasi	Anggota

No.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
	Kasubag Administrasi Umum Dan Keuanagn	Anggota
	Kelompok Jabatan Fungsional pada Inspektorat	Anggota
	Pelaksana pada Inspektorat	Anggota
4.	DINAS KESEHATAN	
	Kepala Dinas Kesehatan	Ketua
	Sekretaris Dinas Kesehatan	Sekretaris
	Kabid Pelayanan Kesehatan	Anggota
	Kabid Sumber Daya Kesehatan	Anggota
	Kabid Kesehatan Masyarakat	Anggota
	Kabid Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Anggota
	Kasubag Perencanaan, Evaluasi, Program dan Pelaporan	Anggota
	Kasubag Keuangan dan Pengelolaan Aset	Anggota
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasi Alat Kesehatan dan Fasyankes	Anggota
	Kasi Pelayanan Kefarmasian dan Perizinan	Anggota
	Kasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	Anggota
	Kasi Surveilens, Imunisasi dan Penanggulangan Krisis Kesehatan	Anggota
	Kasi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular	Anggota
	Kasi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular, Kesehatan Jiwa dan Nafza	Anggota
	Kasi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olah Raga	Anggota
	Kasi Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat	Anggota
	Kasi Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Anggota
	Kasi Pelayanan Kesehatan Primer	Anggota
	Kasi Pelayanan Kesehatan Rujukan, Pelayanan Kesehatan Haji, dan Jaminan Kesehatan	Anggota
	Kasi Peningkatan Mutu dan Akreditasi, dan Pelayanan Kesehatan Tradisional	Anggota
	Pelaksana pada Dinas Kesehatan	Anggota
5.	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Ketua
	Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Sekretaris
	Kabid Pembinaan Pendidikan Dasar	Anggota
	Kabid Pembinaan PAUD dan PNF	Anggota
	Kabid Pembinaan Ketenagaan	Anggota
	Kabid Kebudayaan	Anggota
	Kasubag Perencanaan dan Pelaporan	Anggota
	Kasubag Keuangan dan BMD	Anggota
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota

No.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
	Kasi Kurikulum dan Penilaian	Anggota
	Kasi Peserta Didik dan Pendidikan Karakter	Anggota
	Kasi Kelembagaan dan Sarana Prasana	Anggota
	Kasi Kurikulum, Penilaian dan Peserta Didik	Anggota
	Kasi Kelembagaan dan Sarana Prasarana	Anggota
	Kasi Pendidikan Non Formal	Anggota
	Kasi PTK PAUD dan PNF	Anggota
	Kasi Pendidikan dan Tenaga Kependidikan SD	Anggota
	Kasi Pendidikan dan Tenaga Kependidikan SMP	Anggota
	Kasi Cagar Budaya dan Permuseuman	Anggota
	Kasi Sejarah dan Nilai Tradisi	Anggota
	Kasi Kesenian	Anggota
	Pelaksana pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Anggota
6.	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Ketua
	Sekretaris Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Sekretaris
	Kepala Bidang Bina Marga	Anggota
	Kepala Bidang Cipta Karya	Anggota
	Kepala Bidang Sumber Daya Air	Anggota
	Kepala Bidang Jasa Konstruksi	Anggota
	Kepala Bidang Tata Ruang	Anggota
	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kepala Sub Bagian Keuangan	Anggota
	Kepala Sub Bagian Program dan Pelaporan	Anggota
	Kasi Perencanaan dan Evaluasi Sumber Daya Air	Anggota
	Kasi Pelaksanaan Sumber Daya Air	Anggota
	Kasi Operasi dan pemeliharaan Sumber Daya Air	Anggota
	Kasi Perencanaan dan Evaluasi Bina Marga	Anggota
	Kasi Pembangunan Jalan dan Jembatan	Anggota
	Kasi Preservasi Jalan dan Jembatan	Anggota
	Kasi Perencanaan Jasa Konstruksi	Anggota
	Kasi Pembinaan dan Pemberdayaan	Anggota
	Kasi Pemantauan Dan Evaluasi	Anggota
	Kasi Perencanaan dan Tata Ruang	Anggota
	Kasi Pemanfaatan dan pengendalian	Anggota
	Kasi Pertanahan	Anggota
	Kasi Perencanaan dan Evaluasi Cipta Karya	Anggota
	Kasi Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Permukiman	Anggota
	Kasi Tata Bangunan	Anggota
	Pelaksana pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Anggota

No.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
7.	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
	Kepala Satpol PP	Ketua
	Sekretaris Satpol PP	Sekretaris
	Kabid Trantib	Anggota
	Kabid Perlindungan Masyarakat	Anggota
	Kabid PPUD	Anggota
	Kabid SDA	Anggota
	Kasubag Program & Pelaporan	Anggota
	Kasubag Umum & Kepegawaian	Anggota
	Kasubag Keuangan	Anggota
	Kasi Intelijen	Anggota
	Kasi Trantib & Pengamanan	Anggota
	Kasi Operasional & Logistik	Anggota
	Kasi Bina Potensi	Anggota
	Kasi Data Informasi	Anggota
	Kasi Satlinmas dan Pengaduan Masyarakat	Anggota
	Kasi Kerjasama Antar Lembaga	Anggota
	Kasi Penegakan	Anggota
	Kasi Pembinaan Pengawasan & Penyuluhan	Anggota
	Kasi Pelatihan Dasar	Anggota
	Kasi Teknis Fungsional	Anggota
	Kasi Tindak Internal	Anggota
	Pelaksana pada Satpol PP	Anggota
8.	DINAS PEMADAM KEBAKARAN	
	Kepala Dinas Pemadam Kebakaran	Ketua
	Sekretaris Dinas Pemadam Kebakaran	Sekretaris
	Kabid Pencegahan	Anggota
	Kabid Pemadam Dan Penyelamatan	Anggota
	Kabid Sarana Dan Prasarana	Anggota
	Kasubag Umum Dan Kepegawaian	Anggota
	Kasubag Perencanaan Dan Keuangan	Anggota
	Kasi Pencegahan Dan Inspeksi	Anggota
	Kasi Peningkatan Kapasitas Aparatur	Anggota
	Kasi Pemberdayaan Masyarakat Dan Dunia Usaha	Anggota
	Kasi Pengendalian Operasi Dan Komunikasi	Anggota
	Kasi Pemadam Dan Investigasi	Anggota
	Kasi Penyelamatan Dan Evakuasi	Anggota
	Kasi Pengadaan Sarana Dan Prasarana	Anggota
	Kasi Pemeliharaan Dan Perawatan Sarana	Anggota
	Kasi Informasi Dan Pengelolaan Data	Anggota
	Pelaksana pada Dinas Pemadam Kebakaran	Anggota

No.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
9.	DINAS SOSIAL	
	Kepala Dinas Sosial	Ketua
	Sekretaris Dinas Sosial	Sekretaris
	Kabid Rehabilitasi Sosial	Anggota
	Kabid Perlindungan dan Jaminan Sosial	Anggota
	Kabid Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin	Anggota
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasubag Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	Anggota
	Kasi Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia	Anggota
	Kasi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas	Anggota
	Kasi Rehabilitasi Sosial, Tuna Sosial, Korban Nafza dan Korban Perdagangan Orang	Anggota
	Kasi Perlindungan Sosial Korban Bencana	Anggota
	Kasi Perlindungan Sosial bagi Korban Tindak Kekerasan dan Orang Terlantar	Anggota
	Kasi Jaminan Sosial Keluarga	Anggota
	Kasi Identifikasi dan Penguatan Kapasitas	Anggota
	Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan Penyaluran Bantuan Stimulan	Anggota
	Kasi Kelembagaan, Kepahlawanan dan Restorasi Sosial	Anggota
	Pelaksana pada Dinas Sosial	Anggota
10.	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Ketua
	Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Sekretaris
	Kabid Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Anggota
	Kabid Pelayanan Pencatatan Sipil	Anggota
	Kabid Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Anggota
	Kabid Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan	Anggota
	Kasubag Perencanaan	Anggota
	Kasubag Keuangan	Anggota
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasi Identitas Penduduk	Anggota
	Kasi Pindah Datang Penduduk	Anggota
	Kasi Pendataan Penduduk	Anggota
	Kasi Kelahiran	Anggota
	Kasi Perkawinan dan Perceraian	Anggota
	Kasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan	Anggota
	Kasi Pengolahan dan Penyajian Data	Anggota
	Kasi Tata Kelola dan Sumber Daya Manusia Teknologi Informasi dan Komunikasi	Anggota
	Kasi Kerjasama	Anggota
	Kasi Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan	Anggota

No.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
	Kasi Inovasi Pelayanan	Anggota
	Pelaksana pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Anggota
11.	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
	Kepala DPPKBPPPA	Ketua
	Sekretaris DPPKBPPPA	Sekretaris
	Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Kesejahteraan Keluarga	Anggota
	Kepala Bidang Keluarga Berencana, Advokasi dan Penggerakan	Anggota
	Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan	Anggota
	Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak	Anggota
	Kasubag Program dan Pelaporan	Anggota
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasubag Keuangan	Anggota
	Kepala Seksi Pengendalian Penduduk	Anggota
	Kepala Seksi Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Anggota
	Kepala Seksi Penyuluhan, Pendayagunaan PKB/PLKB dan IMP	Anggota
	Kepala Seksi Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	Anggota
	Kepala Seksi Advokasi dan Penggerakan	Anggota
	Kepala Seksi Pengendalian dan Pendistribusian Alokasi	Anggota
	Kepala Seksi Pelembagaan PUG dan Pemberdayaan Perempuan Bidang Ekonomi	Anggota
	Kepala Seksi Pelembagaan PUG dan Pemberdayaan Perempuan Bidang Sosial Politik dan Hukum	Anggota
	Kepala Seksi Pelembagaan PUG dan Pemberdayaan Perempuan Bidang Kualitas Keluarga, Data dan Informasi	Anggota
	Kepala Seksi Perlindungan Perempuan dan Data Kekerasan Perempuan	Anggota
	Kepala Seksi Pemenuhan Hak Anak, Data dan Informasi Anak	Anggota
	Kepala Seksi Perlindungan Khusus Anak dan Data Kekerasan Anak	Anggota
	Pelaksana pada DPPKBPPPA	Anggota
12.	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
	Kepala DPMPTSP	Ketua
	Sekretaris DPMPTSP	Sekretaris
	Kabid Pelayanan Terpadu	Anggota
	Kabid Promosi	Anggota
	Kabid Perencanaan dan Pengembangan	Anggota

No.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
	Kabid Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Anggota
	Kasubag Program dan Pelaporan	Anggota
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasubag Keuangan	Anggota
	Kasi Pelayanan Perizinan Umum	Anggota
	Kasi Pelayanan Perizinan Umum Penanaman Modal	Anggota
	Kasi Fasilitasi Pelayanan Penanaman Modal dan Perizinan Lainnya	Anggota
	Kasi Promosi	Anggota
	Kasi Sarana dan Prasarana Promosi	Anggota
	Kasi Data dan Informasi	Anggota
	Kasi Perencanaan Potensi dan Peluang Investasi	Anggota
	Kasi Penyuluhan Penanaman Modal	Anggota
	Kasi Regulasi Penanaman Modal	Anggota
	Kasi Pemantauan Penanaman Modal	Anggota
	Kasi Pembinaan Penanaman Modal	Anggota
	Kasi Pengawasan Penanaman Modal	Anggota
	Pelaksana pada DPMPTSP	Anggota
13.	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH	
	Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi UKM	Ketua
	Sekretaris Perdagangan, Koperasi UKM	Sekretaris
	Kepala Bidang Fasilitasi dan Sarana Distribusi Perdagangan	Anggota
	Kepala Bidang Kemetrolagian dan Pengawasan Perdagangan	Anggota
	Kepala Bidang Kelembagaan & Pengawasan Koperasi	Anggota
	Kepala Bidang Pemberdayaan & Pengembangan Koperasi & Usaha Mikro	Anggota
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasubag Keuangan	Anggota
	Kasubag Program dan Pelaporan	Anggota
	Kasi Kelembagaan dan perizinan	Anggota
	Kasi Peningkatan kualitas SDM koperasi & kewirausahaan	Anggota
	Kasi Metrologi	Anggota
	Kasi Pengembangan Jaringan Perdagangan	Anggota
	Kasi Pembinaan Pelaku Usaha Perdagangan	Anggota
	Kasi Sarana Distribusi dan Stabilitas Barang Pokok dan Penting	Anggota
	Kasi Pengawasan Perizinan dan Pendaftaran	Anggota
	Kasi Pengawasan Peredaran Barang dan Jasa	Anggota
	Kasi Keanggotaan dan Penerapan Peraturan	Anggota
	Kasi Pengawasan, Pemeriksaan, dan Penilaian	Anggota

No.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
	Kesehatan Koperasi	
	Kasi Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi	Anggota
	Kasi Pemberdayaan dan Fasilitasi Usaha Mikro	Anggota
	Pelaksana pada Dinas Perdagangan, Koperasi UKM	Anggota
14.	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA	
	Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Ketua
	Sekretaris Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Sekretaris
	Kabid Pembinaan dan Pengawasan Industri	Anggota
	Kabid Sarana dan Prasarana Industri	Anggota
	Kabid Ketenagakerjaan	Anggota
	Kabid Transmigrasi	Anggota
	Kasubag Program dan Pelaporan	Anggota
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasubag Keuangan	Anggota
	Kasi Pembinaan Industri Agro	Anggota
	Kasi Pembinaan Industri Non Agro	Anggota
	Kasi Pengawasan, Sertifikasi dan Standarisasi Industri	Anggota
	Kasi Perizinan dan Data	Anggota
	Kasi Pengembangan teknologi Industri	Anggota
	Kasi Promosi dan Pemasaran	Anggota
	Kasi Pelatihan dan Produktifitas Tenaga Kerja	Anggota
	Kasi Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja	Anggota
	Kasi Perlindungan Tenaga Kerja	Anggota
	Kasi Penempatan Transmigrasi	Anggota
	Kasi Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi	Anggota
	Kasi Informasi dan Pembinaan SDM Transmigrasi	Anggota
	Pelaksana pada Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Anggota
15.	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
	Kepala Diskominfo	Ketua
	Sekretaris Diskominfo	Sekretaris
	Kabid Komunikasi Publik	Anggota
	Kabid Aplikasi Informatika	Anggota
	Kabid Statistik dan Pelayanan Informasi Publik	Anggota
	Kabid Persandian Dan Manajemen Data Elektronik	Anggota
	Kasubag Program dan Pelaporan	Anggota
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasubag Keuangan	Anggota
	Kasi Monitoring Opini Dan Aspirasi Publik	Anggota
	Kasi Pengelola Media Komunikasi Publik	Anggota
	Kasi Layanan Hubungan Media Dan Kehumasan	Anggota

No.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
	Kasi Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Elektronik	Anggota
	Kasi Infrastruktur Teknologi Informasi Dan Komunikasi	Anggota
	Kasi Aplikasi	Anggota
	Kasi Statistik Sektor Ekonomi Dan Infastruktur	Anggota
	Kasi Statistik Sektor Pemerintahan Dan Sosial	Anggota
	Kasi Pelayanan Informasi Publik	Anggota
	Kasi Identifikasi Deteksi Dan Proteksi Keamanan SIBER	Anggota
	Kasi Penanggulangan Pemulihan Pemantauan Dan Pengendalian	Anggota
	Kasi Manajemen Data Elektronik	Anggota
	Pelaksana pada Diskominfo	Anggota
16.	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA	
	Kepala Dinas Pariwisata Pemuda dan Olah Raga	Ketua
	Sekretaris Dinas Pariwisata Pemuda dan Olah Raga	Sekretaris
	Kasubag Program dan Pelaporan	Anggota
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasubag Keuangan	Anggota
	Kabid Pariwisata	Anggota
	Kasi Promosi dan Informasi	Anggota
	Kasi Pengelolaan dan Pengembangan Destinasi Pariwisata	Anggota
	Kasi Kemitraan dan Kerjasama Antar Lembaga	Anggota
	Kabid Pemuda	Anggota
	Kasi Peningkatan Kreatifitas Kewirausahaan Pemuda	Anggota
	Kasi Pengembangan Kompetensi Pemuda	Anggota
	Kasi Pengembangan Organisasi Kepemudaan	Anggota
	Kabid Olahraga	Anggota
	Kasi Pengembangan Olah Raga Pendidikan	Anggota
	Kasi Pengembangan Olah Raga Prestasi	Anggota
	Kasi Pengembangan Olah Raga Rekreasi dan Tradisi	Anggota
	Kabid Sarana Prasarana dan Pengembangan SDM	Anggota
	Kasi Sarana Prasarana Pariwisata	Anggota
	Kasi Sarana Prasarana Pemuda Olah Raga	Anggota
	Kasi Pendataan dan Pengembangan SDM	Anggota
	Pelaksana pada Dinas Pariwisata Pemuda dan Olah Raga	Anggota
17.	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA/NAGARI	
	Kepala DPMD/N	Ketua
	Sekretaris DPMD/N	Sekretaris
	Kabid Pemberdayaan Masyarakat	Anggota

No.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
	Kabid Pemerintahan Nagari	Anggota
	Kabid Pengelolaan Keuangan dan Aset Nagari	Anggota
	Kasubag Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	Anggota
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Ketahanan dan Partisipasi Masyarakat	Anggota
	Kasi Pemberdayaan Adat, Sosial Budaya dan Kesejahteraan Keluarga	Anggota
	Kasi Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat, Kawasan Nagari, SDA dan TTG	Anggota
	Kasi Pemberdayaan Aparatur dan Lembaga Pemerintahan Nagari	Anggota
	Kasi Administrasi Produk Hukum Nagari dan Kerjasama antar Nagari	Anggota
	Kasi Organisasi Pemerintahan Nagari	Anggota
	Kasi Perencanaan Keuangan Nagari	Anggota
	Kasi Pertanggungjawaban dan Pelaporan Keuangan Nagari	Anggota
	Kasi Aset dan Kekayaan Nagari	Anggota
	Pelaksana pada DPMD/N	Anggota
18.	DINAS PERHUBUNGAN	
	Kepala Dinas Perhubungan	Ketua
	Sekretaris Dinas Perhubungan	Sekretaris
	Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan	Anggota
	Kepala Bidang Pengembangan dan Keselamatan	Anggota
	Kepala Bidang Prasarana	Anggota
	Kasubag Perencanaan Keuangan dan Pelaporan	Anggota
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasi Lalu Lintas	Anggota
	Kasi Perencanaan dan Pembangunan Prasarana	Anggota
	Kasi Pengujian Sarana	Anggota
	Kasi Angkutan	Anggota
	Kasi Pengoperasian Prasarana	Anggota
	Kasi Perawatan Prasarana	Anggota
	Kasi Pemaduan Moda dan Teknologi Perhubungan	Anggota
	Kasi Lingkungan Perhubungan	Anggota
	Kasi Keselamatan	Anggota
	Pelaksana pada Dinas Perhubungan	Anggota
19.	DINAS LINGKUNGAN HIDUP PERUMAHAN RAKYAT DAN PERMUKIMAN	
	Kepala DLHPP	Ketua
	Sekretaris DLHPP	Sekretaris
	Kabid Perencanaan, Pengkajian dan Peningkatan	Anggota

No.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
	Kapasitas Lingkungan Hidup	
	Kabid Pengelolaan Sampah, Limbah dan Pertamanan	Anggota
	Kabid Pengendalian Pencemaran, Kerusakan dan Penataan Hukum Lingkungan Hidup	Anggota
	Kabid Perumahan dan Kawasan Pemukiman	Anggota
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasubag Keuangan	Anggota
	Kasubag Program dan Pelaporan	Anggota
	Kasi Perencanaan, Pengkajian dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup	Anggota
	Kasi Pengkajian Dampak Lingkungan Hidup	Anggota
	Kasi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup	Anggota
	Kasi Operasional Penanganan Sampah	Anggota
	Kasi Pengelolaan Limbah dan Sampah	Anggota
	Kasi Pertamanan dan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau	Anggota
	Kasi Pengendalian Pencemaran Lingkungan	Anggota
	Kasi Pengendalian Kerusakan Lingkungan Hidup	Anggota
	Kasi Penataan Hukum Lingkungan Hidup	Anggota
	Kasi Perumahan	Anggota
	Kasi Kawasan Permukiman	Anggota
	Kasi Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum	Anggota
	Analisis Lingkungan Hidup	Anggota
	Analisis Sistem Mutu dan Lingkungan	Anggota
	Pelaksana pada DLHPP	Anggota
20.	DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN	
	Kepala Distanhorbun	Ketua
	Sekretaris Distanhorbun	Sekretaris
	Kabid Sarana	Anggota
	Kabid Prasarana	Anggota
	Kabid Perlindungan Tanaman Dan Perizinan Usaha	Anggota
	Kabid penyuluhan	Anggota
	Kasubag Perencanaan Dan Evaluasi	Anggota
	Kasubag Keuangan Dan Aset	Anggota
	Kasubag Umum Dan Kepegawaian	Anggota
	Kasi Pupuk Dan Pestisida	Anggota
	Kasi Sumber Daya Genetik	Anggota
	Kasi Alat Dan Mesin Pertanian	Anggota
	Kasi Pengembangan Prasarana	Anggota
	Kasi Irigasi	Anggota
	Kasi Infrastruktur Pertanian	Anggota
	Kasi Perlindungan Tanaman	Anggota

No.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
	Kasi Penanganan Dampak Perubahan Iklim Dan Bencana Alam	Anggota
	Kasi Perizinan Dan Pembinaan Usaha	Anggota
	Kasi Kelembagaan	Anggota
	Kasi Ketenagaan	Anggota
	Kasi Penyelenggaraan Penyuluhan	Anggota
	Pelaksana pada Distanhorbun	Anggota
21.	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	
	Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	Ketua
	Sekretaris Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	Sekretaris
	Kabid Perbibitan dan Produksi	Anggota
	Kabid Keswan, Kesmavet, Pengolahan dan Pemasaran	Anggota
	Kabid. Sarana dan Prasarana	Anggota
	Kabid Penyuluhan	Anggota
	Kasubag Program dan Pelaporan	Anggota
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasubag Keuangan	Anggota
	Kasi Kasi Non Ruminansia	Anggota
	Kasi Kasi Ruminansia	Anggota
	Kasi Perbibitan	Anggota
	Kasi Kesmavet	Anggota
	Kasi Kesehatan Hewan	Anggota
	Kasi Pengolahan dan Pemasaran	Anggota
	Kasi Pakan	Anggota
	Kasi Pembiayaan dan Investasi	Anggota
	Kasi Lahan dan Irigasi	Anggota
	Kasi Kelembagaan	Anggota
	Kasi Metode dan Infomasi	Anggota
	Kasi Ketenagaan	Anggota
	Pelaksana pada Disnakkeswan	Anggota
22.	DINAS PERIKANAN	
	Kepala Dinas Perikanan	Ketua
	Sekretaris Dinas Perikanan	Sekretaris
	Kabid Pengembangan Sumberdaya Perikanan	Anggota
	Kabid Pemberdayaan Usaha Perikanan	Anggota
	Kabid Pengelolaan Pembudidaya Ikan	Anggota
	Kasubag Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	Anggota
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasi Pengelolaan Kawasan Budidaya, Tata Pemanfaatan Air, Lahan dan Pelestarian Plasma Nutiah	Anggota

No.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
	Kasi Kesehatan Ikan dan Lingkungan	Anggota
	Kasi Pengendalian Mutu Pembudiyaaan Ikan	Anggota
	Kasi Sarana dan Prasarana Perikanan	Anggota
	Kasi Jaminan Perlindungan Usaha Perikanan	Anggota
	Kasi Penguatan Daya Saing Usaha Perikanan	Anggota
	Kasi Peningkatan SDM Pelaku Usaha Perikanan	Anggota
	Kasi Kemitraan Usaha dan Fasilitasi Perizinan Perikanan	Anggota
	Kasi Kelembagaan, Pendampingan dan Koordinasi Penyuluhan Perikanan	Anggota
	Pelaksana pada Dinas Perikanan	Anggota
23.	DINAS PANGAN	
	Kepala Dinas Pangan	Ketua
	Sekretaris Dinas Pangan	Sekretaris
	Kabid Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan	Anggota
	Kabid Ketersediaan, Distribusi dan Kerawanan Pangan	Anggota
	Kasubag Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	Anggota
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasi Ketersediaan Pangan	Anggota
	Kasi Distribusi dan Harga Pangan	Anggota
	Kasi Kerawanan Pangan	Anggota
	Kasi Penganekaragaman Konsumsi Pangan	Anggota
	Kasi Pengembangan Pangan Lokal	Anggota
	Kasi Keamanan Pangan	Anggota
	Pelaksana pada Dinas Pangan	Anggota
24.	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
	Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Ketua
	Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Sekretaris
	Kabid Perpustakaan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Anggota
	Kabid Kearsipan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Anggota
	Kabid Pembinaan dan Pengawasan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Anggota
	Kasubag Umum dan Kepegawaian Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Anggota
	Kasubag Perencanaan Keuangan dan Pelaporan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Anggota
	Kasi Deposit dan Pelestarian Bahan Pustaka Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Anggota
	Kasi Promosi dan Layanan Perpustakaan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Anggota
	Kasi Pengembangan, Pengolahan Bahan Pustaka dan TIK Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Anggota

No.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
	Kasi Arsip Dinamis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Anggota
	Kasi Penyelamatan dan Pelestarian Arsip Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Anggota
	Kasi Arsip Statis dan Layanan Informasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Anggota
	Kasi Pembinaan Perpustakaan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Anggota
	Kasi Pembinaan Kearsipan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Anggota
	Kasi Pengawasan Perpustakaan dan Kearsipan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Anggota
	Fungsional Pustakawan	Anggota
	Fungsional Kearsipan	Anggota
	Pelaksana pada Dinas Pustaka dan Kearsipan	Anggota
25.	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	
	Kepala Bapelitbang	Ketua
	Sekretaris Bapelitbang	Sekretaris
	Kabid Ekonomi Penelitian dan Pengembangan	Anggota
	Kabid SDM, Sosbud dan Pemerintahan Bapelitbang	Anggota
	Kabid Perencanaan, Data, Pengendalian dan Evaluasi Bapelitbang	Anggota
	Kabid Infrastruktur, Pengembangan Wilayah dan Lingkungan Hidup Bapelitbang	Anggota
	Kasubag Program Bapelitbang	Anggota
	Kasubag Umum dan Kepegawaian Bapelitbang	Anggota
	Kasubag Keuangan Bapelitbang	Anggota
	Kasubid Pertanian dan Perikanan Bapelitbang	Anggota
	Kasubid Perindustrian, Perdagangan, UMK, Penanaman Modal dan Pariwisata Bapelitbang	Anggota
	Kasubid Perencanaan dan Pendanaan Bapelitbang	Anggota
	Kasubid Pemerintahan Bapelitbang	Anggota
	Kasubid Sosial Budaya Bapelitbang	Anggota
	Kasubid Sumber Daya Manusia Bapelitbang	Anggota
	Kasubid Infrastruktur Bapelitbang	Anggota
	Kasubid Pengembangan Wilayah Bapelitbang	Anggota
	Kasubid Lingkungan Hidup Bapelitbang	Anggota
	Kasubid Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bapelitbang	Anggota
	Kasubid Data dan Informasi Bapelitbang	Anggota
	Kasubid Penelitian dan Pengembangan Bapelitbang	Anggota
	Pelaksana pada Bapelitbang	Anggota
26.	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM	
	Kepala BKPSDM	Ketua

No.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
	Sekretaris BKPSDM	Sekretaris
	Kabid Pendidikan, Pelatihan dan Penilaian Kinerja ASN	Anggota
	Kasubid Pendidikan dan Pelatihan Kompetensi Teknis	Anggota
	Kasubid Pendidikan dan Pelatihan Kompetensi Manajerial ASN	Anggota
	Kasubid Pendidikan dan Penilaian Kinerja ASN	Anggota
	Kabid Pengembangan dan Disiplin ASN	Anggota
	Kasubid Kepangkatan	Anggota
	Kasubid Mutasi	Anggota
	Kasubid Displin ASN	Anggota
	Kabid Informasi Pengadaan dan Status PNS	Anggota
	Kasubid Status ASN	Anggota
	Kasubid Informasi ASN	Anggota
	Kasubid Formasi dan Pengadaan ASN	Anggota
	Kasubag Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	Anggota
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Pelaksana pada BKPSDM	Anggota
27.	BADAN KEUANGAN	
	Kepala Badan Keuangan	Ketua
	Sekretaris Badan Keuangan	Sekretaris
	Kasubag Program dan Pelaporan	Anggota
	Kasubag Keuangan	Anggota
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kabid Perencanaan Anggaran Daerah	Anggota
	Kasubid 1 Bid. Perencanaan Anggaran Daerah	Anggota
	Kasubid 2 Bid. Perencanaan Anggaran Daerah	Anggota
	Kasubid 3 Bid. Perencanaan Anggaran Daerah	Anggota
	Kabid Perbendaharaan Daerah	Anggota
	Kasubid 1 Bid. Perbendaharaan Daerah	Anggota
	Kasubid 2 Bid. Perbendaharaan Daerah	Anggota
	Kasubid 3 Bid. Perbendaharaan Daerah	Anggota
	Kabid Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Anggota
	Kasubid 1 Bid. Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Anggota
	Kasubid 2 Bid. Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Anggota
	Kasubid 3 Bid. Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Anggota
	Kabid Pengelolaan Barang Milik Daerah	Anggota
	Kasubid 1 Bid. Pengelolaan Barang Milik Daerah	Anggota
	Kasubid 2 Bid. Pengelolaan Barang Milik Daerah	Anggota
	Kasubid 3 Bid. Pengelolaan Barang Milik Daerah	Anggota
	Kabid Perencanaan, Pengembangan, Pengendalian dan	Anggota

No.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
	Evaluasi Pendapatan Daerah	
	Kasubid 1 Bid. Perencanaan, Pengembangan, Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah	Anggota
	Kasubid 2 Bid. Perencanaan, Pengembangan, Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah	Anggota
	Kasubid 3 Bid. Perencanaan, Pengembangan, Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah	Anggota
	Kabid Pengelolaan Pendapatan Daerah	Anggota
	Kasubid 1 Bid. Pengelolaan Pendapatan Daerah	Anggota
	Kasubid 2 Bid. Pengelolaan Pendapatan Daerah	Anggota
	Kasubid 3 Bid. Pengelolaan Pendapatan Daerah	Anggota
	Pelaksana pada Badan Keuangan	Anggota
28.	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	Ketua
	Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	Sekretaris
	Kabid Ideologi Dan Wasbang	Anggota
	Kabid Politik Dalam Negeri	Anggota
	Kabid Kewaspadaan Dan Pembinaan Masyarakat	Anggota
	Kasubag Program dan Pelaporan	Anggota
	Kasubag Umum Dan Kepegawaian	Anggota
	Kasubag Keuangan	Anggota
	Kasubid Bina Ideologi	Anggota
	Kasubid Bina Wasbang	Anggota
	Kasubid Bintah, Eksosbud Dan Agama	Anggota
	Kasubid Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Dini	Anggota
	Kasubid HAL Dan Fasilitasi Pemilu	Anggota
	Kasubid Fasilitasi Parpol Dan Ormas	Anggota
	Pelaksana pada Badan Kesbangpol	Anggota
29.	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
	Kepala Pelaksana BPBD	Ketua
	Sekretaris BPBD	Sekretaris
	Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Anggota
	Kabid Kedaruratan dan Logistik	Anggota
	Kabid Rehabilitasi dan Rekonstruksi	Anggota
	Kasubag Program dan Pelaporan	Anggota
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasubag Keuangan	Anggota
	Kasi Pencegahan	Anggota
	Kasi Kesiapsiagaan	Anggota
	Kasi Kedaruratan	Anggota
	Kasi Logistik	Anggota
	Kasi Rehabilitasi	Anggota

No.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
	Kasi Rekonstruksi	Anggota
	Pelaksana pada BPBD	Anggota
30.	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. ACHMAD DARWIS	
	Direktur RSUD dr. Achmad Darwis	Ketua
	Kabag Tata Usaha	Sekretaris
	Kabid Perencanaan Pelaporan Sarana Prasarana dan Logistik	Anggota
	Kabid Pelayanan Penunjang dan Promosi Kesehatan	Anggota
	Kabid Pelayanan Medis dan Keperawatan	Anggota
	Kasi Sarana Prasarana Dan Logistik	Anggota
	Kasi Perencanaan Dan Pelaporan	Anggota
	Kasi Pelayanan Penunjang Medis	Anggota
	Kasi Pelayanan Penunjang Non Medis Dan Promosi Kesehatan	Anggota
	Kasi Pelayanan Medis	Anggota
	Kasi Pelayanan Perawatan	Anggota
	Kasubag Keuangan	Anggota
	Kasubag Umum dan Humas	Anggota
	Kasubag Kepegawaian Dan Pengembangan SDM	Anggota
	Pelaksana pada RSUD Achmad Darwis	Anggota
31.	KECAMATAN GUGUAK	
	Camat Guguak	Ketua
	Sekretaris Camat Guguak	Sekretaris
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasubag Keuangan Perencanaan dan Evaluasi	Anggota
	Kasi Pemerintahan	Anggota
	Kasi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Anggota
	Kasi Ketenteraman dan Ketertiban	Anggota
	Kasi Kesejahteraan Sosial	Anggota
	Kasi Pelayanan	Anggota
	Pelaksana pada Kecamatan Guguak	Anggota
32.	KECAMATAN PAYAKUMBUH	
	Camat Payakumbuh	Ketua
	Sekretaris Camat Payakumbuh	Sekretaris
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasubag Keuangan Perencanaan dan Evaluasi	Anggota
	Kasi Pemerintahan	Anggota
	Kasi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Anggota
	Kasi Ketenteraman dan Ketertiban	Anggota
	Kasi Kesejahteraan Sosial	Anggota

No.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
	Kasi Pelayanan	Anggota
	Pelaksana pada Kecamatan Payakumbuh	Anggota
33.	KECAMATAN MUNGKA	
	Camat Mungka	Ketua
	Sekretaris Camat Mungka	Sekretaris
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasubag Keuangan Perencanaan dan Evaluasi	Anggota
	Kasi Pemerintahan	Anggota
	Kasi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Anggota
	Kasi Ketenteraman dan Ketertiban	Anggota
	Kasi Kesejahteraan Sosial	Anggota
	Kasi Pelayanan	Anggota
	Pelaksana pada Kecamatan Mungka	Anggota
34.	KECAMATAN SULIKI	
	Camat Suliki	Ketua
	Sekretaris Camat Suliki	Sekretaris
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasubag Keuangan Perencanaan dan Evaluasi	Anggota
	Kasi Pemerintahan	Anggota
	Kasi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Anggota
	Kasi Ketenteraman dan Ketertiban	Anggota
	Kasi Kesejahteraan Sosial	Anggota
	Kasi Pelayanan	Anggota
	Pelaksana pada Kecamatan Suliki	Anggota
35.	KECAMATAN BUKIK BARISAN	
	Camat Bukik Barisan	Ketua
	Sekretaris Camat Bukik Barisan	Sekretaris
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasubag Keuangan Perencanaan dan Evaluasi	Anggota
	Kasi Pemerintahan	Anggota
	Kasi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Anggota
	Kasi Ketenteraman dan Ketertiban	Anggota
	Kasi Kesejahteraan Sosial	Anggota
	Kasi Pelayanan	Anggota
	Pelaksana pada Kecamatan Bukik Barisan	Anggota
36.	KECAMATAN GUNUANG OMEH	
	Camat Gunuang Omeh	Ketua
	Sekretaris Camat Gunuang Omeh	Sekretaris
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota

No.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
	Kasubag Keuangan Perencanaan dan Evaluasi	Anggota
	Kasi Pemerintahan	Anggota
	Kasi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Anggota
	Kasi Ketenteraman dan Ketertiban	Anggota
	Kasi Kesejahteraan Sosial	Anggota
	Kasi Pelayanan	Anggota
	Pelaksana pada Kecamatan Gunuang Omeh	Anggota
37.	KECAMATAN LUAK	
	Camat Luak	Ketua
	Sekretaris Camat Luak	Sekretaris
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasubag Keuangan Perencanaan dan Evaluasi	Anggota
	Kasi Pemerintahan	Anggota
	Kasi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Anggota
	Kasi Ketenteraman dan Ketertiban	Anggota
	Kasi Kesejahteraan Sosial	Anggota
	Kasi Pelayanan	Anggota
	Pelaksana pada Kecamatan Luak	Anggota
38.	KECAMATAN LAREH SAGO HALABAN	
	Camat Lareh Sago Halaban	Ketua
	Sekretaris Camat Lareh Sago Halaban	Sekretaris
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasubag Keuangan Perencanaan dan Evaluasi	Anggota
	Kasi Pemerintahan	Anggota
	Kasi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Anggota
	Kasi Ketenteraman dan Ketertiban	Anggota
	Kasi Kesejahteraan Sosial	Anggota
	Kasi Pelayanan	Anggota
	Pelaksana pada Kecamatan Lareh Sago Halaban	Anggota
39.	KECAMATAN HARAU	
	Camat Harau	Ketua
	Sekretaris Camat Harau	Sekretaris
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasubag Keuangan Perencanaan dan Evaluasi	Anggota
	Kasi Pemerintahan	Anggota
	Kasi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Anggota
	Kasi Ketenteraman dan Ketertiban	Anggota
	Kasi Kesejahteraan Sosial	Anggota
	Kasi Pelayanan	Anggota
	Pelaksana pada Kecamatan Harau	Anggota

No.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
40.	KECAMATAN SITUJUAH LIMO NAGARI	
	Camat Situjuah Limo Nagari	Ketua
	Sekretaris Camat Situjuah Limo Nagari	Sekretaris
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasubag Keuangan Perencanaan dan Evaluasi	Anggota
	Kasi Pemerintahan	Anggota
	Kasi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Anggota
	Kasi Ketenteraman dan Ketertiban	Anggota
	Kasi Kesejahteraan Sosial	Anggota
	Kasi Pelayanan	Anggota
	Pelaksana pada Kecamatan Situjuah Limo Nagari	Anggota
41.	KECAMATAN AKABILURU	
	Camat Akabiluru	Ketua
	Sekretaris Camat Akabiluru	Sekretaris
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasubag Keuangan Perencanaan dan Evaluasi	Anggota
	Kasi Pemerintahan	Anggota
	Kasi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Anggota
	Kasi Ketenteraman dan Ketertiban	Anggota
	Kasi Kesejahteraan Sosial	Anggota
	Kasi Pelayanan	Anggota
	Pelaksana pada Kecamatan Akabiluru	Anggota
42.	KECAMATAN PANGKALAN KOTO BARU	
	Camat Pangkalan Koto Baru	Ketua
	Sekretaris Camat Pangkalan Koto Baru	Sekretaris
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasubag Keuangan Perencanaan dan Evaluasi	Anggota
	Kasi Pemerintahan	Anggota
	Kasi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Anggota
	Kasi Ketenteraman dan Ketertiban	Anggota
	Kasi Kesejahteraan Sosial	Anggota
	Kasi Pelayanan	Anggota
	Pelaksana pada Kecamatan Pangkalan Koto Baru	Anggota
43.	KECAMATAN KAPUR IX	
	Camat Kapur IX	Ketua
	Sekretaris Camat Kapur IX	Sekretaris
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasubag Keuangan Perencanaan dan Evaluasi	Anggota
	Kasi Pemerintahan	Anggota
	Kasi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Anggota

No.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
	Kasi Ketenteraman dan Ketertiban	Anggota
	Kasi Kesejahteraan Sosial	Anggota
	Kasi Pelayanan	Anggota
	Pelaksana pada Kecamatan Kapur IX	Anggota

Ditetapkan di Sarilamak
 Pada tanggal 6 Desember 2021

BUPATI LIMA PULUH KOTA,



SAFARUDDIN DT. BANDARO RAJO